TUGAS AKHIR – DK 184802

STRATEGI PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH DI AREA PENDUKUNG INDUSTRI KELURAHAN KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO

CINTHYA DIANA QONITA
08211640000013

Dosen Pembimbing :
Dian Rahmawati, ST., MT.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2020

TUGAS AKHIR – DK 184802

STRATEGI PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH DI AREA PENDUKUNG INDUSTRI KELURAHAN KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO

CINTHYA DIANA QONITA
08211640000013

Dosen Pembimbing :
Dian Rahmawati, ST., MT.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2020

FINAL PROJECTS – DK 184802

STRATEGY FOR SLUM SETTLEMENT IN INDUSTRIAL SUPPORT AREA KRIAN SUBDISTRICT, SIDOARJO REGENCY

CINTHYA DIANA QONITA
08211640000013

Advisor :
Dian Rahmawati, ST., MT.

Departement of Urban and Regional Planning
Faculty of Civil Engineering Planning Geo Engineering
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2020

LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH DI AREA PENDUKUNG INDUSTRI KELURAHAN KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota

Pada

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

CINTHYA DIANA QONITA
NRP. 08211640000013

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :

Dian Rahmawati, ST., MT.
NIP. 198206072009122002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS TEKNIK SIPIL, PERENCANAAN, DAN KEBUMIAN
DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Surabaya, Agustus 2020

“Halaman sengaja dikosongkan”

STRATEGI PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH DI AREA PENDUKUNG INDUSTRI KELURAHAN KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO

Nama	**: Cinthya Diana Qonita**
NRP	**: 08211640000013**
Departemen	**: Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSLK – ITS**
Pembimbing	**: Dian Rahmawati S.T., M.T.**

ABSTRAK

Kebutuhan akan tempat tinggal berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, hal tersebut menjadi permasalahan apabila masyarakat tidak dapat memenuhinya sehingga terpaksa tinggal di kawasan kurang layak dan menimbulkan kawasan kumuh, seperti yang terjadi di Kelurahan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kelurahan Krian termasuk Prioritas I dalam penanganan kumuh. Letak Kelurahan Krian yang berada dekat dengan Kawasan Industri SIBORIAN menjadikan permukiman di Kelurahan Krian menjadi pendukung dari Kawasan Industri berdasarkan RTRW Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut juga menarik pekerja untuk bertempat tinggal di Kelurahan Krian. Oleh karena itu, diperlukan perhatian mengenai adanya permukiman yang ada, sehingga dapat mendukung kawasan industri dan tidak mejadikannya kawasan kumuh. Sehingga, penanganan yang dilakukan perlu memperhatikan bagaimana pemukiman tersebut mendukung kawasan industri yang ada. Maka perlu dirumuskan strategi mengenai penanganan permukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian.

Penelitian ini terdiri dari 3 tahapan, tahap pertama yaitu melakukan deleniasi area pendukung industri dengan menggunakan mapping analysis menggunakan buffer dan deskripsi kuantitatif serta mengetahui karakteristik wilayah berdasakan data-data sekunder yang telah didapat. Tahap kedua membahas mengenai arahan kebijakan terkait permukiman kumuh Kelurahan Krian menggunakan analisa konten pada dokumen RP3KP Kabupaten Sidoarjo, RP2KPKP Kabupaten Sidoarjo, dan RPLP Kelurahan Krian. Kemudian, pada tahap ketiga dilakukan metode triangulasi dengan menarik kesimpulan dari hasil tahap 1 dan 2 dengan best practice dan literature yang telah didapat untuk mendapatkan strategi penanganan pemukiman kumuh di area pendukung industri di Kelurahan Krian.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan tiga area pendukung industri di Kelurahan Krian yaitu Kawasan Gersikan, Kawasan Krajan Pasar, dan Kawasan Krajan Stasiun. Kawasan Gersikan difokuskan pada penataan bangunan di sepadan sungai, penambahan transportasi umum, sarana jalan dan RTH, serta pembuatan IPAL. Kawasan Krajan Pasar difokuskan pada penambahan RTH, trasportasi umum, dan sarana jalan, peningkatan pada proteksi bencana pada kawasan pasar, serta dengan pembuatan IPAL baru , dan Kawasan Krajan Stasiun difokuskan paa penataan bangunan disepanjang rel kereta api, revitalisasi drainase, serta pembuatan IPAL baru.

Kata Kunci: Permukiman, Permukiman Kumuh, Pemukiman Pendukung Industri

STRATEGY FOR SLUM SETTLEMENT IN INDUSTRIAL SUPPORT AREA KRIAN SUBDISTRICT, SIDOARJO REGENCY

Name	**: Cinthya Diana Qonita**
NRP	**: 08211640000013**
Majoring	**: Urban and Regional Planning**
Advisor	**: Dian Rahmawati S.T., M.T.**

ABSTRACT

House is a basic need of every human being and develop along with increasing population. Problems surface as the physiological needs of house is no provided, hence people are forced to live in those areas that are less suitable and cause slums, as happened in Krian Subdistrict, Sidoarjo. Krian subdistrct is the first priority in slum settlement in Sidoarjo. Krian subdistrict is located close to the SIBORIAN Industrial Estate making settlements in Krian Subdistrict become supporters of the Industrial Estate based on RTRW Kabupaten Sidoarjo. With a location close to the industrial area, it attracts workers to live in Krian Subdistrict and need attention about existing settlements, so that it can be support industrial areas and not make a slum area. Therefore, the slum settlement needs attention to supports existing industrial areas. Then it is necessary to formulate a strategy for slum settlement in industrial support area Krian Subdistrict, Kabupaten Sidoarjo.

This research consists of 3 stages, the first stage is to delineate the supporting areas of the industry by using analysis mapping byuffers and quantitative descriptions and knowing the characteristics of the area based on secondary data that has been obtained. The second stage discusses policy directions related to

slum settlements in Krian Subdistrict using content analysis in the RP3KP Sidoarjo Regency, RP2KPKP Sidoarjo Regency, and RPLP Krian Subdistrict. Then, in the third stage, the triangulation method is carried out by drawing conclusions from the results of stages 1 and 2 with the best practices and literature that have been obtained to get a strategy for handling slum settlements in the industrial support area in Krian Subdistrict.

Based on the analysis that has been done, there are three industrial supporting areas in the Krian Subdistrict, namely the Gersikan Zone, Krajan Pasar Zone, dan Krajan Stasiun Zone. The Gersikan Zone is focused on structuring buildings along the river, adding public transportation, roads and green open space, and building IPALs. The Krajan Pasar Zone is focused on adding green open space, public transportation and road facilities, improving disaster protection in the market area, as well as by making new IPALs, and the Krajan Station Zone is focused on structuring buildings along the railroad tracks, revitalizing drainage, and making new IPALs.

Keywords: Industrial Supporting Area, Housing, Slums,.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh di Area Pendukung Industri Kelurahan Krian, Kabupaten Sidoarjo" Selama proses penulisan penelitian ini banyak mendapatkan bantuan dari pihak-pihak lain sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan optimal. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini yaitu :

1. Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ibu Dian Rahmawati, ST., MT., sebagai Dosen Pembimbing atas asistensi dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kedua orang tua penulis, Guguk Purwo Judianto dan Siti Halimah, adik-adik penulis yaitu Nuhan Muzakka dan Nailul Irsyadul Haq, Keluarga penulis yang telah mendukung baik secara moril maupun materiil demi kelancaran tugas akhir ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen PWK ITS yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan sehingga penulis bisa memperoleh ilmu.
5. BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kelurahan Krian, dan masyarakat Kelurahan Krian yang telah membantu dalam penelitian ini.
6. Seluruh teman-teman Corazon 2016 yang telah menemani dan memberikan kisah berharga di dunia perkuliahan
7. Teman-teman sepembimbimbingan yaitu Chalimatus, Olivia, Hendy, Ayyas dan Ahul sebagai teman seperjuangan

8. Sahabat-sahabat penulis di Sistar KW yaitu Yupi, Pinky, dan Lely sebagai sobat-sobat yang telah menemani.
9. Sahabat-sahabat penulis di SQUAD yang mau menjadi teman saya
10. Kedua teman penulis, Alya dan Rozzaq, yang telah menemani penulis ketika sedang mengalami kesulitan.
11. Mbak-mbak di Sistar, MAMAMOO, Little Mix, APINK, Red Velvet, da GFRIEND serta mas-mas di BTOB yang telah menemani penulis selama pengerjaan tugas akhir ini.
12. Seseorang yang telah memberi semangat penulis di awal pengerjaan namun tiba-tiba menghilang, saya doakan yang terbaik untuk-Nya
13. Pihak lain yang ikut mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini.
14. Penulis sendiri yang berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan kemampuan terbaiknya

Tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak tersebut, tugas akhir ini tidak akan diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada tugas akhir ini dan masih jauh dari kesempurnaan, yang dikarenakan penulis masih dalam tahap pembelajaran. Oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan laporan mendatang. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
LEMBAR PENGESAHAN.....v
ABSTRAK.....vii
ABSTRACT ix
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR TABEL..... xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Masalah.....6
1.3 Tujuan dan Sasaran.....7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....7
1.3.2 Sasaran penelitian.....7
1.4 Manfaat Penelitian.....7
1.4.1 Manfaat Teoritis 8
1.4.2 Manfaat Praktis.....8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 8
1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah.....9
1.5.3 Ruang Lingkup Substansi.....13
1.5.4 Ruang Lingkup Pembahasan 13
1.6 Sistematika Penulisan.....13

1.7 Kerangka Berpikir 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17
2.1 Perumahan dan Permukiman 17
2.1.1 Definisi Perumahan Permukiman 17
2.2 Permukiman Kumuh 18
2.2.1 Pengertian Pemukiman Kumuh 18
2.2.2 Karakteristik Permukiman Kumuh 18
2.2.3 Penanganan Pemukiman Kumuh 20
2.3 Permukiman Bagi Pekerja di Kawasan Industri ...26
2.4 Penelitian Terdahulu 28
2.4.1 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Kawasan Kaligawe, Semarang) (Rahmawati, 2012) 28
2.4.2 Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Ternate (Bachmid dan Ariyanto, 2017) 31
2.5 Sintesa Pustaka 40
BAB III METODE PENELITIAN.....43
3.1 Pendekatan Penelitian.....43
3.2 Jenis Penelitian 43
3.3 Variabel Penelitian 43
3.4 Populasi dan Sampel.....49
3.5 Metode Penelitian 50
3.5.1 Metode Pengumpulan Data.....50
3.5.2 Metode dan Teknik Analisa Data 54
3.6 Tahapan Penelitian 60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 65
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 65
4.1.1 Orientasi Wilayah Penelitian 65
4.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi 72
4.1.3 Kondisi Penggunaan lahan 74
4.1.4 Kondisi Kependudukan 76
4.1.5 Kondisi Fisik Bangunan 77
4.1.6 Kondisi Lingkungan Permukiman.....79
4.1.7 Kawasan Industri di Wilayah Penelitian.....83
4.2 Analisa dan Pembahasan 87
4.2.1 Analisa Kawasan Pendukung Industri dan Karakteristik Permukiman Kumuhnya 87
4.2.2 Analisa Kebijakan Tata Ruang dan Permukiman 127
4.2.3 Penentuan Strategi Penangan Pemukiman Kumuh di Area Pendukung Industri Kelurahan Krian 204
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....335
5.1 Kesimpulan.....335
5.2 Rekomendasi 336
DAFTAR PUSTAKA 337
LAMPIRAN 343
Lampiran 1 Desain Survey 343
Lampiran 2 Hasil Coding Dokumen Kebijakan 355

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian.....11
Gambar 3. 1 Bagan Skema Tahapan Penelitian 63
Gambar 4. 1 Wilayah Penelitian.....67
Gambar 4. 2 Penggunaan Lahan Kelurahan Krian 75
Gambar 4. 3 Jumlah Penduduk Tahun 2014, 2016, 2017, dan 2019 76
Gambar 4. 4 Kondisi Fisik Bangunan Permukiman 79
Gambar 4. 5 Kondisi beberapa drainase di Kelurahan Krian 80
Gambar 4. 6 Kondisi Sanitasi di Kelurahan Krian 81
Gambar 4. 7 Kondisi Persampahan di Kelurahan Krian.....82
Gambar 4. 8 Kondisi Air Bersih dan Air Minum di Kelurahan Krian.....83
Gambar 4. 9 Lokasi Kawasan *Industri* 85
Gambar 4. 10 Hasil Analisa Buffer Kawasan Pendukung Industri 89
Gambar 4. 11 Diagram Jenis Pekerjaan Kelurahan Krian.....92
Gambar 4. 12 Kondisi Fisik Bangunan Permukiman 93
Gambar 4. 13 Diagram Keteraturan Bangunan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian 95
Gambar 4. 14 Diagram Kepadatan Bangunan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian 97
.. Gambar 4. 15 Peta Jangkauan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Kelurahan Krian 99
Gambar 4. 16 Peta Jangkauan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Kelurahan Krian 101
Gambar 4. 17 Sarana Kesehatan Puskesmas Kelurahan Krian..103
Gambar 4. 18 Sarana Perdagangan Kelurahan Krian 104
Gambar 4. 19 Kondisi RTH Permukiman Kumuh Kelurahan Krian.....105

Gambar 4. 20 Diagram Kondisi Jalan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian 107
Gambar 4. 21 Kondisi Jalan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian 107
Gambar 4. 22 Kondisi beberapa drainase di Kelurahan Krian .. 108
Gambar 4. 23 Diagram Kondisi Drainase Permukiman Kumuh Kelurahan Krian 110
Gambar 4. 24 Kondisi Sanitasi di Kelurahan Krian 111
Gambar 4. 25 Diagram Kondisi Sanitasi Permukiman Kumuh Kelurahan Krian 112
Gambar 4. 26 Kondisi Persampahan di Kelurahan Krian 113
Gambar 4. 27 Kondisi Air Bersih dan Air Minum di Kelurahan Krian 116
Gambar 4. 28 Diagram Air Bersih dan Air Minum Permukiman Kumuh Kelurahan Krian 117

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Peningkatan Kualitas dengan Pemugaran 21
Tabel 2. 2 Peningkatan Kualitas dengan Peremajaan.....23
Tabel 2. 3 Peningkatan Kualitas dengan Pemukiman kembali....25
Tabel 2. 4 Sintesa Tinjauan Pustaka Pemukiman Kumuh.....34
Tabel 2. 5 Sintesa Tinjauan Pustaka Permukiman Pendukung Kawasan Industri 37
Tabel 2. 6 Sintesa Pustaka 41
Tabel 3. 1 Indikator, Variabel, Definisi Operasional.....44
Tabel 3. 2 Metode Perolehan Data 50
Tabel 3. 3 Metode pengumpulan data primer.....52
Tabel 3. 4 Pengumpulan Data Sekunder 53
Tabel 3. 5 Metode Analisa dalam Penelitian.....55
Tabel 3. 6 Kode Variabel.....59
Tabel 4. 1 Tabel Identifikasi Kekumuhan Kelurahan Krian.....69
Tabel 4. 2 Perubahan Jumlah Penduduk Tahun 2018 77
Tabel 4. 3 Pendidikan Kepala Rumah Tangga 72
Tabel 4. 4 Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga.....73
Tabel 4. 5 Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga 73
Tabel 4. 6 Pendapatan Kepala Rumah Tangga.....74
Tabel 4. 7 Tingkat Kepadatan Bangunan 78
Tabel 4. 8 Transportasi Umum Kelurahan Krian 91
Tabel 4. 9 Tabel Jenis Pekerjaan Kelurahan Krian 92
Tabel 4. 10 Keteraturan Bangunan Pemukiman Kumuh Kelurahan Krian.....94
Tabel 4. 11 Tingkat Kepadatan Bangunan 96
Tabel 4. 12 Sarana Pendidikan di Kelurahan Krian 98
Tabel 4. 13 Sarana Kesehatan di Kelurahan Krian.....103
Tabel 4. 14 Kondisi Jalan Permukiman Kumuh elurahan Krian 106

Tabel 4. 15 Kondisi Drainase Permukiman Kumuh Kelurahan Krian 109
Tabel 4. 16 Kondisi Sanitasi Permukiman Kumuh Kelurahan Krian 111
Tabel 4. 17 Kondisi Persampahan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian 114
Tabel 4. 18 Kondisi Air Bersih dan Air Minum Permukiman Kumuh Kelurahan Krian 116
Tabel 4. 19 Kondisi Persampahan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian 118
Tabel 4. 20 Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian 121
Tabel 4. 21 Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan RP3KP Kabupaten Sidoarjo 129
Tabel 4. 22 Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan RP2KPKP Kabupaten Sidoarjo 153
Tabel 4. 23 Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan RPLP Kelurahan Krian 163
Tabel 4. 24 Hasil *Content Analysis* berdasarkan Dokumen Kebijakan Terpilih 192
Tabel 4. 25 Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh Area Pendukung Industri Kawasan Gersikan 205
Tabel 4. 26 Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh Area Pendukung Industri Kawasan Krajan Pasar 248
Tabel 4. 27 Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh Area Pendukung Industri Kawasan Krajan Stasiun 293

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Permukiman sendiri dalam UU No.1 tahun 2011 memiliki artian yaitu suatu bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan menurut Sumaatmadja (1988) permukiman adalah bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupannya yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Dari kedua pengertian tersebut dapat simpulkan bahwa permukiman merupakan suatu lingkungan yang dihuni manusia yang dilengkapi oleh prasarana, sarana, utilitas umum dan dapat menunjang fungsi lain baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan tersebut didasari akan keinginan manusia untuk tempat berlindung dan merasa aman. Kebutuhan tempat tinggal pun berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman. Namun adanya peningkatan jumlah penduduk di Indonesia juga mengakibatkan makin padatnya bangunan yang digunakan untuk menyediakan kebutuhan akan tempat tinggal tersebut. Dengan makin padatnya bangunan tersebut, dapat

menimbulkan banyaknya pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu Pemerintah Negara Indonesia membuat program yang bertujuan untuk mengurangi permukiman kumuh yang ada di suatu kota, program tersebut adalah program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh yang ada di Indonesia serta mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu Gerakan 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% persen akses sanitasi layak (Kotaku.pu.go.id). Tujuan dari program KOTAKU berdasarkan laman Kotaku.pu.go.id yaitu meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Program KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Salah satu Kabupaten yang melaksanakan Program KOTAKU adalah Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyukseskan program KOTAKU untuk mengentaskan pemukiman kumuh, telah mengeluarkan SK Bupati Kabupaten Sidoarjo nomor 188/452/4041.3.2/205 tanggal 27 April 2015 tentang lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Sidoarjo. Lokasi yang terdapat permukiman kumuh salah satunya adalah Kelurahan Krian.

Kelurahan Krian merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Kecamatan Krian dalam Angka 2019, Kelurahan Krian pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk sebesar 10721 orang dan merupakan jumlah penduduk paling besar di Kecamatan Krian pada tahun 2018 dan memiliki luas wilayah sebesar 104,21 Ha. Kecamatan Krian termasuk didalamnya Kelurahan Krian berdasarkan RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 termasuk dalam SSWP IV. Fungsi utama SSWP IV adalah konservasi pertanian teknis, peternakan, zona industri ditunjang dengan kegiatan permukiman kepadatan rendah dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krian. Kecamatan Krian terdapat kawasan industri yang ada di sepanjang By Pass Krian dan termasuk dalam SIBORIAN (Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan JaBOn, dan By Pass KRIAN), dimana ketiganya merupakan kawasan industri dan perdagangan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Kelurahan Krian berdasarkan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam cluster Krian yang merupakan prioritas pertama dalam penanganan pemukiman kumuh di Kabupaten Sidoarjo serta menjadi prioritas pertama yang menerima penanganan pemukiman kumuh di cluster Krian. Luasan pemukiman kumuh di Kelurahan Krian berdasarkan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 18,15 Ha yang meliputi Kawasan Gersikan di RW 2 (RT 5,6,7,8,9), Kawasan Krajan Pasar di RW 4 (RT 16,17,18,19), RW 5 (RT 21,22,23,24,25), RW 6 (RT 26,27,28,29), dan .Kawasan Krajan Stasiun meliputi RW 9 (RT 38, 39).

Dalam Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Krian tahun 2018, Kelurahan Krian termasuk kedalam kategori kumuh sedang dengan nilai skoring sebesar 45 pada tahun 2015. Nilai tersebut muncul akibat kondisi yang ada di Kelurahan Krian yaitu kondisi bangunan rumah yang ada masih belum teratur sebanyak 25%, aspek pelayanan air minum sebanyak 37% rumah belum terlayani sarana air minum, jumlah genangan sebanyak 45%, dan belum terpisahnya antara saluran pembuangan limbah rumah tangga dan drainase. Di Kelurahan Krian belum terdapat adanya pengangkutan sampah sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan, Selain itu, tidak adanya ketersediaan pelayanan proteksi kebakaran di Kelurahan Krian mengakibatkan rumah-rumah yang ada menjadi rawan kebakaran. Di bidang infratruktur yang mendukung Kelurahan Krian, terdapat 48% jalan tidak sesuai persyaratan teknis serta 29% tidak terjangkau jaringan jalan lingkungan yang layak, dan 12% tidak memiliki akses ke jamban. Sedangkan pada tahun 2017 tingkat kekumuhan menurun menjadi kumuh ringan dengan nilai skoring sebesar 43%, peningkatan terjadi pada aspek jalan lingkungan dan pengelolaan air limbah, namun pada aspek lainnya belum terdapat peningkatan.

Industri merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian bagi Kabupaten Sidoarjo. Berdasar data PDRB Kabupaten Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo dalam Angka tahun 2019, terlihat bahwa sektor industri memberikan kontribusi sebesar 46,62% berdasarkan harga berlaku dan 49,76% berdasarkan harga konstan dari total nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo. Sehingga sektor industri merupakan salah satu sektor utama di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya sektor industri tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja untuk bekerja di dalamnya. Besarnya jumlah tenaga kerja yang terserap membawa dampak pada peningkatan

kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal (Muna, 2006). Adanya kebutuhan terhadap rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu tujuan untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi lagi setelah manusia mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan kesehatan (Sastra dan Marlina dalam Muna, 2006).

Letak Kelurahan Krian yang berada di Kawasan Industri menjadikan permukiman di Kelurahan Krian menjadi pendukung dari Kawasan Industri tersebut, hal ini sesuai dengan arahan dari RTRW Sidoarjo tahun 2009-2029 untuk SSWP IV termasuk di dalamnya Kelurahan Krian. Penduduk Kelurahan Krian yang bekerja sebagai pegawai di perusahaan swasta sebesar 3555 orang dari 8616 orang penduduk yang bekerja di Kelurahan Krian. Hal ini menandakan bahwa 41% penduduk yang bekerja di Kelurahan Krian merupakan pegawai karyawan swasta. Sehingga perlu adanya perhatian mengenai permukiman yang dapat mendukung kawasan industri yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, dalam membangun kawasan industri perlu memperhatikan jarak dengan permukiman yaitu minimal 2 km dari kawasan industri agar memudahkan para pekerja untuk mencapai tempat kerja di kawasan industri serta mengurangi kepadatan lalu lintas dan mengurangi dampak polutan dan limbah. Selain itu dalam membangun kawasan industri, pihak pembangun dan pengembang perlu mengalokasikan peruntukan lahan untuk perumahan pekerja dan dilengkapi oleh fasilitas penunjang. Sehingga jika kebutuhan perumahan pekerja bagi kawasan industri tidak terpenuhi, dapat menyebabkan munculnya pemukiman kumuh.

Sehingga untuk mewujudkan program Kota Tanpa Kumuh maka perlu adanya penangan mengenai permukiman kumuh yang

ada di area pendukung kawasan industri di Kelurahan Krian. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat ,menangani pemukiman kumuh yang ada di area pendukung kawasan industri Kelurahan Krian dan membantu pemerintah daerah setempat dalam penanganan pemukiman kumuh agar masyarakat dapat memperoleh hak untuk memperoleh permukiman yang layak dapat terpenuhi.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah yang termasuk Surabaya Metropolitan Area, hal ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk pengembangan permukiman dan fasilitas penduduknya dikarenakan adanya urbanisasi dari area tersebut. Kelurahan Krian yang menjadi salah satu sasaran wilayah untuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) termasuk dalam kategori kumuh sedang dan merupakan wilayah yang berada dekat dengan kawasan industri By Pass Krian yang termasuk dalam Kawasan Strategis SIBORIAN menjadikan Kelurahan Krian sebagai permukiman pendukung industri, hal ini didukung dengan adanya 41% penduduk yang bekerja di Kelurahan Krian merupakan pegawai karyawan swasta. Keberadaan Kelurahan Krian yang berdekatan dengan kawasan industri ini tidak dibarengi dengan kondisi yang sesuai, seperti belum adanya IPAL di Kelurahan Krian dan kurangnya ruang terbuka hijau untuk menyerap polusi dari industri. Permasalahan yang ada di Kelurahan Krian adalah mengenai kondisi bangunan rumah, aspek pelayanan air minum, masalah drainase, sanitasi, persampahan serta proteksi kebakaran. Di bidang infrastruktur, terdapat jalan yang tidak sesuai persyaratan teknis serta jangkauan jaringan jalan lingkungan yang layak, dan masalah keterbatasan akses ke jamban. Maka dari permasalahan tersebut perlu dirumuskan strategi

penanganan kumuh di Kelurahan Krian sehingga permasalahan permukiman kumuh di area pendukung industri tersebut dapat teratasi. Berdasarkan kondisi tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah "Apa penanganan yang sesuai dengan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ?"

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah menentukan strategi penangan permukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

1.3.2 Sasaran penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka perlu adanya tahapan dalam mencapainya yaitu :

1. Mengidentifikasi delineasi area pendukung industri dan mengetahui karakteristik kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
2. Menganalisis kebijakan mengenai tata ruang dan pemukiman di Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
3. Menentukan strategi penangan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan dapat dilihat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang berupa rekomendasi, atau panduan ke pemerintah daerah setempat.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini jika dilihat secara teoritis yaitu adanya penambahan wawasan tentang konsep penanganan kumuh.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, antara lain :

1. Memberikan rekomendasi bagi *stakeholder* terkait penanganan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi penanganan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini akan membahas 3 ruang lingkup penelitian yaitu ruang lingkup wilayah yang merupakan batas administrasi lokasi studi, ruang lingkup pembahasan yang meliputi aspek apa saja yang akan dibahas dan diselesaikan dalam penelitian ini, dan yang terakhir adalah ruang lingkup substansi yang berisi mengenai ilmu apa saja yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Batas-batas administrasi wilayah Kelurahan Krian adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Kraton
Sebelah Timur	: Kelurahan Tambak Kemerakan
Sebelah Selatan	:Desa Katerungan dan Desa Jerukgamping
Sebelah Barat	: Kelurahan Kemangsen

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

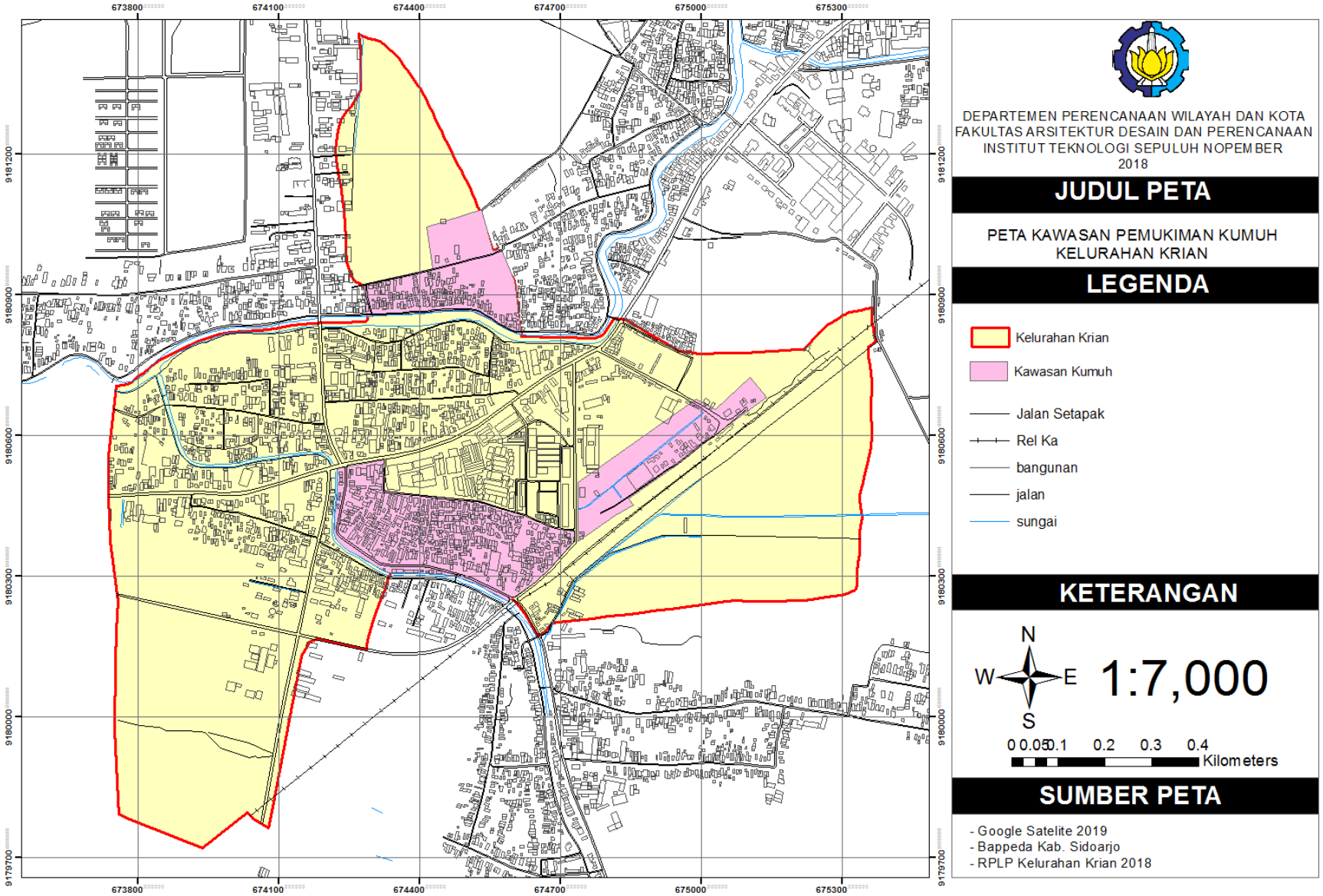

Gambar 1. 1 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

1.5.3 Ruang Lingkup Substansi

Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup substansi meliputi batasan materi yang dibahas dalam penelitian terkait dengan permukiman kumuh dalam penelitian ini, lingkup substansi pembahasan materi berupa penanganan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, Kabupaten Sidoarjo

1.5.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai identifikasi karakteristik pemukiman kumuh serta delineasi area pendukung industri di kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Krian, analisis kebijakan mengenai tata ruang dan pemukiman di Kelurahan Krian, serta penentuan strategi penangan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup wilayah, substansi, dan pembahasan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi hasil studi literatur mengenai teori pendukung dan penguat yang akan menjadi variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi tentang gambaran umum wilayah penelitian dan pembahasan hasil analisis yang diperoleh berdasarkan metode pendekatan yang digunakan.

BAB V PENUTUP, berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan alur penelitian serta ditambahkan saran dan rekomendasi dari hasil penelitian yang sudah didapatkan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

1.7 Kerangka Berpikir

Latar Belakang dan Rumusan Masalah

- Kelurahan Krian termasuk permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sidoarjo nomor 188/452/4041.3.2/205 dan merupakan prioritas 1
- Kelurahan Krian berkategori kumuh sedang dengan nilai skoring 45 berdasarkan Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Krian tahun 2018
- Infrastruktur yang ada kurang memadai
- Kelurahan Krian yang berada di Kawasan Industri

Apa penanganan yang sesuai dengan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ?

Sasaran

Identifikasi delineasi area pendukung industri Kelurahan Krian dan mengetahui karakteristik pemukiman kumuhnya

Analisis kebijakan mengenai tata ruang dan pemukiman di Kelurahan Krian

Rumusan strategi penangan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian

Output

Strategi penangan permukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perumahan dan Permukiman

2.1.1 Definisi Perumahan Permukiman

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (Undang-undang no 1 tahun 2011).

Menurut Budiharjo (1998) perumahan adalah suatu bangunan dimana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupanya, dan merupakan tempat dimana berlangsungnya untuk proses sosialisasi pada seorang individu dengan norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Serta sebagai wadah kehidupan manusia yang menyangkut aspek teknis, fisik, sosial, ekonomi dan budaya dari penghuninya. Sedangkan menurut Sadana (2014) perumahan adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Perbedaan nyata antara permukiman dan perumahan terletak pada fungsinya. Pada kawasan permukiman, lingkungan tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah bagi sebagian penghuniannya. Pada perumahan, lingkungan tersebut hanya berupa sekumpulan rumah yang berfungsi

sebagai tempat tinggal bagi para penghuninya. Fungsi perumahan hanya sebagai tempat tinggal, dan tidak merangkap sebagai tempat mencari nafkah (Sadana, 2014).

2.2 Permukiman Kumuh

2.2.1 Pengertian Pemukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat (UU No. 1 Tahun 2011). Sedangkan berdasarkan Rindarjono (2012), permukiman kumuh adalah permukiman dengan rumah, kondisi hunian dan sarana prasarana yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Standar tersebut standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyarakan rumah sehat, kebutuhan air bersih, sanitas, prasarana jalan, ruang terbuka, dan fasilitas social.

2.2.2 Karakteristik Permukiman Kumuh

Karakterisik permukiman kumuh merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu permukiman untuk bisa dianggap sebagai permukiman kumuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, permukiman kumuh dapat ditinjau dari aspek berikut :

a) Bangunan Gedung mencakup ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan/atau kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

b) Jalan lingkungan mencakup jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan/atau kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
c) Penyediaan air minum mencakup ketidaktersediaan akses aman air minum dan/atau tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
d) Drainase lingkungan meliputi drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, ketidaktersediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya dan/atau kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
e) Pengelolaan air limbah meliputi sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
f) Pengelolaan sampah meliputi sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan/atau prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
g) Proteksi kebakaran meliputi prasarana proteksi kebakaran dan sarana proteksi kebakaran.

Karakteristik pemukiman kumuh yang dirangkum Prasetya dalam Musanna (2016) bahwa menurut Prof Dr. Supardi Suparlan karakteristik permukiman kumuh adalah permukiman yang memiliki fasilitas umum dan kondisinya kurang atau tidak memadai, kondisi rumah dan permukiman menunjukan kondisi penghuninya yang kurang mampu atau

miskin, adanya tingkat frekuensi dan kepadatan yang tinggi dalam penggunaan ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan dalam tata ruang dan ketidak berdayaan ekonomi penghuninya. Berdasarkan Prof Dr. Supardi, permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan social yang jelas, yaitu terwujud sebagai sebuah komunitas tunggal yang tinggal di tanah milik negara dan arena tersebut digolongkan sebagai hunian liar atau satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuat RT atau sebuah RW, atau sebuah komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan dan bukan merupakan hunian liar. Penghuni yang bermukim permukiman kumuh secara spasial dan ekonomi tidak homogen, dimana mata pencaharian, asal muasal dan tingkat kepadatan yang beraneka ragam. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanaya lapisan social berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda, Serta sebagian besar penduduk yang menghuni permukiman kumuh bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

Berdasarkan uraian mengenai karakteristik pemukiman kumuh maka dapat dijadikan suatu indikator. Indikator tersebut adalah **fisik** serta **sarana dan prasarana**.

2.2.3 Penanganan Pemukiman Kumuh

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pola penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas.

Penangan permukiman kumuh dengan cara pencegahan dapat dilakukan dengan 2 pola penanganan yaitu pengawasan dan pengendalian mengenai kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksanaan. Pola selanjutnya adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya melalui pendampingan dan pelayanan informasi (UU No. 1 Tahun 2011).

Penangan pemukiman melalui peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan 3 pola penangan yaitu pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali.. Untuk pola penangan peremajaan dapat dilakukan dengan mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamtan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Sedangkan pola penangan pemukiman kembali dilakukan dengan pemindahalan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (UU No. 1 Tahun 2011).

Untuk meningaktkan kualitas permukiman dengan pola penangan pemugaran dilakukan dengan melalui perbaikan dan pembangunan kembali menjadi pemukiman layak huni. Berdasarkan dokumen Penangan Kawasan permukiman Kumuh tahun 2015, kegiatan yang dapat dilakukan dalam pola peremajaan dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

Tabel 2. 1 Peningkatan Kualitas dengan Pemugaran

No.	Komponen	Jenis Kegiatan
1	Bangunan Gedung	a. Rehabilitasi b. Rekonstruksi

No.	Komponen	Jenis Kegiatan
2	Jalan Lingkungan	Perbaikan aspal/ paving/cor pada jalan lingkungan.
3	Drainase Lingkungan	a. Pengerukan sedimentasi jaringan drainase; b. Perbaikan drainase yang tersumbat; c. Perbaikan drainase yang rusak karena ambrol, atau kerusakan akibat bencana.
4	Air Minum	a. Perbaikan Sarana/ instalasi non perpipaan air bersih (dari kebocoran, korosi, jaringan instalasi terkontaminasi bakteri berbahaya, kerusakan akibat bencana) b. Perbaikan jaringan air minum atau air bersih perpipaan yang mengalami kerusakan (kebocoran, korosi, akibat bencana)
5	Air Limbah	a. Perbaikan instalasi air limbah setempat yang mengalami sedimentasi, mampat, atau kerusakan akibat bencana. b. Perbaikan instalasi air limbah terpusat yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana.
6	Sampah	a. Perbaikan sarana persampahan komunal (TPS) yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah basah.

No.	Komponen	Jenis Kegiatan
		b. Perbaikan sarana persampahan yang mengalami pencampuran jenis sampah
7	Pengamanan Kebakaran	a. Perbaikan alat pemadam api sederhana yang mengalami kerusakan karena korosi atau rusak karena bencana; b. Perbaikan hydran air yang mengalami kerusakan akibat korosi atau bencana.

Sumber : Penangan Kawasan permukiman Kumuh tahun, 2015

Untuk meningkatkan kualitas permukiman dengan pola penangan pemukiman kembali dilakukan dengan melalui emindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (UU No. 1 tahun 2011). Berdasarkan dokumen Penangan Kawasan permukiman Kumuh tahun 2015, kegiatan yang dapat dilakukan dalam pola pemukiman kembali dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

Tabel 2. 2 Peningkatan Kualitas dengan Peremajaan

No.	Komponen	Jenis Kegiatan
1	Bangunan Gedung	a. Rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung.

No.	Komponen	Jenis Kegiatan
		b. Rekonstruksidengan membongkar dan membangun kembali bangunan atau sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan penambahan komponen atau fungsi. c. Penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan d. Penambahan dan Penyediaan sarana permukiman (RTH, MCK umum) e. Penyediaan hunian sementara untuk masyarakat terdampak
2	Jalan Lingkungan	a. Rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material, penambahan bangunan pelengkap jalan. b. Peningkatan struktur jalan
3	Drainase Lingkungan	a. Peningkatan kualitas unit sistem drainase b. Penyedian sistem drainase c. Penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan sistem drainase kota.
4	Air Minum	Rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan, penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasi pengelolaan air minum

No.	Komponen	Jenis Kegiatan
5	Air Limbah	a. Penyediaan sistem sanitasi setempat atau terpusat; b. Perbaikan komponen sanitasi pengelolaan air limbah.
6	Sampah	a. Pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP) b. Rehabilitasi PSP dengan perbaikan dan penambahan komponen bangunan PSP.
7	Pengamanan Kebakaran	a. Pembangunan sarana proteksi kebakaran b. Peningkatan kualitas sarana sistem proteksi kebakaran

Sumber : Penangan Kawasan permukiman Kumuh tahun, 2015

Untuk meningkatkan kualitas permukiman dengan pola penangan peremajaan dilakukan dengan melalui perwujudan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat (Undang-Undang No. 1 tahun 2011). Berdasarkan dokumen Penangan Kawasan permukiman Kumuh tahun 2015, kegiatan yang dapat dilakukan dalam pola pemukiman kembali dapat dilihat pada **Tabel 2.3**

Tabel 2. 3 Peningkatan Kualitas dengan Pemukiman kembali

No.	Komponen	Jenis Kegiatan
1	Bangunan Gedung	a. Pembangunan permukiman di lokasi baru b. Pembangunan kembali di permukiman lama dengan model

No.	Komponen	Jenis Kegiatan
		baru (Rumah Susun)
2	Jalan Lingkungan	Pembangunan jalan baru
3	Drainase Lingkungan	Pembangunan unit sistem drainase baru
4	Air Minum	Pembangunan SPAM unit baru
5	Air Limbah	Pembangunan unit pengolahan air limbah baru
6	Sampah	Pembangunan PSP baru
7	Pengamanan Kebakaran	a. Pembangunan pengaman

Sumber : Penangan Kawasan permukiman Kumuh tahun, 2015

2.3 Permukiman Bagi Pekerja di Kawasan Industri

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan dalam suatu kawasan industri yang diperuntukan bagi pekerjanya untuk memperoleh tempat tinggal. Coulson dan Fisher dalam Irfiyanti dan Manaf (2014) menjelaskan bahwa penyediaan tempat tinggal bagi pekerja industri bertujuan untuk menekan biaya transportasi yang ditanggung oleh pekerja. Jika letak dari kawasan industri dan tempat tinggal dari pekerja saling berdekatan maka dapat tercipta suatu kondisi *walk-to-work* bagi para pekerja (Irfiyanti dan Manaf, 2014).

Untuk mengatur permukiman di kawasan industri, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri telah mengatur bahwa dalam memilih lokasi industri perlu memperhatikan kriteria mengenai jarak terhadap pemukiman. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan

bagi para pekerja untuk mencapai tempat kerja di Kawasan Industri, mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar Kawasan industri, dan mengurangi dampak polutan dan limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, jarak ideal lokasi kawasan industri terhadap permukiman adalam minimal dua kilometer. Dalam penyediaan kaveling perumahan dalam alokasi peruntukan lahan kawasan industri terdapat ketentuan yang perlu dipenuhi berdasarkan luas kawasan industri, yaitu :

a) Luas Kawasan Industri >20-50 Ha maka penyediaan kaveling perumahan maksimal 10% dari luas lahan
b) Luas Kawasan Industri >50-100 Ha maka penyediaan kaveling perumahan maksimal 15% dari luas lahan
c) Luas Kawasan Industri >100-200 Ha maka penyediaan kaveling perumahan maksimal 20% dari luas lahan
d) Luas Kawasan Industri >200-500 Ha maka penyediaan kaveling perumahan adalah 10-25% dari luas lahan.
e) Luas Kawasan Industri >500 Ha maka penyediaan kaveling perumahan adalah 10-30% dari luas lahan

Karakteristik permukiman bagi pekerja berdasarkan Irfiyanti dan Manaf (2014) untuk mengukur kepuasan hunian bagi pekerja industri yaitu kejelasan mengenai status kepemilikan rumah, luas hunian, jumlah kamar tidur yang dimiliki pekerja serta lama tinggal di lokasi hunian tersebut. Selain itu, kondisi fisik bangunan, tingkat ketenangan, keasrihan, kebersihan, dan keamanan, tingkat aksebilitas dan ketersediaan fasilitas umum juga mempengaruhi kepuasan hunian bagi pekerja industri.

Muna (2009) menjelaskan bahwa penentuan prioritas tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk buruh industri,cenderung didasarkan pada prioritas

utama yaitu lokasi tempat tinggal yang berdekatan dengan lokasi kerja. Selain itu, Budiharjo dalam Muna (2009) menjelaskan bahwa jarak yang jauh dengan tempat kerja dan fasilitas sosial berarti akan menambah persentase pengeluaran ongkos transportasi dibandingkan seluruh pengeluaran rutin keluarga. Sastra dan Marlina dalam Muna (2009) menyatakan bahwa lokasi perumahan sebaiknya dipilih di daerah yang memberikan akses yang mudah bagi orang yang bermukim (maksimal 30 menit dengan menggunakan alat transportasi umum) untuk menuju tempat kerja. Sedangkan preferensi pekerja industri mengenai tempat tinggal menurut Muna (2009) adalah berdasarkan jarak dari tempat tinggal ke lokasi kerja, status kepemilikan bangunan yang dihuni berupa sewa atau sudah hak milik, bentuk bangunan berupa tunggal atau bersama, ketinggian bangunan serta luasan bangunan, dan lamanya tinggal bagi pekerja.

Berdasarkan uraian mengenai uraian tersebut, maka dapat dijadikan suatu indikator untuk area pendukung industri adalah. Indikator tersebut adalah A**ksesbilitas, fisik, kependudukan, ekonomi, sarana dan prasarana.**

2.4 Penelitian Terdahulu

2.4.1 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Kawasan Kaligawe, Semarang) (Rahmawati, 2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi penanganan pemukiman kumuh di Kawasan Kaligawe, Semarang. Kawasan Kaligawe merupakan kawasan pertumbuhan industri. Proses terbentuknya permukiman kumuh, terjadi karena para pekerja memilih tinggal di dekat tempat kerja (Rahmawati, 2012). Dalam perumusan strategi

penanganan didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kota Semarang dan dari hasil analisa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menangani pemukiman kumuh. Sehingga dapat ditentukan yang menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman untuk organisasi (Rahmawati, 2012). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Semarang adalah sebagai berikut (Rahmawati, 2012):

a) Lingkungan internal

- Kekuatan/*strengths*

Kesesuaian visi dan misi dengan kondisi Pelaksanaan misi guna pencapaian visi Komitmen Bappeda serta Dinas Tata Kota dan Permukiman memberikan pelayanan maksimal Kuantitas dan Kualitas SDM memadai Fungsi Dinas sebagai penyedia aksesbilitas sebagai upaya menggali kekurangan dana dalam pelaksanaan program

- Kelemahan/weaknesses:

Minimnya anggaran dinas Sarana prasarana dinas yang kurang memadai Kurang aktifnya Dinas dalam memberikan penyuluhan dan pendekatan pada masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh Dinas Tata Kota dan Permukiman kurang melakukan pengawasan Adanya data yang dinamis untuk penetapan sasaran program penanganan permukiman kumuh

b) Lingkungan eksternal

- Peluang/opportunities:

- Adanya dana stimulan dari Menpera untuk bedah kampung Adanya pelatihan-pelatihan dari Menpera untuk pengembangan SDM dinas

- Adanya UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Pertumbuhan perekonomian Kota Semarang yang baik
- Letak geografis Kota Semarang yang strategis
- Adanya kerja sama dengan swasta, LSM, dan investor dalam penyediaan dana perumahan dan permukiman.
- Kuatnya karakteristik masyarakat dalam nilai sosial budaya

- Ancaman/threats:

Adanya tuntutan target pencapaian Millenium Development Goal's (MDGs). Banyaknya sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang rusak Krisis kepercayaan masyarakat terhadap bantuan stimulan yang disalurkan dari dinas. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam revitalisasi kawasan permukiman kumuh. Pola pikir masyarakat yang cenderung lebih memilih bantuan berupa uang daripada material.

Dari hasil tersebut, terbentuk strategi penanganan yang terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan prioritas strateginya dari hasil uji limus yaitu strategi yang bersifat moderat dan strategi yang bersifat strategis. Berikut hasil uji litmus tentang strategi penanganan permukiman kumuh di Kota Semarang (Rahmawati, 2012):

a. Strategi bersifat moderat:

- Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman untuk memenuhi akses masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana permukiman yang memadai .
- Peningkatan sarana prasarana dinas sebagai pendukung upaya penanganan kawasan permukiman kumuh.

b. Strategi bersifat strategis:

- Pengoptimaan SDM dalam penanganan permukiman kumuh
- Peningkatan dalam pembangunan permukiman sesuai situasi lokal/ daerah untuk mendukung pelaksanaan Undang – Undang tentang perumahan dan kawasan permukiman
- Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan
- Pengoptimalan pengawasan dan evaluasi hasil program kegiatan penanganan permukiman kumuh dengan melibatkan masyarakat
- Penguatan kelembagaan pembiayaan perumahan dan permukiman
- Pengoptimalan dalam penyusunan database sasaran program penanganan permukiman kumuh secara integratif
- Peningkatan sosialisasi mengenai program penanganan kawasan permukiman kumuh, pentingnya partisipasi dan usaha mandiri/swadaya masyarakat

2.4.2 Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Ternate (Bachmid dan Ariyanto, 2017)

Kawasan kumuh perkotaan Kota Ternate yang telah ditetapkan melalui kebijakan Walikota Ternate berlokasi di 3 (tiga) wilayah kecamatan antara lain; Kecamatan Ternate Utara (Kelurahan Soasio, Salero, Toboleu, Sangaji dan Dufa-Dufa), Kecamatan Ternate Tengah (Kelurahan Gamalama dan Makassar Timur), Kecamatan Ternate Selatan (Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga

Dua dan Mangga Dua Utara). Secara administratif kajian terdiri atas 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Ternate Utara (Kelurahan Sangaji, Toboleu, Salero, dan Soasio) dan Kecamatan Ternate Tengah (Kelurahan Makassar Timur dan Gamalama), dengan luas kawasan 27,94 Ha. Karakteristik kawasan permukiman kumuh tersebut adalah sebagai berikut :

- Merupakan satu kesatuan kawasan kumuh yang terletak di daerah pasang surut,
- Terletak pada pusat kota, dan
- Akses jalan kawasan terhubung dengan pusat kota

Faktor penyebab utama munculnya kawasan permukiman kumuh di perkotaan, sebagai berikut (Bachmid dan Ariyanto, 2017):

a. Faktor Langsung

Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik berupa kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan. Faktor lingkungan perumahan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), sedangkan faktor sanitasi lingkungan meliputi kondisi air bersih/minum, MCK, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase dan jalan.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial dan budaya masyarakat, kelembagaan dan kebijakan pemerintah.. Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi munculnya kawasan kumuh yaitu faktor budaya yang berhubungan dengan masalah kebiasaan dan adat istiadat.

Dari hasil analisa yang dilakukan, maka strategi penangan pemukiman kumuh yang diusulkan, sebagai berikut (Bachmid dan Ariyanto, 2017):

1. Menata kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagai potensi kawasan.
2. Pengendalian kawasan permukiman kumuh di kawasan pesisir yang terintigrasi dengan pengelolaan lingkungan pesisir dan didukung dengan ketersediaan RTH sebagai suatu kesatuan sistem pembangunan ruang perkotaan Kota Ternate.
3. Mengoptimalisasi potensi sumber daya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan komunitas lokal melalui bantuan modal usaha serta pelatihan bimbingan usaha ekonomi produksi bagi masyarakat miskin melaui pola kemitraan secara berkelanjutan.
4. Pelibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman perkotaan.
5. Implementasi aturan dalam mendirikan bangunan agar dalam perkembangan kawasan permukiman tidak berkembang di daerah pasang surut serta penyiapan lahan untuk pembangunan permukiman perkotaan.
6. Pengembangan kapasitas adaptasi masyarakat miskin dan marginal terhadap perubahan fungsi-fungsi ruang perkotaan melalui upaya pendayagunaan potensi angkatan kerja produktif dan pengembangan wirausaha masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
7. Penyediaan usaha-usaha ekonomi baru sektor formal yang mendukung ketersediaan tenaga kerja yang ada di kawasan permukiman kumuh.

8. Penguatan kapasitas individu dan kelompok-kelompok masyarakat lokal dan miskin perkotaan, melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan.
9. Pengambilan keputusan strategis, mengacu pada prinsif pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkeadilan.
10. Membangun dan mengembangkan kawasan melalui prinsif kesetaraan dan berkeadilan melalui pola distribusi aktivitas sosial-ekonomi dan infrastruktur dasar dalam kerangka mengurangi disparitas pelayanan antarkawasan perkotaan.

Tabel 2. 4 Sintesa Tinjauan Pustaka Pemukiman Kumuh

Tinjauan Teori	Sumber Teori	Pokok Bahasan	Indikator	Variabel
Karakteristik Permukiman Kumuh	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016	• Bangunan Gedung mencakup ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan. • Jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sarana dan Prasarana	Jalan
				Air Minum
				Drainase
				Sanitasi
				Persampahan
				Proteksi bencana
			Fisik	Keteraturan bangunan
				Kepadatan bangunan

Tinjauan Teori	Sumber Teori	Pokok Bahasan	Indikator	Variabel
	tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	dan/atau kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum • Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan • Pengelolaan air limbah pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau tidak memenuhi persyaratan teknis. • Pengelolaan sampah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan/atau tidak memenuhi persyaratan teknis. • Proteksi kebakaran		Kualitas Bangunan

Tinjauan Teori	Sumber Teori	Pokok Bahasan	Indikator	Variabel
	Prof Dr. Supardi Suparlan (Prasetya (2013) dalam Musanna (2016))	• Fasilitas umum dan kondisinya kurang atau tidak memadai, • Kepadatan yang tinggi dalam penggunaan ruang yang ada di permukiman kumuh • Satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan social yang jelas • Penghuni yang bermukim permukiman kumuh secara spasial dan ekonomi tidak homogen, dimana mata pencaharian, asal muasal dan	Aksesbilitas	Radius jangkauan sarana dan prasarana
			Ekonomi	Tingkat pendapatan masyarakat
				Mata penacaharian
			Fisik	Keteraturan bangunan
				Kepadatan bangunan

Tinjauan Teori	Sumber Teori	Pokok Bahasan	Indikator	Variabel
		tingkat kepadatan yang beraneka ragam. • Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanaya lapisan social berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda, • Penduduk yang menghuni permukiman kumuh bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal	Non Fisik	Legalitas lahan

Sumber : Sintesa Penulis, 2020

Pada sintesa tinjauan pustaka kawasan pemukima kumuh, variabel yang akan diambil adalah variabel kondisi bangunan, kepadatan bangunan, kondisi jalan, kondisi drainase, air bersih dan air minum, sanitasi, persampahan, proteksi bencana untuk digunakan untuk mengetahui karakteristik permukiman kumuh

Tabel 2. 5 Sintesa Tinjauan Pustaka Permukiman Pendukung Kawasan Industri

Tinjauan Teori	Sumber Teori	Pokok Bahasan	Indikator	Variabel
Permukiman Bagi Pekerja di Kawasan Industri	Fisher dalam Irfiyanti dan Manaf (2014)	Penyediaan tempat tinggal bagi pekerja industri bertujuan untuk menekan biaya transportasi yang ditanggung oleh pekerja	Aksesbilitas	Kemudahan dalam memperoleh transportasi
	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri	Jarak ideal lokasi kawasan industri terhadap permukiman adalam minimal dua kilometer	Aksesbilitas	Kedekatan dengan tempat kerja (kawasan industri)
		• Status kepemilikan	Fisik	Luas Hunian

	Irfiyanti dan Manaf (2014)	• Luas hunian • Jumlah kamar tidur • Lama tinggal di lokasi hunian • Kondisi fisik bangunan • Tingkat ketenangan, keasrihan, kebersihan, dan keamanan • Tingkat aksebilitas dan ketersediaan fasilitas umum		Kondisi Bangunan
				Lingkungan
			Kependudukan	Lama tinggal
			Ekonomi	Kepemilikan rumah
			Sarana dan prasarana	Kesehatan
				Pendidikan
				Perdagangan
				RTH
	Budiharjo dalam Muna (2009)	Jarak yang jauh dengan tempat kerja dan fasilitas sosial berarti akan menambah persentase pengeluaran ongkos transportasi	Aksesbilitas	Radius jangkauan sarana dan prasarana
				Jarak dari tempat kerja (kawasan industri)
	Muna (2009)	• Jarak dari tempat tinggal ke lokasi kerja (kawasan industri)	Fisik	Luas bangunan
				Kondisi Bangunan

		• Status kepemilikan bangunan • Bentuk bangunan • Ketinggian bangunan • Luasan bangunan, • Lamanya tinggal bagi pekerja	Aksesbilitas	Jarak dari tempat kerja (kawasan industri)
			Kependudukan	Lama tinggal pekerja
			Ekonomi	Kepemilikan rumah

Sumber : Sintesa Penulis, 2020

Pada sintesa tinjauan pustaka permukiman bagi pekerja industri, variabel yang akan diambil adalah variabel jarak dengan kawasan industri, kemudahan dalam memperoleh transportasi, ketersediaan sarana kesehatan, sarana pendidikan, RTH, dan jenis pekerjaan yang akan digunakan untuk mengidentifikasi kawasan industri dan karakteristiknya

2.5 Sintesa Pustaka

Berdasarkan sintesa tinjauan pustaka di atas mengenai permukiman kumuh dan permukiman pekerja di kawasan industri, pada dasarnya terdapat kesamaan pemikiran dari para ahli tersebut. Oleh karena itu hasil dari tinjauan teori yang telah dipaparkan perlu dilakukan sintesa pustaka untuk menentukan indikator yang sesuai dengan penelitian ini. Indikator ini yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini. Hasil sintesa pustaka tersebut dapat dilihat pada **Tabel 2.6**

Tabel 2. 6 Sintesa Pustaka

Indikator yang digunakan	Variabel	Alasan Pemilihan
Fisik	Kondisi bangunan	Kondisi fisik bangunan penanganan pemukiman kumuh, sehingga jika kondisi fisik bangunan kurang layak maka kualitas dari permukiman tersebut akan menurun.
	Kepadatan bangunan	
Sarana dan Prasarana	Kondisi Jalan	Ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh terhadap penanganan pemukiman kumuh. Jika Ketersediaan prasarana kurang, maka kualitas dari permukiman tersebut akan menurun.
	Kondisi Drainase	
	Air minum	
	Sanitasi	
	Persampahan	
	Proteksi bencana	
Aksesbilitas	Kedekatan dengan kawasan industri	Kedekatan dengan kawasan industri berpengaruh terhadap penentuan area pendukung industri.
	Kemudahan dalam memperoleh transportasi	
Fasilitas Umum	Kesehatan	Permukiman yang terjangkau fasilitas
	Pendidikan	

Indikator yang digunakan	Variabel	Alasan Pemilihan
	Perdagangan	umum berpengarub terhadap penentuan area pendukung industri
	RTH	
Ekonomi	Jenis Mata Pencaharian	Jenis mata pencaharian berpengaruh terhadap penentuan area pendukung industri, jika banyak penduduk yang bekerja menjadi buruh industri maka dapat ditentukan sebagai area pendukung industri

Sumber : Sintesa Penulis, 2020

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan rasionalistik. Pendekatan rasionalistik adalah pendekatan yang bertujuan untuk membentuk suatu kebenaran teori secara empirik, dalam artian kebenaran yang bersumber kepada fakta empiris yang ada. Sehingga dapat diartikakan bahwa pendekatan rasionalistik ini adalah suatu ilmu yang dibentuk dari adanya berbagai landasan teori beserta adanya proses pemikiran (Muhadjir,2000).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian *mix methods*. Jenis penelitian mix methods, ada jenis penelitian yang menkombinasi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif (Creswell,2012). Tujuan dari penelitian *mix* methods adalah data yang diperoleh dapat lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif (Sugiyono, 2014). Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan pada sasaran 1 ketika melakukan analisa mapping. Sedangkan penelitian kualitatif dilakukan untuk mencapai sasaran 2 menggunakan analisa konten atau *content analysis* dan sasaran 3 menggunakan metode triangulasi.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang dapat berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi. Variabel penelitian merupakan turunan dari beberapa factor baik yang berupa kualitatif maupun kuantitatif. Variabel penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini didapat dari tinjauan pustaka yang telah dilakukan terkait penanganan penanganan pemukiman kumuh dan permukiman pekerja di kawasan industri. Dari hasil tinjauan pustaka tersebut, didapatkan variabel yang berpengaruh dalam penanganan pemukiman kumuh.. Berikut variabel serta definisi operasionalnya dapat dilihat pada **Tabel 3.1**

Tabel 3. 1 Indikator, Variabel, Definisi Operasional

Sasaran	Indikator yang digunakan	Variabel	Definisi Operasional
1. Mengidentifikasi delineasi area pendukung industri dan mengetahui karakteristik kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Krian, Kecamatan Krian	Fisik	Kondisi bangunan	Kondisi bangunan permanen, bertembok kokoh dan layak huni serta keteraturan bangunannya
		Kepadatan bangunan	Rasio jumlah unit bangunan dibagi luas wilayah
	Sarana dan Prasarana	Kondisi Jalan lingkungan	Kondisi perkerasan jalan yang sudah beraspal/ paving yang tidak mengalami kerusakan
		Drainase	Ketersediaan drainase yang dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan

Sasaran	Indikator yang digunakan	Variabel	Definisi Operasional
Kabupaten Sidoarjo		Air bersih dan Air Minum	Ketersediaan sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari
		Sanitasi	Ketersediaan saluran pembuangan air limbah rumah tangga yang bersifat pribadi atau maksimal dapat diakses oleh dua rumah tangga
		Persampahan	Ketersediaan fasilitas persampahan yang diangkut secara rutin atau terjadwal
		Proteksi bencana	Ketersediaan sarana proteksi kebakaran
	Aksesbilitas	Kedekatan dengan kawasan industri	Jarak pemukiman dengan tempat kerja (kawasan industri)
		Kemudahan dalam memperoleh transportasi	Ketersediaan transportasi umum di kawasan permukiman
	Fasilitas Umum	Kesehatan	Ketersedian sarana kesehatan di kawasan permukiman

Sasaran	Indikator yang digunakan	Variabel	Definisi Operasional
		Pendidikan	Ketersedian sarana pendidikan di kawasan permukiman
		Perdagangan	Ketersedian sarana perdagangan di kawasan permukiman
		RTH	Ketersedian sarana RTH di kawasan permukiman
	Ekonomi	Jenis Mata Pencaharian	Besarnya penduduk yang bekerja di kawasan industri
2. Menganalisis kebijakan mengenai tata ruang dan pemukiman di Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	Fisik	Kondisi bangunan	Kebijakan/aturan terkait kondisi bangunan yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
		Kepadatan bangunan	Kebijakan/aturan terkait kepadatan bangunan yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
	Sarana dan Prasarana	Kondisi Jalan lingkungan	Kebijakan/aturan terkait jalan lingkungan yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
		Drainase	Kebijakan/aturan terkait drainase yang terdapat

Sasaran	Indikator yang digunakan	Variabel	Definisi Operasional
			pada masing-masing dokumen kebijakan
		Air bersih dan Air Minum	Kebijakan/aturan terkait air bersih dan air minum yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
		Sanitasi	Kebijakan/aturan terkait sanitasi yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
		Persampahan	Kebijakan/aturan terkait persampahan yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
		Proteksi bencana	Kebijakan/aturan terkait proteksi bencana yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
	Aksesbilitas	Kedekatan dengan kawasan industri	Kebijakan/aturan terkait kedekatan dengan kawasan industri yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan

Sasaran	Indikator yang digunakan	Variabel	Definisi Operasional
		Kemudahan dalam memperoleh transportasi	Kebijakan/aturan terkait transportasi umum yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
	Fasilitas Umum	Kesehatan	Kebijakan/aturan terkait fasilitas kesehatan yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
		Pendidikan	Kebijakan/aturan terkait fasilitas pendidikan yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
		Perdagangan	Kebijakan/aturan terkait fasilitas perdagangan yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
		RTH	Kebijakan/aturan terkait RTH yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan
	Ekonomi	Jenis Mata Pencaharian	Kebijakan/aturan terkait mata pencaharian yang terdapat pada masing-masing dokumen kebijakan

Sasaran	Indikator yang digunakan	Variabel	Definisi Operasional
Menentukan strategi penanganan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	Input dari hasil output sasaran 1 dan 2		

Sumber : Penulis, 2020

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah daerah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari satuan analisis yang merupakan sasaran penelitian yang akan dicapai. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah Kelurahan Krian.

Sedangkan sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini, penentuan sampel adalah kawasan permukiman kumuh

Kelurahan Krian yaitu Kawasan Gersikan, Kawasan Krajan Pasar, dan Kawasan Krajan Stasiun

3.5 Metode Penelitian

3.5.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode pengumpulan data dengan survei primer dan survey sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh berbagai instansi-instansi pemerintahan terkait. Metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 3.2**:

Tabel 3. 2 Metode Perolehan Data

No.	Sasaran	Metode	Keterangan
1.	Mengidentifikasi delineasi area pendukung industri di kawasan pemukiman kumuh dan mengetahui karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	Survei Sekunder dan Survei Primer	Bertujuan untuk mendelineasi kawasan pendukung industri

No.	Sasaran	Metode	Keterangan
2.	Menganalisis kebijakan mengenai tata ruang dan pemukiman di Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	Survei Sekunder	Bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai arahan tata ruang, permukiman, serta penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
3.	Menentukan strategi penangan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	Survei Sekunder	Bertujuan untuk penentuan strategi penanganan pemukiman kumuh berdasarkan *stakeholder* kunci

Sumber : Penulis,2020

3.5.1.1 Metode Pengumpulan Data Primer

Survei primer dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung seperti observasi lapangan, wawancara, serta melalui kuisoner. Survei primer bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi lingkungan dan perubahan perubahan/fenomena yang terjadi melalui pengamatan suatu fakta menggunakan indera, tanpa harus mengambil sampel. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi. Observasi menurut Arifin (2011) adalah

suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, dan objektif serta rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi dan gambaran umum mengenai permukiman kumuh di Kelurahan Krian.

Berikut jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan dapat dilihat pada **Tabel 3.3**:

Tabel 3. 3 Metode pengumpulan data primer

Sasaran	Metode	Keterangan
Mengidentifikasi delineasi area pendukung industri dan mengetahui karakteristik kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	Observasi	Bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai delineasi kawasan pendukung industri

Sumber : Penulis, 2020

3.5.1.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi kepada sejumlah instansi dan literature terkait dengan penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 3.4**:

Tabel 3. 4 Pengumpulan Data Sekunder

No.	Dokumen	Jenis Data	Instansi
1.	• RTRW Kabupaten Sidoarjo • Dokumen RP2KPKP Kabupaten Sidoarjo • Profil kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Krian • Dokumen penyusunan rencana kawasan permukiman kumuh perkotaan (RKPKP) • Rencana Detail Tata Ruang Kota Kelurahan Krian	• Arahan Penataan Ruang • Arahan Penanganan pemukiman kumuh • Data penggunaan lahan • Data kondisi infrastruktur • Data terkait lokasi spesifik dan luasan	• Bappeda Kabupaten Sidoarjo • Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata ruang Kabupaten Sidoarjo
2.	• Kecamatan Krian dalam angka	• Data kependudukan • Data Sosial Ekonomi	BPS Kabupaten Sidoarjo
3.	• Monografi Kelurahan Krian	• Data kependudukan • Data Jenis Pekerjaan • Data Sosial Ekonomi	Kelurahan Krian

Sumber : Penulis,2020

3.5.2 Metode dan Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses pencarian dan penyusunan data yang diperoleh secara sistematis, dengan mengelompokan kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun arahan, memilih mana yang dapat dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono dalam Dewi, 2019). Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode analisa, yaitu *Mapping Analysis*, Deskriptif Kuantitatif, *Content Analysis* dan Triangulasi. *Mapping Analysis* dengan *Buffer* digunakan untuk mendelineasi area pendukung industri di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Krian. Deskriptif Kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik pemukiman kumuh berdasarkan Dokumen RPLP Kabupaten Sidoarjo dan data sekunder terkait lainnya yang hasilnya nanti akan digunkan untuk analisa triangulasi. *Content Analysis* digunakan untuk menganalisis kebijakan terkait arahan mengenai tata ruang, permukiman, serta penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Krian yang hasilnya akan digunakan untuk analisa triangulasi. Kemudian hasil analisa tersebut, akan digunakan untuk merumuskan strategi penangan permukiman kumuh di kawasan pendukung industri menggunakan analisa Triangulasi dengan berdasarkan pada hasil analisa 1 dan 2 serta *best practice*. Metode analisa dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3. 5 Metode Analisa dalam Penelitian

Sasaran	Teknik Analisa	Input	Output
Mengidentifikasi delineasi area pendukung industri dan mengetahui karakteristik kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	*Mapping Analysis* (delineasi area pendukung industri) serta deskriptif kuantitatif (Karakteristik pemukiman kumuh	• Fisik • Sarana dan Prasarana • Aksesbilitas • Fasilitas umum • Ekonomi	Delineasi area pendukung industri di kawasan pemukiman kumuh dan karakteristik pemukiman kumuh Kelurahan Krian
Menganalisis kebijakan mengenai tata ruang dan pemukiman di Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	*Content Analysis*	• Fisik • Sarana dan Prasarana • Aksesbilitas • Fasilitas umum • Ekonomi	Kebijakan terkait arahan tata ruang, permukiman, serta penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Krian berdasarkan

Sasaran	Teknik Analisa	Input	Output
			dokumen perencanaan
Menentukan strategi penangan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	Triangulasi	Hasil Analisa Sasaran 1 dan 2	Strategi penanganan kumuh di Kelurahan Krian

Sumber : Penulis, 2020

3.5.2.1 Mengidentifikasi delineasi area pendukung industri dan mengetahui karakteristik kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Dalam mencapai sasaran ini, peneliti menggunakan teknik *Mapping analysis* dengan *buffer* dilakukan untuk mendelineasi wilayah pemukiman kumuh di Kelurahan Krian yang menjadi area pendukung kawasan industri. Selanjutnya dilakukan analisa Deskriptif Kuantitatif untuk mendeskripsikan karakteristik pemukiman kumuh berdasarkan Dokumen RPLP Kabupaten Sidoarjo dan dokumen terkait lainnya.

Tahapan dalam mencapai sasaran ini adalah :

1. Pengumpulan data

   Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi di wilayah penelitian. Untuk mengetahui karakteristik permukiman kumuh didasarkan pada dokumen RPLP Kelurahan Krian dan RP2KPKP Kabupaten Sidoarjo

2. Pengolahan data

   Pengolahan data dilakukan dari hasil *Mapping analysis* dengan memetakan delianiasi area pendukung industri di wilayah penelitian.

3.5.2.2 Menganalisis kebijakan mengenai tata ruang dan pemukiman di Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Dalam mencapai sasaran 2 yaitu menganalisis kebijakan mengenai tata ruang dan pemukiman di Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dilakukan analisa dengan menggunakan konten analisa atau *content analysis.* Menurut Berelson & Kerlinger dalam Kriyantono (2010), analisis isi merupakan suatu metode analisa yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Pada penelitian ini, *content analysis* dilakukan dengan melakukan analisis pada dokumen perencanaan tata ruang dan dokumen perencanaan permukiman yang terkait. *Content Analysis* bersifat replicable atau penelitian yang dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda dapat menghasilkan temuan yang kurang lebih sama ketika mengaplikasikan teknik dengan data yang sama (Dewi, 2019). *Content analysis* juga bersifat fleksibel yang berarti analisis ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Content analysis dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan dalam *content analysis* menurut Krippendorff dalam Subrayogo, 2010) sebagai berikut :

1. Pengunitan

   Tahapan ini berupaya untuk mengambil data yang tepat sesuai dengan kepentingan penelitian yang mencakup teks, gambar, suara, dan data lainnya untuk diobservasi lebih lanjut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan proses pengunitan tehadap dokumen perencanaan tata ruang dan dokumen perencanaan permukiman.

2. Penyamplingan

   Tahapan ini dilakukan dengan membatasi observasi dengan merangkum semua jenis unit yang ada. Dalam penelitian ini, tahapan penyamplingan dilakukan dari hasil mengekplorasi variabel yang telah ditentukan.

3. Pengkodean

   Pada tahapan ini, pengkodean dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dalam memahami pertanyaan penelitian serta mengenali dan memperdalam karakteristik yang akan ditemukan. Dalam penelitian ini, pengkodean dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan tata ruang dan dokumen perencanaan permukiman. Pengodean tersebut disesuaikan dengan variabel penelitian yang telah dikaji. Setelah itu dilakukan pengkodean dengan mengutip kalimat dalam dokumen perencanaan tata ruang dan dokumen perencanaan permukiman

4. Kesimpulan

   Tahapan ini bertujuan untuk mengambil pemahaman atau kesimpulan berdasarkan pengelompokan kode yang lah dilakukan, sehingga menghasilkan penemuan sasaran dua yaitu menganalisis kebijakan terkait arahan tata ruang,

permukiman, serta penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Kode variabel dalam analisa ini dapat ditujukan oleh **Tabel 3.6**

Tabel 3. 6 Kode Variabel

Variabel	Kode Variabel	Warna
Kondisi bangunan	V1	
Kepadatan bangunan	V2	
Kondisi Jalan lingkungan	V3	
Drainase	V4	
Air bersih dan Air Minum	V5	
Sanitasi	V6	
Persampahan	V7	
Proteksi bencana	V8	
Kedekatan dengan kawasan industri	V9	
Kemudahan dalam memperoleh transportasi	V10	
Kesehatan	V11	
Pendidikan	V12	
Perdagangan	V13	
RTH	V14	
Jenis Mata Pencaharian	V15	

Sumber : Penulis, 2020

3.5.2.3 Menentukan strategi penanganan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Dalam mencapai sasaran ketiga yaitu penentuan strategi penanganan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, dilakukan analisis dengan metode triangulasi. Triangulasi menurut Norman K. Denkin dalam Rahardjo (2010) merupakan gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil analisa sasaran 1, hasil analisa sasaran 2, dan literatur.

3.6 Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Perumusan Masalah

Tahapan ini berisi mengenai identifikasi isu permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian. Tahap ini juga membahas mengenai fakta-fakta empiris yang terjadi di wilayah penelitian. Dari permasalah ini dapat terbentuk tujuan penelitian, sekaligus beberapa sasaran utama yang akan menjadi bahasan di dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai penanganan yang sesuai dengan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

2. Tinjauan Pustaka

Tahapan tinjauan pustaka merupakan tahap yang bertujuan untuk mengumpulkan literature yang berkaitan dengan topik

yang dibahas dalam penelitian, terutama terkait teori karakteristik pemukiman kumuh, penanganan pemukiman kumuh, dan mengenai permukiman bagi pekerja di kawasan industri. Hasil akhir dari peninjauan pustaka ini rumusan indikator dan variable-variabel penelitian yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini.

3. Pengumpulan data

Tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam proses analisa yang berdasarkan variable-variabel penelitian yang telah dilakukan. Dalam pengumpulan data perlu diperhatikan validitas instrument tersebut. Dalam penelitian ini data yang diperlukan data kualitatif dan kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data secara primer dan sekunder.

4. Analisa

Tahapan ini merupakan tahapan pengolahan data dan informasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Tahap analisa ini beguna dalam menjawab tujuan dalam penelitian. Pada penelitian ini, teknik analisa yang digunakan adalah *mapping analysist* dan deskriptif kualitatif untuk mencapai sasaran satu, analisa konten atau *content analysis* untuk mencapai sasaran dua, serta analisa triangulasi untuk mencapai sasaran ketiga.

5. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini bertujuan untuk menarik kesimpulan atas rumusan permasalahan yang telah ditetapkan pada awal penelitian. Kesimpulan tersebut didapat dari hasi tahapan analisa yang telah dilakukan. Tahap selanjutnya adalah tahap rekomendasi yaitu berupa rumusan strategi penanganan

permukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian.

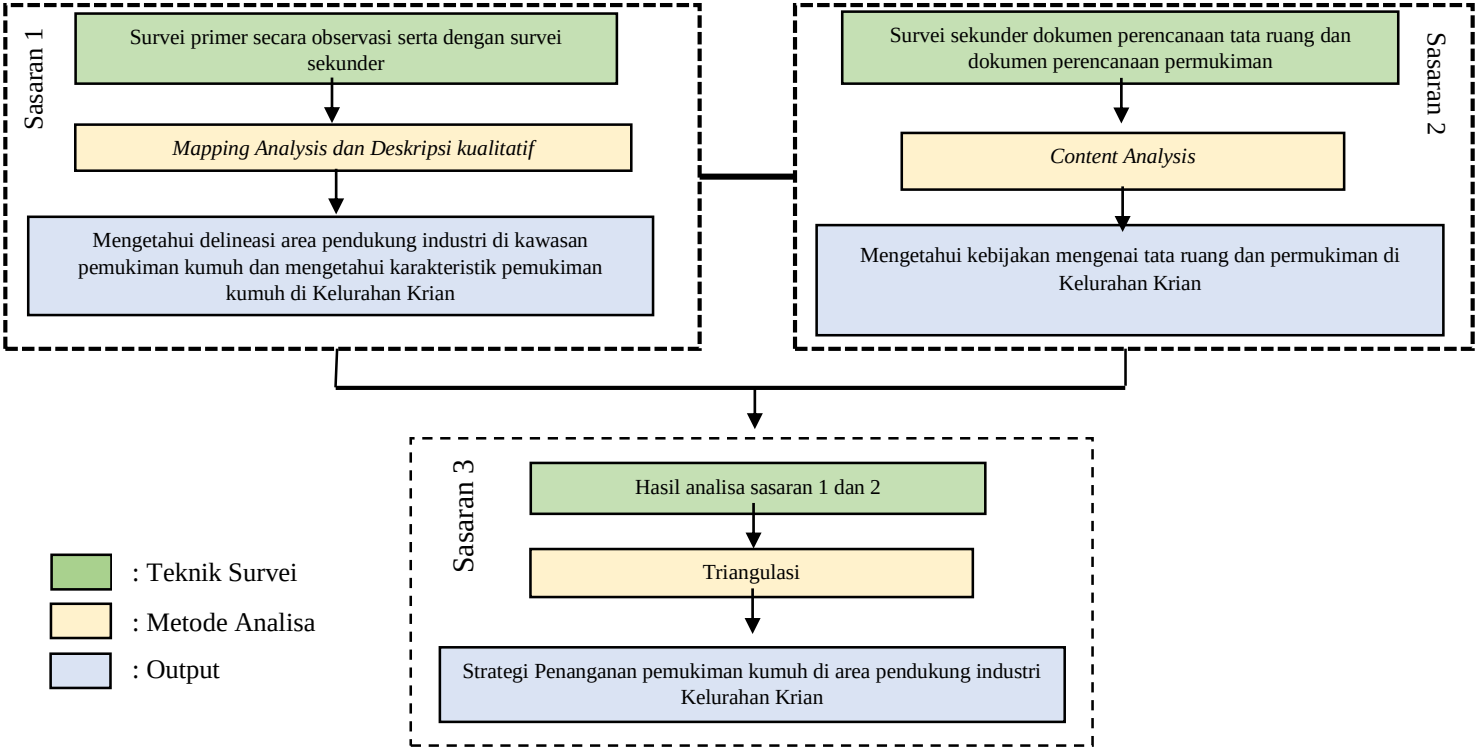

Gambar 3. 1 Bagan Skema Tahapan Penelitian
Sumber : Penulis, 2019

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

4.1.1 Orientasi Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian adalah di kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Dengan luas wilayah sebesar 125,38 Km^2, Kelurahan Krian terbagi menjadi 9 RW dan 40 RT. Berdasarkan Dokumen Kecamatan Krian dalam Angka 2018, Kelurahan Krian memiliki ketinggian wilayah sebesar 12 meter diatas permukaan air laut dengan jarak ke pusat pemerintahan Kecamatan Krian sebesar 1 km. Batas-batas administrasi Kelurahan Krian adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Kraton
Sebelah Timur	: Kelurahan Tambak Kemerakan
Sebelah Selatan	:Desa Katerungan dan Desa Jerukgamping
Sebelah Barat	: Kelurahan Kemangsen

Berikut merupakan peta lokasi permukiman kumuh di wilayah studi

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

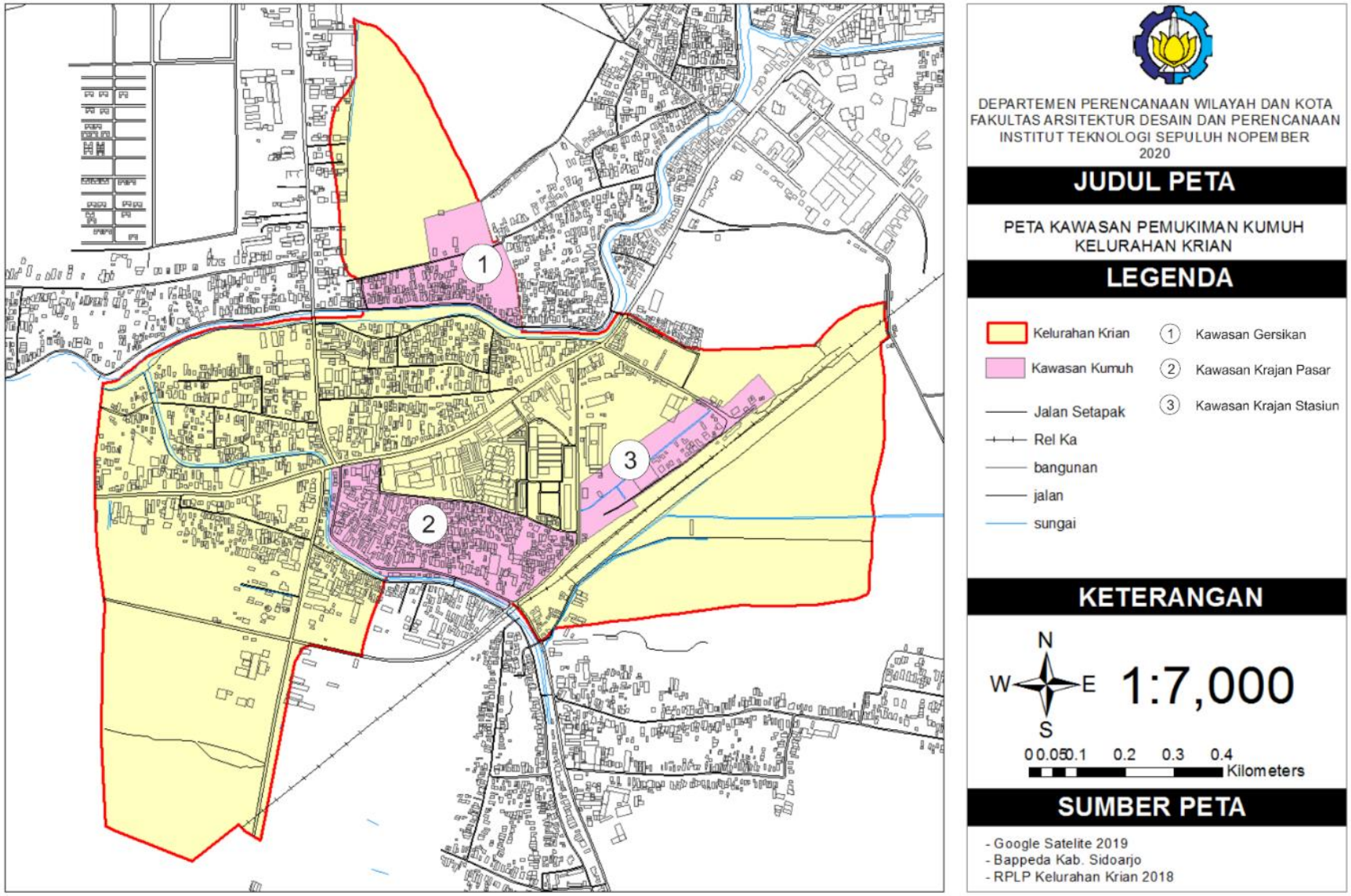

Gambar 4. 1 Wilayah Penelitian

Sumber : Penulis, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/452/404.1.3/2015 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sidoarjo, Kelurahan Krian merupakan salah satu lokasi kumuh dengan luas kawasan sebesar 18,15 Ha yang tersebar di 3 lokasi yaitu kawasan Kawasan Gersikan di RW 2 (RT 5,6,7,8,9), Kawasan Krajan Pasar di RW 4 (RT 16,17,18,19), RW 5 (RT 21,22,23,24,25), RW 6 (RT 26,27,28,29), dan Kawasan Krajan Stasiun meliputi RW 9 (RT 38, 39). Kawasan Gersikan merupakan kawasan yang berada di sepadan sungai di Kelurahan Krian, Kawasan Krajan Pasar merupakan kawasan yang berada di sekitar Pasar Krian, dan Kawasan Krajan Stasiun merupakan kawasan yang berada di sekitar kawasan sepadan rel kereta api

Dalam identifikasi tingkat kekumuhan berdasarkan data baseline, Kelurahan Krian memiliki nilai tingkat kekumuhan sebesar 43 dengan rata-rata kekumuhan sektoral sebesar 48.37% sehingga Kelurahan Krian termasuk dalam kategori kumuh ringan. Identifikasi kekumuhan Kelurahan Krian dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4. 1 Tabel Identifikasi Kekumuhan Kelurahan Krian

Aspek	Kriteria	Presentase	Nilai
Kondisi bangunan gedung	Ketidakteraturan Bangunan	79,57%	5
	Kepadatan Bangunan	0,00%	0
	Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis Bangunan	50,32%	1

Aspek	Kriteria	Presentase	Nilai
Rata-Rata Kondisi Bangunan Gedung		43,30%	
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	5,94%	0
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	46,38%	1
Rata-Rata Kondisi Jalan Lingkungan		23,19%	
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	60,74%	3
	Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	61,81%	3
Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Minum		61,28%	
Kodisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	33,94%	1
	Ketidaktersediaan Drainase	30,09%	1
	Ketidakterhubungan dengan system drainase	17,71%	0
	Tidak Terpeliharanya Drainase	69,91%	3
	Kualitas Konstruksi Drainase	57,91%	3
Rata-Rata Kondisi Drainase Lingkungan		38,37%	

Aspek	Kriteria	Presentase	Nilai
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	59,30%	3
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	69,31%	5
Rata-Rata Kondisi Penyediaan Air Limbah		64,56%	
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	100%	5
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	86,97%	5
	Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	100%	5
Rata-Rata Kondisi Pengelolaan Persampahan		95,66%	

Aspek	Kriteria	Presentase	Nilai
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0,00%	5
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	35,10%	1
Rata-Rata Kondisi Proteksi Kebakaran		17,55%	
Total Nilai		45	
Tingkat Kekumuhan		Kumuh Sedang	
Rata-Rata Kekumuhan Sektoral		50,41%	

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

4.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi pada suatu wilayah menunjukan tingkat kesejahteraan penduduk yang ada di daerah tersebut. Kondisi sosial dan ekonomi ini dapat dilihat dari pendidikan dari kepala rumah tangga, pekerjaan dari kepala rumah tangga, dan pendapatan kepala keluarga. Pendidikan kepala rumah tangga dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4. 2 Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Pendidikan Kepala Rumah Tangga	Jumlah
Tidak Sekolah	105
SD	365
SMP	564
SMA	815
Sarjana	256

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas pendidikan kepala rumah tangga Kelurahan Krian adalah berpendidikan SMA, yaitu sejumlah 815 Kepala Rumah Tangga. Meski demikian, masih terdapat 105 Kepala Rumah tangga yang tidak bersekolah.

Tabel 4. 3 Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

Status Pekerjaan	Jumlah
Tidak bekerja/tidak berwiraswasta	134
Bekerja/Berwiraswasta tapi tidak tetap	1239
Mempunyai pekerjaan tetap	734
Jumlah KK	2127

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Tabel 4. 4 Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Sektor primer	0
Sektor jasa	537
Sektor perdagangan	1590
Jumlah KK	2127

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas Pekerjaan warga Kelurahan Krian kecamatan Krian adalah Bekerja berwiraswasta yaitu sejumlah 1239 Kepala Rumah Tangga dan sektor perdagangan 1590 Kepala Rumah Tangga, serta disektor jasa 537 kepala rumah tangga. Meski demikian, masih terdapat 734 Kepala Rumah tangga yang bekerja dengan berpenghasilan tetap seperti pegawai perkantoran, guru, pegawai pemerintah, pegawai pabrik besar.

Tabel 4. 5 Pendapatan Kepala Rumah Tangga

Klasifikasi Pendapatan	Jumlah
< Rp 1.000.000	30
Rp. 1.000.100 s/d Rp. 1.500.000	929
> Rp. 1.500.000	1168
Jumlah KK	2127

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas pendapatan warga Kelurahan Krian adalah berpendapatan > Rp. 1.500.000 yaitu sejumlah 1168 Kepala Rumah Tangga, berpendapatan Rp Rp.1.000.000 s/d Rp.1.500.000 sebanyak 929 Kepala Rumah Tangga serta dengan yang berpendapatan < Rp. 1.000.000 yaitu 30 Kepala Rumah Tangga.

4.1.3 Kondisi Penggunaan lahan

Kelurahan Krian memiliki penggunaan lahan yang terdiri dari dua bagian yaitu :

- Lahan terbangun terdiri dari kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, dan gudang.
- Lahan non terbangun terdiri dari sawah, tegalan/ belukar, tanah kosong, sempadan rel, sempadan sungai, dan Ruang Terbuka Hijau (Lapangan dan Makam).

Permukiman

Perdagangan dan jasa

Sawah

Lahan Kosong

Gambar 4. 2 Penggunaan Lahan Kelurahan Krian

Sumber : Survei Primer, 2020

Kelurahan Krian didominasi oleh permukiman serta perdagangan dan jasa. Kawasan permukiman di Kelurahan Krian didominasi oleh permukiman kampung. Berdasarkan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Krian tahun 2018, kawasan permukiman telah berkembang secara terpusat/konsentris yang dilingkupi dengan ruas jalan utama. Tingkat kepadatan bangunan yang berkembang didominasi oleh tingkat kepadatan tinggi, khususnya pada kawasan permukiman yang berada di sekitar pusat kegiatan, sedangkan pada kawasan pinggiran/ periferi tingkat kepadatan cenderung sedang – tinggi.

4.1.4 Kondisi Kependudukan

Kondisi kependudukan dalam suatu wilayah diperlukan untuk merencanakan suatu wilayah. Berikut disajikan kondisi kependudukan di Kelurahan Krian.

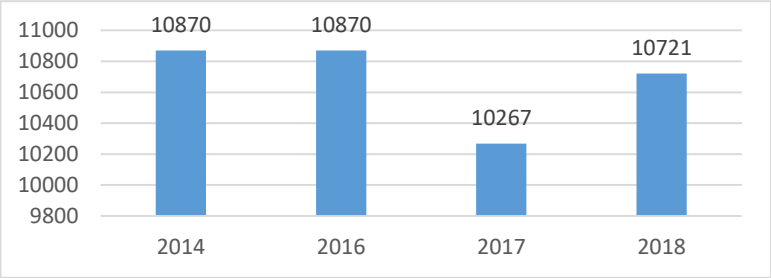

Gambar 4. 3 Jumlah Penduduk Tahun 2014, 2016, 2017, dan 2019

Sumber : Kecamatan Krian dalam Angka 2015,2017, 2018, dan 2019

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Krian pada tahun 2017 mencapai 10870 jiwa yang kemudian mengalami penurunan hingga 10267 jiwa pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 kembali naik menjadi 10721 jiwa. Berikut perubahan jumlah penduduk pada tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4. 6 Perubahan Jumlah Penduduk Tahun 2018

Perubahan Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk
Lahir	149
Mati	15
Datang	34
Pindah	29

Sumber : Kecamatan Krian dalam Angka tahun 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 penduduk yang lahir adalah sebanyak 149 jiwa, penduduk yang meninggal sebesar 15 jiwa, penduduk yang datang ke Kelurahan Krian sebesar 34 jiwa, dan penduduk yang pindah sebesar 29 jiwa.

4.1.5 Kondisi Fisik Bangunan

Kelurahan Krian memiliki kepadatan bangunan rata-rata sebesar 42,15 unit/ Ha. Beberapa kawasan yang memiliki tingkat kepadatan bangunan yang cukup tinggi ialah RT 18/RW4 (168,67 unit/ Ha) dan RT 25/ RW 5 (141,94 unit/Ha).

Tabel 4. 7 Tingkat Kepadatan Bangunan

RT-RW	Tingkat Kepadatan Bangunan (Unit/Ha)
RT005-RW002	32.99
RT006-RW002	84.09
RT007-RW002	47.37
RT008-RW002	27.87
RT009-RW002	136.54
RT016-RW004	94.67
RT017-RW004	116.67
RT018-RW004	168.67
RT019-RW004	112.90
RT020-RW004	24.91
RT021-RW005	57.45
RT022-RW005	89.66
RT023-RW005	53.97
RT024-RW005	82.14
RT025-RW005	141.94
RT026-RW006	45.13
RT027-RW006	106.06
RT028-RW006	95.00
RT029-RW006	79.66
RT038-RW009	65.22
RT039-RW009	30.89

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Berdasarkan Kecamatan Krian dalam Angka, jenis bangunan yang ada di Kelurahan Krian terdiri dari bangunan dengan tembok dan setenga tembok. Dimana bangunan dengan tembok sebanyak 1645 buah dan bangunan setengah tembok berjumlah 31 buah.

Gambar 4. 4 Kondisi Fisik Bangunan Permukiman

Sumber : Survei Primer, 2020

4.1.6 Kondisi Lingkungan Permukiman

a. Kondisi Jalan

Berdasarkan dokumen RPLP Kelurahan Krian, jalan lingkungan di Kelurahan Krian didominasi oleh kondisi yang layak/ diperkeras khususnya pada ruas jalan lingkungan dengan lebar > 1,5 meter yaitu sekitar 71% dari panjang keseluruhan. Rata-rata dari jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis adalah sebesar 52% sehingga kondisi ini mempengaruhi para pengguna jalan yang setiap hari melewati jalan tersebut.

b. Drainase

Berdasarkan dokumen RPLP Kelurahan Krian tahun 2918, Beberapa kawasan di Kelurahan Krian yang rawan mengalami genangan/ banjir, khususnya saat terjadi hujan dengan tingkat intensitas sedang hingga tinggi, seperti Dusun Krajan Barat (RW 6), Krajan Tengah (RW 5), Krajan Timur (RW 6), dan Krajan Stasiun (RW 9). Kondisi tersebut terjadi

akibat kondisi saluran drainase yang kurang memadai, misalnya; saluran drainase mengalami pendangkalan/ sedimentasi (tanah, pasir, sampah), penyempitan saluran drainase, belum adanya saluran drainase, saluran drainase yang tidak terkoneksi/ terhubung dengan saluran perngumpul, serta dimensi saluran drainase yang kurang memadai.

Gambar 4. 5 Kondisi beberapa drainase di Kelurahan

Krian

Sumber : Survei Primer, 2020

c. Sanitasi

Berdasarkan dokumen RPLP Kelurahan Krian tahun 2018 kondisi pengelolaan air limbah di Kelurahan Krian masih cukup banyak terdapat rumah tangga yang belum memiliki jamban pribadi serta tidak memiliki/terhubung dengan septicktank, seperti pada kawasan RW 2, 4, 5, 6, dan 9. Hal tersebut dikarenakan minimnya lahan pada kavling/ persil rumah. Selama ini, warga yang tidak memiliki WC/septicktank pribadi memanfaatkan WC umum. Kondisi tersebut terjadi pada kawasan RW 2 dan 9. Selain itu, warga yang berada di sekitar saluran sekunder/ tersier, memanfaatkan saluran

sebagai tempat pembuangan limbah sanitasi yang bercampur dengan rumah tangga.

Gambar 4. 6 Kondisi Sanitasi di Kelurahan Krian

Sumber : Survei Primer, 2020

d. Persampahan

Berdasarkan dokumen RPLP Kelurahan Krian tahun 2018, sebagian besar kawasan permukiman pada kelurahan Krian masih belum terlayani oleh pengangkutan dan pengelolaan sampah yang memadai. Sarana utama pendukung persampahan belum tersedia, khususnya bak sampah, kendaraan pengangkut sampah, serta petugas kebersihan. Di sisi lain, masih terdapat warga yang membuang sampah pada sungai/ saluran serta pada lahan kosong yang terdapat pada lahan kosong sekitar permukiman.

Gambar 4. 7 Kondisi Persampahan di Kelurahan Krian

Sumber : Survei Primer, 2020

e. Air Minum dan Air Bersih

Berdasarkan dokumen RPLP Kelurahan Krian tahun 2018, elayanan sarana air untuk keperluan minum, mandi, dan cuci (perpipaan ataupun non perpipaan) Kelurahan Krian cukup layak. Kondisi tersebut terlihat dari prosentase rumah tangga yang terlayani sarana air minum yaitu sekitar 63%. Sebagian besar rumah tangga memanfaatkan air yang berasal dari sumur bor untuk keperluan konsumsi, seperti; minum dan memasak. Selain itu, terdapat sebagian rumah tangga yang memanfaatkan sumber air PDAM dan air isi ulang (galon) sebagai sumber air minum. Sedangkankan untuk keperluan non konsumsi, sebagian besar masyrakat memanfaatkan air dari sumur bor dan sumur gali, misalnya; mencuci, mandi, dll. Di sisi lain, terdapat beberapa rumah tangga yang tidak memiliki sumber air minum/ air bersih untuk keperluan sehari-hari. Beberapa rumah tangga tersebut memanfaatkan (sharing) sumber air dari sumur tetangga terdekat.

Saat terjadi genangan/ banjir pada kawasan permukiman, kondisi air sumur gali mengalami perubahan, seperti berbau dan berwarna. Kondisi tersebut terkait dengan kondisi air permukaan yang tercemar oleh air limpasan/ genangan. Sedangkan kondisi air sumur bor masih layak/ memadai untuk konsumsi.

Gambar 4. 8 Kondisi Air Bersih dan Air Minum di Kelurahan Krian

Sumber : Survei Primer, 2020

f. Kondisi Proteksi Kebakaran

Berdasarkan dokumen RPLP Kelurahan Krian tahun 2018, kawasan permukiman belum tersedia prasarana kebakaran, seperti hidran, APAR, pompa, selang pemadam, dll. Kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kebakaran. Kondisi tersebut terkait dengan belum tersedia prasarana kebakaran serta aksesbilitas yang kurang memadai (lebar jalan lingkungan 1-2 meter/ gang sempit).

4.1.7 Kawasan Industri di Wilayah Penelitian

Kawasan industri di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan RTRW Kota Sidoarjo tahun 2009-2029 salah satunya adalah Kawasan Industri SIBORIAN (Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Jabon, dan By Pass Krian). Kawasan SIBORIAN

merupakan kawasan industri dan perdagangan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Kelurahan Krian sebagai salah satu kelurahan yang merupakan bagian dari SSWP IV, memiliki salah satu fungsi yaitu sebagai zona industri ditunjang dengan kegiatan permukiman kepadatan rendah dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krian. Kawasan industri yang berada dekat dengan Kelurahan Krian adalah Kawasan Industri By Pass Krian. Kawasan industri ini dihubungkan dengan Jalan Raya Legundi dan Jalan Ki Hadjar Dewantoro. Berikut peta lokasi Kelurahan Krian dan Kawasan Industri By Pass Krian.

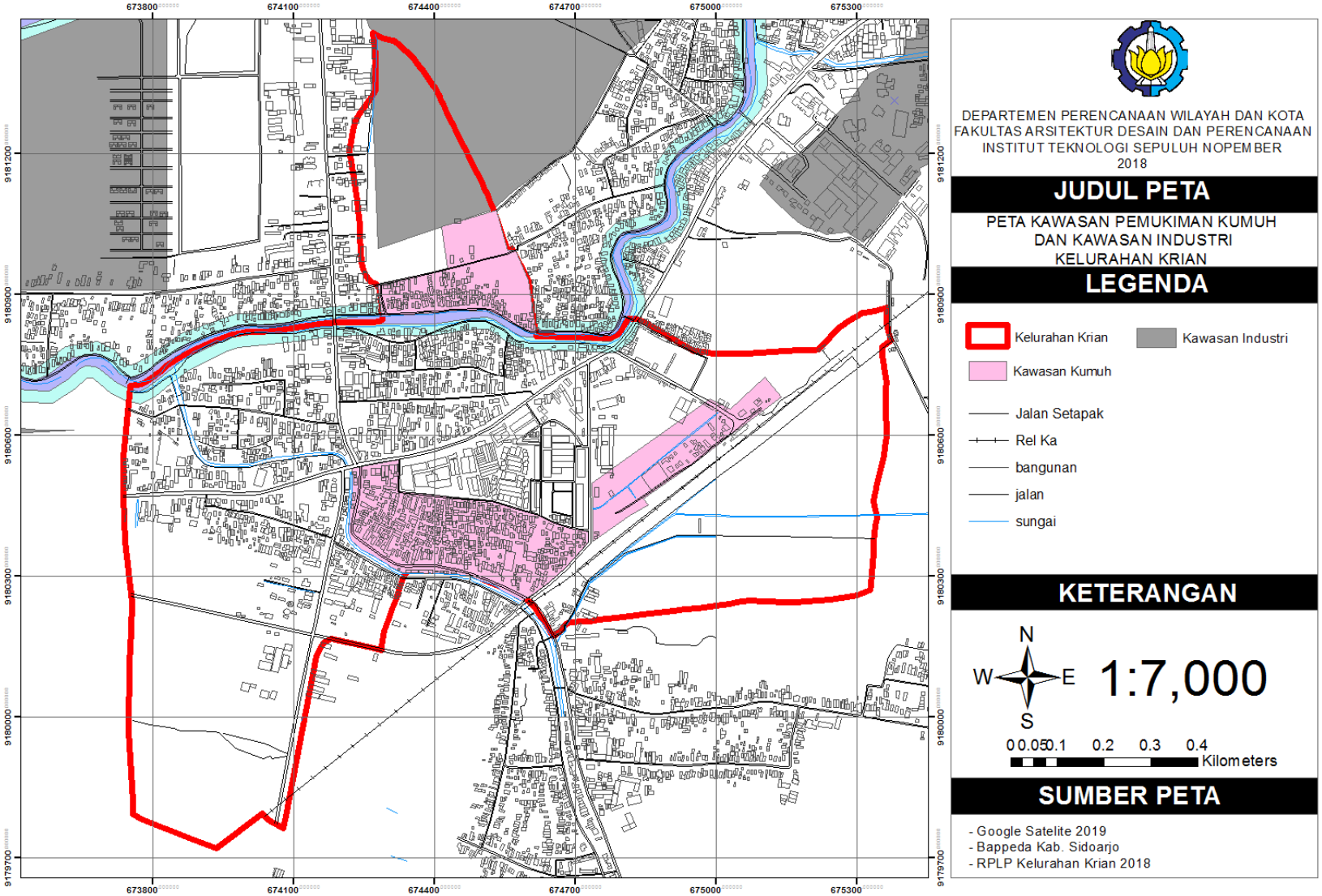

Gambar 4. 9 Lokasi Kawasan *Industri*

Sumber : Penulis, 2019

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

4.2 Analisa dan Pembahasan

4.2.1 Analisa Kawasan Pendukung Industri dan Karakteristik Permukiman Kumuhnya

Pada tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mendelineasi kawasana pendukung industri serta mengetahui karakteristik tiap-tiap kawasanya. Berikut hasil analisa yang telah dilakukan

4.2.1.1 Aksesbilitas

A. Jarak dengan Kawasan Industri

Dalam menganalisa permukiman dalam Kawasan Pendukung Industri di Kelurahan Krian, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 40/M-IND/PER/6/2016 kawasan permukiman sebaiknya berjarak minimal 2 kilometer dari kawasan industri. Berdasarkan hasil analisa menggunakan teknik analisa buffer, kawasan permukiman kumuh di kelurahan Krian berada pada jarak kurang dari 2 Kilometer, hasil analisa tersebut dapat dilihat pada **Gambar 4.10**

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

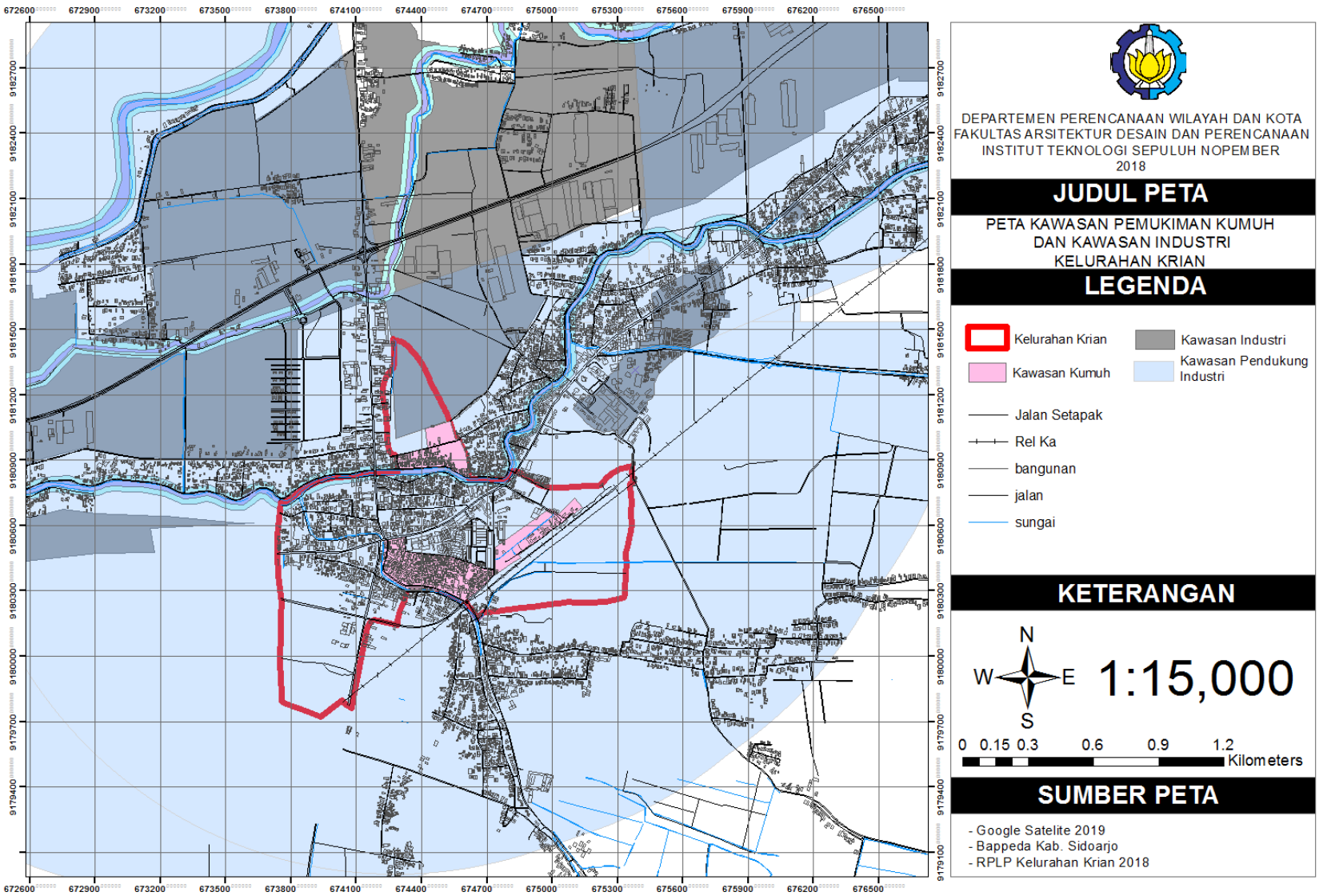

Gambar 4. 10 Hasil Analisa Buffer Kawasan Pendukung Industri

Sumber : Hasil Analisa, 2020

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Dari hasil analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Krian berada pada jarak yang tidak sesuai dengan minimal jarak yang tertera dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 40/M-IND/PER/6/2016 yaitu 2 km. Hal ini dikarenakan keberadaan permukiman yang lebih dulu ada dibandingkan dengan kawasan industri, sehingga akan sulit untuk mendeleniasi kawasan pendukung industri yang baru sesuai dengan peraturan tersebut. Sehingga diperlukan titik tengah berupa strategi yang mendukung kawasan industri untuk jangkauan yang signifikan

B. Transportasi Umum

Kesediaan transportasi umum bepengaruh tehadap kemudahan masyarakat untuk mencapai tempat kerja. Kelurahan Krian berdasarkan data dari Prodeskel tiiidak memiliki transportasi umum yang tersedia untuk masyarakat, untuk lebih jelasnya dapat dapat dilihat pada **Tabel 4.8**.

Tabel 4. 8 Transportasi Umum Kelurahan Krian

No.	Angkutan Umum	Jumlah
1	Bus Umum	0
2	Ojek	0
3	Becak	0
4	Truck umum	0

Sumber : Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Krian belum mendapatkan akses transportasi umum yang dapat digunakan oleh masyarakat. Trasportasi yang sering digunakan oleh masyarakat Kelurahan Krian adalah transpotasi pribadi berupa motor dan mobil.

4.2.1.2 Ekonomi

Pada aspek ekonomi dilihat dari besarnya penduduk yang bekerja di kawasan industri. Kelurahan Krian memiliki jumlah penduduk yang bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta yaitu sebanyak 3555 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4.9**

Tabel 4. 9 Tabel Jenis Pekerjaan Kelurahan Krian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pengrajin	78
2	Buruh Tani	26
3	Petani	98
4	TNI	53
5	Wiraswasta	3881
6	Pedagang Barang Klontong	492
7	Karyawan Perusahaan Swasta	3555
8	Polri	33
9	Pegawai Negeri Sipil	400

Sumber : Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id

Gambar 4. 11 Diagram Jenis Pekerjaan Kelurahan Krian

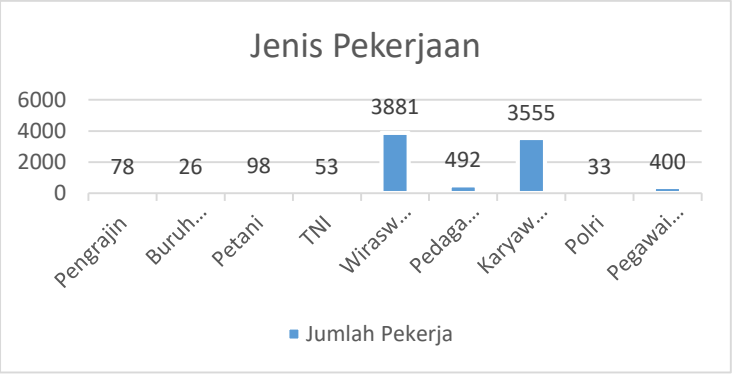

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Dari diagram diatas, terlihat bahwa di Kelurahan Krian penduduk yang bekerja sebagai karyawan pegawai swasta sebesar 3555 orang, dan merupakan jenis pekerjaan terbesar setelah wiraswasta di Kelurahan Krian. Banyaknya wiraswasta di Kelurahan Krian dikarenakan adanya Pasar Krian yang merupakan pasar yang cukup besar. Sehingga dapat disimpulan bahwa Kelurahan Krian merupakan area pendukung industri dikarenakan banyanya penduduk yang bekerja sebagai pegawai swasta.

4.2.1.3 Fisik

A. Kondisi Bangunan

Berdasarkan Kecamatan Krian dalam Angka, jenis bangunan yang ada di Kelurahan Krian terdiri dari bangunan dengan tembok dan setenga tembok. Dimana bangunan dengan tembok sebanyak 1645 buah dan bangunan setengah tembok berjumlah 31 buah. Pada Kawasan Gresikan masih terdapat bangunan yang masih belum memenuhi persyartan teknis atau tidak layak huni (RTLH)

Gambar 4. 12 Kondisi Fisik Bangunan Permukiman

Sumber : Survei Primer, 2020

Berdasarkan kondisi keteraturan bangunan, sebagian besar bangunan pada Kelurahan Krian dalam kondisi teratur sebesar 75%.

Berikut tabel dan diagram mengenai keteratuan bangunan di Kelurahan Krian dapat dilihat pada **Tabel 4.10** dan **Gambar 4.13**.

Tabel 4. 10 Keteraturan Bangunan Pemukiman Kumuh Kelurahan Krian

Kawasan Pemukiman Kumuh	RT-RW	Tingkat Keteraturan Bangunan (%)
Kawasan Gresikan	RT005-RW002	87%
	RT006-RW002	83%
	RT007-RW002	86%
	RT008-RW002	65%
	RT009-RW002	81%
Kawasan Krajan Pasar	RT016-RW004	70%
	RT017-RW004	55%
	RT018-RW004	19%
	RT019-RW004	83%
	RT020-RW004	94%
	RT021-RW005	76%
	RT022-RW005	57%
	RT023-RW005	26%
	RT024-RW005	92%
	RT025-RW005	85%
	RT026-RW006	58%
	RT027-RW006	85%
	RT028-RW006	72%
	RT029-RW006	68%
Kawasan Krajan Stasiun	RT038-RW009	68%
	RT039-RW009	100%

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Gambar 4. 13 Diagram Keteraturan Bangunan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian

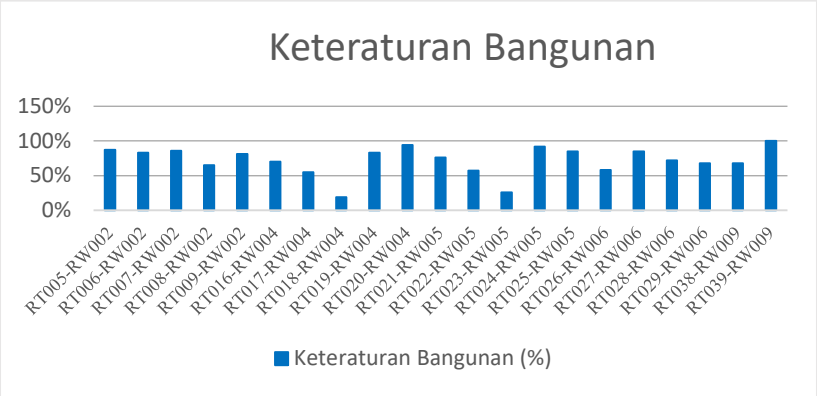

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Dari diagram diatas dapat disimpulan bahwa kawasan yang memiliki bangunan yang tidak teratur adalah Kawasan Krajan Pasar terutama pada RT018-RW004 yang hanya memiliki keteraturan bangunan sebesar 18%.

B. Kepadatan Bangunan

Kelurahan Krian memiliki kepadatan bangunan rata-rata sebesar 42,15 unit/ Ha. Beberapa kawasan yang memiliki tingkat kepadatan bangunan yang cukup tinggi ialah RT 18/RW4 (168,67 unit/ Ha) dan RT 25/ RW 5 (141,94 unit/Ha). Lebih jelasnya dapat dapat dilihat pada **Tabel 4.11** dan **Gambar 4.14**

Tabel 4. 11 Tingkat Kepadatan Bangunan

Kawasan Pemukiman Kumuh	RT-RW	Tingkat Kepadatan Bangunan (Unit/Ha)
Kawasan Gresikan	RT005-RW002	32.99
	RT006-RW002	84.09
	RT007-RW002	47.37
	RT008-RW002	27.87
	RT009-RW002	136.54
Kawasan Krajan Pasar	RT016-RW004	94.67
	RT017-RW004	116.67
	RT018-RW004	168.67
	RT019-RW004	112.90
	RT020-RW004	24.91
	RT021-RW005	57.45
	RT022-RW005	89.66
	RT023-RW005	53.97
	RT024-RW005	82.14
	RT025-RW005	141.94
	RT026-RW006	45.13
	RT027-RW006	106.06
	RT028-RW006	95.00
	RT029-RW006	79.66
Kawasan Krajan Stasiun	RT038-RW009	65.22
	RT039-RW009	30.89

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Gambar 4. 14 Diagram Kepadatan Bangunan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian

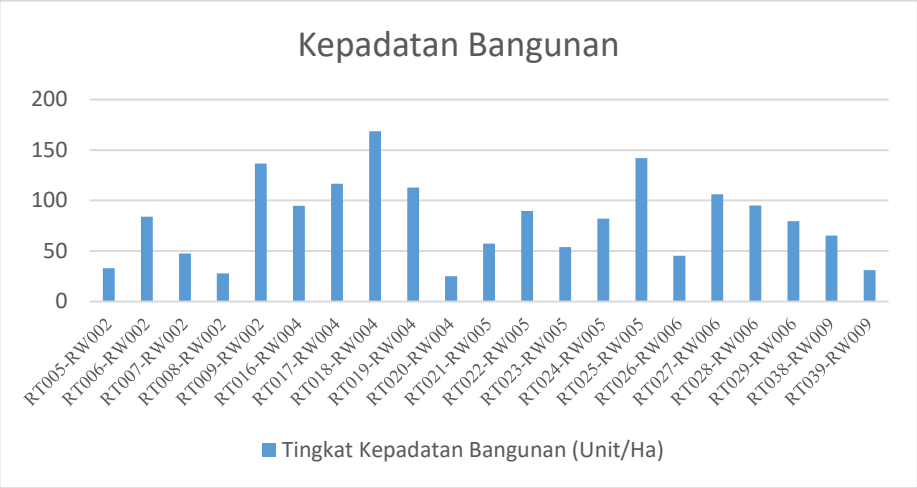

Sumber : Penulis, 2020

Dari diagram diatas terlihat bahwa kepadatan bangunan tertinggi didominasi pada Kawasan Krajan Pasar dimana kepadatan tertingginya berada RT018-RW004 yaitu sebesar 169 unit/Ha.

4.2.1.4 Fasilitas Umum

Keberadaan fasilitas umum yang terjangkau dengan lingkungan permukiman akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Fasilitas umum tesebut antara sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, dan RTH.

A. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang tersedia di Kelurahan Krian sudah cukup lengkap, dimana sarana yang tersedia sudah mencakup jenjang pendidikat dasar hinggat pendidikan atas. Sarana pendidian di Kelurahan Krian dapat dilihat pada **Tabel 4.12.** dan **Gambar 4.15**

Tabel 4. 12 Sarana Pendidikan di Kelurahan Krian

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	3
2	SD	6
3	SMP	3
4	SMA	3

Sumber : Kelurahan Krian dalam angka, 2020

Berdasarkan **Gambar 4.15** dapat terlihat bahwa seluruh kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan krian telah terjangkau oleh sarana pendidikan TK dan SD yang merupakan sarana pendidikan tingkat kelurahan.

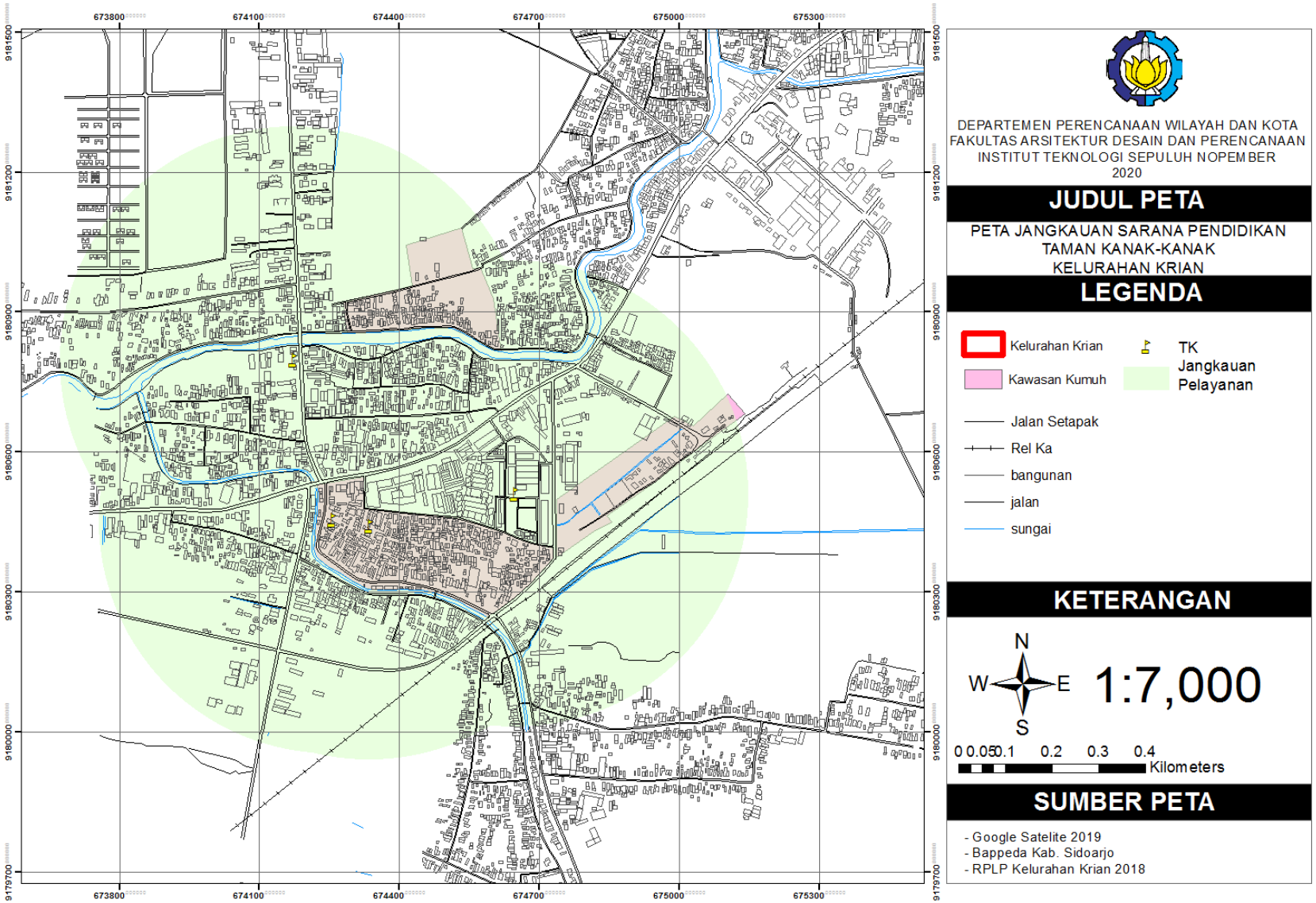

Gambar 4. 15 Peta Jangkauan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Kelurahan Krian

Sumber : Analisa Penulis, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

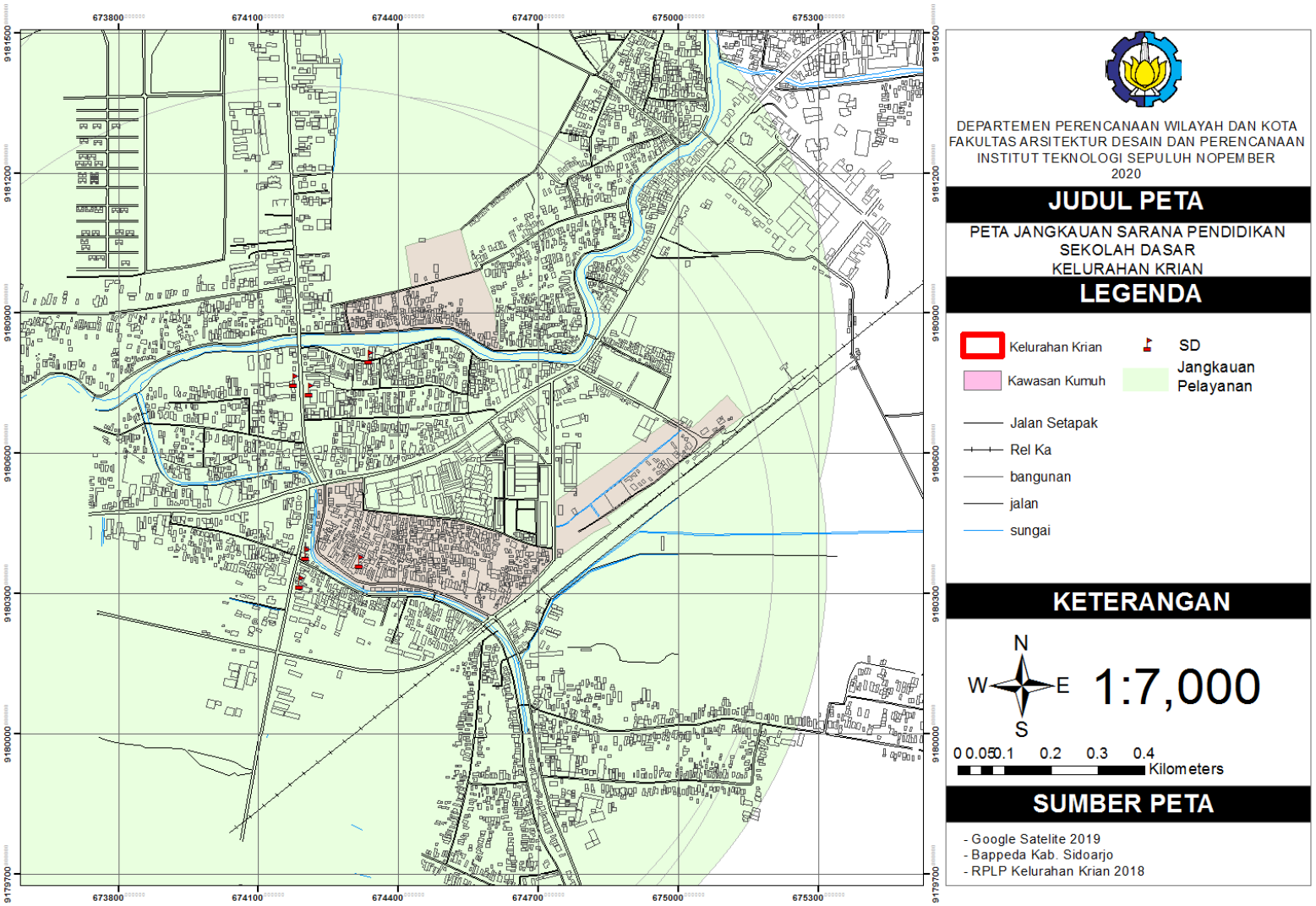

Gambar 4. 16 Peta Jangkauan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Kelurahan Krian

Sumber : Analisa Penulis, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

B. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang tersedia di Kelurahan Krian sudah cukup lengkap, dimana sarana yang tersedia sudah mencakup apotik, balai kesehatan ibu dan anak, puskesmas dan posyandu. Berikut data sarana kesehatan di Kelurahan Krian dapat dilihat pada **Tabel 4.13.**

Tabel 4. 13 Sarana Kesehatan di Kelurahan Krian

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Apotik	8
2	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	1
3	Puskesmas	1
4	Posyandu	9

Sumber : Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id

Ketersediaan sarana kesehatan di Kelurahan Krian cukup lengkap, dimana tiap RW di Kelurahan Krian telah tersedia posyandu serta adanya Puskesmas Krian yang cukup besar sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat Krian.

Gambar 4. 17 Sarana Kesehatan Puskesmas Kelurahan Krian

Sumber : Survei Primer, 2020

C. Sarana Perdagangan

Kelurahan Krian memiki sarana perdagangan berupa pasar tradisional. Pasar ini merupakan pasar dengan skala kecamatan sehinga memiliki ukuran yang cukup besar. Kelurahan Krian juga dilengkapi pertokoan di sepanjang jalan.

Gambar 4. 18 Sarana Perdagangan Kelurahan Krian

Sumber : Survei Primer, 2020

D. RTH

Keberadaan RTH di Kelurahan Krian terbilang cukup sedikit, hal ini dapat dilihat dari keberadaan RTH yang hanya berupa sebuah taman yaitu Taman Abhirupa di Kawasan Krajan Stasiun dan sebuah lapangan di Kawasan Gersikan dengan kondisi yang bercampur dengan pembuangan sampah masyarakat, sedangkan pada Kawasan Krajan Stasiun tidak ditemukan adanya RTH. RTH di Kawasan Krian juga ditemukan di sepanjang Jalan Raya Kemasan yaitu berupa pepohonan yang berada di sisi jalan, namun keberadaan pepohonan ini hanya ada di titik-titik tertentu saja.

Gambar 4. 19 Kondisi RTH Permukiman Kumuh Kelurahan Krian

Sumber : Survei Primer, 2020

4.2.1.5 Sarana dan Prasarana

A. Kondisi Jalan

Berdasarkan dokumen RPLP Kelurahan Krian, jalan lingkungan di Kelurahan Krian didominasi oleh kondisi yang layak/ diperkeras khususnya pada ruas jalan lingkungan dengan lebar > 1,5 meter yaitu sekitar 71% dari panjang keseluruhan. Rata-rata dari jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis adalah sebesar 52% sehingga kondisi ini mempengaruhi para pengguna jalan yang setiap hari melewati jalan tersebut. Berikut tabel kondisi jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis di permukiman kumuh Kelurahan Krian dapat dilihat pada **Tabel 4.14.** dan **Gambar 4.20**

Tabel 4. 14 Kondisi Jalan Permukiman Kumuh elurahan Krian

Kawasan Pemukiman Kumuh	RT-RW	Kesesuaian dengan Persyaratan Teknis (%)
Kawasan Gresikan	RT005-RW002	48%
	RT006-RW002	42%
	RT007-RW002	46%
	RT008-RW002	17%
	RT009-RW002	48%
Kawasan Krajan Pasar	RT016-RW004	43%
	RT017-RW004	49%
	RT018-RW004	20%
	RT019-RW004	47%
	RT020-RW004	21%
	RT021-RW005	51%
	RT022-RW005	0%
	RT023-RW005	84%
	RT024-RW005	16%
	RT025-RW005	19%
	RT026-RW006	39%
	RT027-RW006	56%
	RT028-RW006	38%
	RT029-RW006	42%
Kawasan Krajan Stasiun	RT038-RW009	33%
	RT039-RW009	41%

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Gambar 4. 20 Diagram Kondisi Jalan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Gambar 4. 21 Kondisi Jalan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian

Sumber : Survei Primer, 2020

Berdasarkan diagram diatas dapat terlihat bahwa kondisi jalan di permukiman kumuh Kelurahan Krian banyak tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Hal ini dapat terlihat dari kondisi jalan yang sesuai rata-rata di bawah 50%.

B. Drainase

Berdasarkan dokumen RPLP Kelurahan Krian tahun 2018, Beberapa kawasan di Kelurahan Krian yang rawan mengalami genangan/ banjir, khususnya saat terjadi hujan dengan tingkat intensitas sedang hingga tinggi, seperti Dusun Krajan Barat (RW 6), Krajan Tengah (RW 5), Krajan Timur (RW 6), dan Krajan Stasiun (RW 9).

Gambar 4. 22 Kondisi beberapa drainase di Kelurahan Krian

Sumber : Survei Primer, 2020

Kondisi tersebut terjadi akibat kondisi saluran drainase yang kurang memadai, misalnya; saluran drainase mengalami pendangkalan/ sedimentasi (tanah, pasir, sampah), penyempitan saluran drainase, belum adanya saluran drainase, saluran drainase yang tidak terkoneksi/ terhubung dengan saluran perngumpul, serta dimensi saluran drainase yang kurang memadai. Persentase kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman yang memiliki kualitas minimum memadai

di Kelurahan Krian dapat dilihat pada **Tabel 4.15.** dan **Gambar 4.23.**

Tabel 4. 15 Kondisi Drainase Permukiman Kumuh Kelurahan Krian

Kawasan Pemukiman Kumuh	RT-RW	Kondisi jaringan drainase yang memiliki kualitas minimum memadai (%)
Kawasan Gresikan	RT005-RW002	93%
	RT006-RW002	62%
	RT007-RW002	55%
	RT008-RW002	85%
	RT009-RW002	15%
Kawasan Krajan Pasar	RT016-RW004	65%
	RT017-RW004	83%
	RT018-RW004	81%
	RT019-RW004	76%
	RT020-RW004	76%
	RT021-RW005	80%
	RT022-RW005	0%
	RT023-RW005	76%
	RT024-RW005	23%
	RT025-RW005	40%
	RT026-RW006	35%
	RT027-RW006	78%
	RT028-RW006	83%
	RT029-RW006	88%
Kawasan Krajan Stasiun	RT038-RW009	33%
	RT039-RW009	25%

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Gambar 4. 23 Diagram Kondisi Drainase Permukiman Kumuh Kelurahan Krian

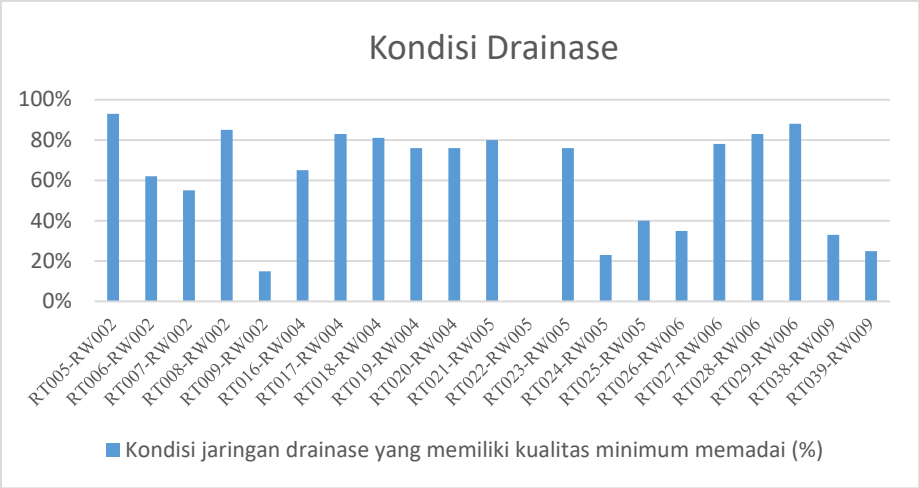

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Dari diagram diatas dapat terlihat bahwa kondisi drainase pada tiap kawasan masih ada yang memiliki kualitas dibawah kualitas minimum memadai. Terutama di kawasan Krajan Stasiun dimana seluruh kawasannya memiliki drainase dengan kualitas minimum memadai yang cukup rendah.

C. Sanitasi

Berdasarkan dokumen RPLP Kelurahan Krian tahun 2018 kondisi pengelolaan air limbah di Kelurahan Krian masih cukup banyak terdapat rumah tangga yang belum memiliki jamban pribadi serta tidak memiliki/terhubung dengan septicktank, seperti pada kawasan RW 2, 4, 5, 6, dan 9. Hal tersebut dikarenakan minimnya lahan pada kavling/ persil rumah. Selama ini, warga yang tidak memiliki WC/septicktank pribadi memanfaatkan WC umum. Kondisi tersebut terjadi

pada kawasan RW 2 dan 9. Selain itu, warga yang berada di sekitar saluran sekunder/ tersier, memanfaatkan saluran sebagai tempat pembuangan limbah sanitasi yang bercampur dengan rumah tangga. Kondisi santasi di Kelurahan Krian dapat dilihat pada **Tabel 4.16.** dan **Gambar 4.25**

Gambar 4. 24 Kondisi Sanitasi di Kelurahan Krian

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Tabel 4. 16 Kondisi Sanitasi Permukiman Kumuh Kelurahan Krian

Kawasan Pemukiman Kumuh	RT-RW	Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (%)
Kawasan Gresikan	RT005-RW002	33%
	RT006-RW002	61%
	RT007-RW002	56%
	RT008-RW002	82%
	RT009-RW002	61%
Kawasan Krajan Pasar	RT016-RW004	85%
	RT017-RW004	97%
	RT018-RW004	97%
	RT019-RW004	98%

Kawasan Pemukiman Kumuh	RT-RW	Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (%)
	RT020-RW004	87%
	RT021-RW005	0%
	RT022-RW005	14%
	RT023-RW005	32%
	RT024-RW005	56%
	RT025-RW005	10%
	RT026-RW006	94%
	RT027-RW006	45%
	RT028-RW006	50%
	RT029-RW006	41%
Kawasan Krajan Stasiun	RT038-RW009	22%
	RT039-RW009	19%

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Gambar 4. 25 Diagram Kondisi Sanitasi Permukiman Kumuh Kelurahan Krian

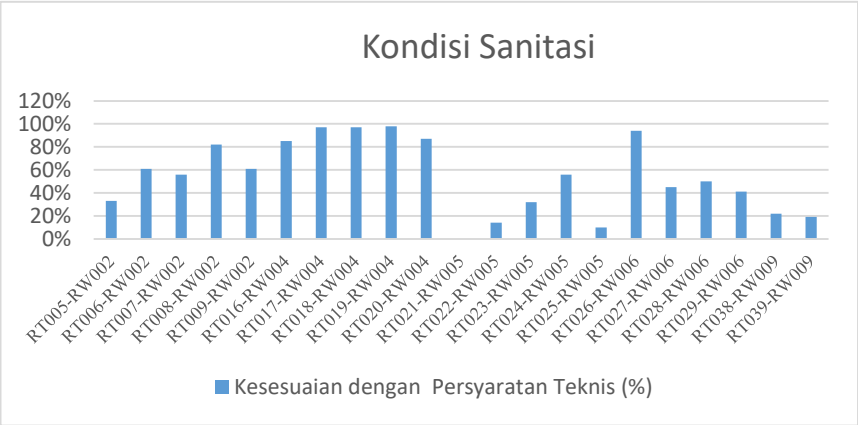

Sumber : Hasil analisa, 2020

Dari diagram diatas dapat terlihat bahwa kondisi sanitasi di tiap kawasan cukup rendah terutama pada kawasan Krajan Stasiun dan Krajan Pasar terutama pada RW 4,5,6 dan 9.

D. Persampahan

Berdasarkan dokumen RPLP Kelurahan Krian tahun 2018, sebagian besar kawasan permukiman pada kelurahan Krian masih belum terlayani oleh pengangkutan dan pengelolaan sampah yang memadai. Sarana utama pendukung persampahan belum tersedia, khususnya bak sampah, kendaraan pengangkut sampah, serta petugas kebersihan. Di sisi lain, masih terdapat warga yang membuang sampah pada sungai/ saluran serta pada lahan kosong yang terdapat pada lahan kosong sekitar permukiman. Kondisi persampahan tersebut dapat dilihat pada **Tabel 4.17.**

Gambar 4. 26 Kondisi Persampahan di Kelurahan Krian

Sumber : Survey primer, 2020

Tabel 4. 17 Kondisi Persampahan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian

Kawasan Pemukiman Kumuh	RT-RW	Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (%)
Kawasan Gresikan	RT005-RW002	0%
	RT006-RW002	0%
	RT007-RW002	0%
	RT008-RW002	0%
	RT009-RW002	0%
Kawasan Krajan Pasar	RT016-RW004	0%
	RT017-RW004	0%
	RT018-RW004	0%
	RT019-RW004	0%
	RT020-RW004	0%
	RT021-RW005	0%
	RT022-RW005	0%
	RT023-RW005	0%
	RT024-RW005	0%
	RT025-RW005	0%
	RT026-RW006	0%
	RT027-RW006	0%
	RT028-RW006	0%
	RT029-RW006	0%
Kawasan Krajan Stasiun	RT038-RW009	0%
	RT039-RW009	0%

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Dari tabel diatas dapat terlihat, bahwa ditiap kawasan belum memiliki adanya sistem persampahan yang memungkinkan adanya pengangkutan sampah domestic ke TPS atau TPA

E. Air Minum dan Air Bersih

Berdasarkan dokumen RPLP Kelurahan Krian tahun 2018, elayanan sarana air untuk keperluan minum, mandi, dan cuci (perpipaan ataupun non perpipaan) Kelurahan Krian cukup layak. Kondisi tersebut terlihat dari prosentase rumah tangga yang terlayani sarana air minum yaitu sekitar 63%. Sebagian besar rumah tangga memanfaatkan air yang berasal dari sumur bor untuk keperluan konsumsi, seperti; minum dan memasak. Selain itu, terdapat sebagian rumah tangga yang memanfaatkan sumber air PDAM dan air isi ulang (galon) sebagai sumber air minum. Sedangkankan untuk keperluan non konsumsi, sebagian besar masyrakat memanfaatkan air dari sumur bor dan sumur gali, misalnya; mencuci, mandi, dll. Di sisi lain, terdapat beberapa rumah tangga yang tidak memiliki sumber air minum/ air bersih untuk keperluan sehari-hari. Beberapa rumah tangga tersebut memanfaatkan (sharing) sumber air dari sumur tetangga terdekat.

Saat terjadi genangan/ banjir pada kawasan permukiman, kondisi air sumur gali mengalami perubahan, seperti berbau dan berwarna. Kondisi tersebut terkait dengan kondisi air permukaan yang tercemar oleh air limpasan/ genangan. Sedangkan kondisi air sumur bor masih layak/ memadai untuk konsumsi. Kondisi air bersihh dan air minum dapat dilihat pada **Tabel 4.18.** dan **Gambar 4.28.**

Gambar 4. 27 Kondisi Air Bersih dan Air Minum di Kelurahan Krian

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Tabel 4. 18 Kondisi Air Bersih dan Air Minum Permukiman Kumuh Kelurahan Krian

Kawasan Pemukiman Kumuh	RT-RW	Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) (%)
Kawasan Gresikan	RT005-RW002	100%
	RT006-RW002	100%
	RT007-RW002	91%
	RT008-RW002	88%
	RT009-RW002	100%
Kawasan Krajan Pasar	RT016-RW004	97%
	RT017-RW004	100%
	RT018-RW004	97%
	RT019-RW004	100%
	RT020-RW004	100%
	RT021-RW005	100%
	RT022-RW005	90%
	RT023-RW005	100%
	RT024-RW005	100%
	RT025-RW005	95%
	RT026-RW006	100%

Kawasan Pemukiman Kumuh	RT-RW	Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) (%)
	RT027-RW006	100%
	RT028-RW006	100%
	RT029-RW006	100%
Kawasan Krajan Stasiun	RT038-RW009	100%
	RT039-RW009	100%

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Gambar 4. 28 Diagram Air Bersih dan Air Minum Permukiman Kumuh Kelurahan Krian

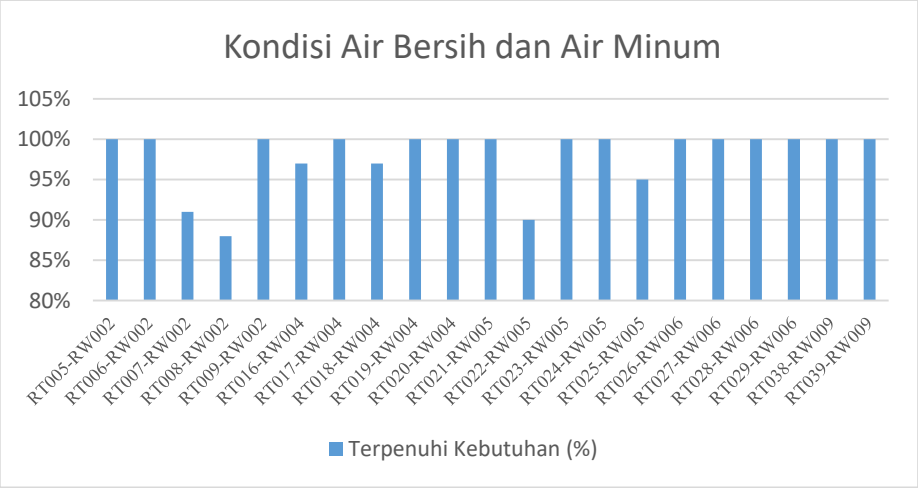

Sumber : Hasil analisa, 2020

Dari tabel diatas dapat terlihat, bahwa ditiap kawasan sudah banyak yang terpenuhi kebutuan akan air minum dan air bersihnya, namun masih ada beberapa RT di Kawasan

Gresikan dan Krajan Pasar yang masih belum terpenuhi kebutuhannya air bersih dan air minum

F. Kondisi Proteksi Kebakaran

Berdasarkan dokumen RPLP Kelurahan Krian tahun 2018, kawasan permukiman belum tersedia prasarana kebakaran, seperti hidran, APAR, pompa, selang pemadam, dll. Kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kebakaran. Kondisi tersebut terkait dengan belum tersedia prasarana kebakaran serta aksesbilitas yang kurang memadai (lebar jalan lingkungan 1-2 meter/ gang sempit). Berikut ketersediaan proteksi kebakaran di Kelurahan Krian dapat dilihat pada **Tabel 4.19.**

Tabel 4. 19 Kondisi Persampahan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian

Kawasan Pemukiman Kumuh	RT-RW	Kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana proteksi kebakaran (%)
Kawasan Gresikan	RT005-RW002	0%
	RT006-RW002	0%
	RT007-RW002	0%
	RT008-RW002	0%
	RT009-RW002	0%
Kawasan Krajan Pasar	RT016-RW004	0%
	RT017-RW004	0%
	RT018-RW004	0%
	RT019-RW004	0%
	RT020-RW004	0%

Kawasan Pemukiman Kumuh	RT-RW	Kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana proteksi kebakaran (%)
	RT021-RW005	0%
	RT022-RW005	0%
	RT023-RW005	0%
	RT024-RW005	0%
	RT025-RW005	0%
	RT026-RW006	0%
	RT027-RW006	0%
	RT028-RW006	0%
	RT029-RW006	0%
Kawasan Krajan Stasiun	RT038-RW009	0%
	RT039-RW009	0%

Sumber : RPLP Kelurahan Krian, 2018

Dari tabel diatas dapat terlihat, bahwa ditiap kawasan belum memiliki adanya sarana dan prasaran untuk mengatasi kebakaran.

Dari penjabaran karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Krian dapat disimpulkan berdasarkan karakteristik tiap kawasan. Karakteristik tiap kawasan tersebut dapat dilihat pada **Tabel 4.20**

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Tabel 4. 20
Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian

Aspek	Kawasan Gersikan	Kawasan Krajan Pasar	Kawasan Krajan Stasiun
Kondisi bangunan	Terdapat bangunan rumah tidak memenuhi syarat teknis (RTLH) serta masih terdapat bangunan yang belum teratur terutama pada sepadan sungai	Terdapat bangunan rumah tidak memenuhi syarat teknis (RTLH) serta masih terdapat bangunan yang belum teratur	Terdapat bangunan rumah tidak memenuhi syarat teknis (RTLH) serta masih terdapat bangunan yang belum teratur terutama pada permukiman di sepadan rel.
Kepadatan bangunan	Kepadatan bangunan tinggi di beberapa RT (kepadatan hingga 100 unit/HA)	Kepadatan bangunan tinggi di beberapa RT (kepadatan hingga 100 unit/HA)	Kepadatan bangunan cukup tinggi, dan berdiri di sekitar saluran
Kondisi Jalan lingkungan	Kondisi jalan masih banyak yang belum memenuhi persyaratan teknis seperti jalan rusak.	Kondisi jalan masih banyak yang belum memenuhi persyaratan teknis. Masih ada jalan	Kondisi jalan masih banyak yang belum memenuhi persyaratan teknis

Aspek	Kawasan Gersikan	Kawasan Krajan Pasar	Kawasan Krajan Stasiun
	Masih ada jalan yang belum memiliki sarana jalan yang cukup	yang belum memiliki sarana jalan yang cukup	
Drainase	Masih terdapat drainase lingkungan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis (akibat pendangkalan dan tersumbat sampah)	Masih terdapat drainase lingkungan yang tidak sesuai dengan persyaratn teknis (akibat pendangkalan dan tersumbat sampah)	Masih terdapat drainase lingkungan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis (akibat pendangkalan dan tersumbat sampah)
Air bersih dan Air Minum	Pelayanan air minum sudah baik, namun masih terdapat masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan air minum, mandi, dan cuci	Pelayanan air minum sudah baik, namun masih terdapat masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan air minum, mandi, dan cuci	Pelayanan air minum sudah baik
Sanitasi	Masih banyak masyarakat yang belum	Masih banyak masyarakat yang belum memiliki	Masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban

Aspek	Kawasan Gersikan	Kawasan Krajan Pasar	Kawasan Krajan Stasiun
	memiliki jamban keluarga/bersama yang sesuai dengan persyaratan teknis, saluran pembuangan limbah rumah tangga masih menyatu dengan saluran drainase	jamban keluarga/bersama yang sesuai dengan persyaratan teknis, saluran pembuangan limbah rumah tangga masih menyatu dengan saluran drainase	keluarga/bersama yang sesuai dengan persyaratan teknis, saluran pembuangan limbah rumah tangga masih menyatu dengan saluran drainase
Persampahan	Belum terlayani sistem persampahan yang baik, dan belum tersedianya TPS. Masih ada yang membuang sampah disungai	Belum terlayani sistem persampahan yang baik, dan belum tersedianya TPS	Belum terlayani sistem persampahan yang baik, dan belum tersedianya TPS. Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di selokan.
Proteksi bencana	Belum terdapat adanya sarana/prasarana untuk proteksi kebakaran	Belum terdapat adanya sarana/prasarana untuk proteksi kebakaran	Belum terdapat adanya sarana/prasarana untuk proteksi kebakaran

Aspek	Kawasan Gersikan	Kawasan Krajan Pasar	Kawasan Krajan Stasiun
Kedekatan dengan kawasan industri	Berjarak kurang dari 2KM dari kawasan industri	Berjarak kurang dari 2KM dari kawasan industri	Berjarak kurang dari 2KM dari kawasan industri
Kemudahan dalam memperoleh transportasi	Belum terlayani oleh transportasi umum	Belum terlayani oleh transportasi umum	Belum terlayani oleh transportasi umum
Kesehatan	Sudah tercakup layanan kesehatan berupa posyandu dan puskesmas	Sudah tercakup layanan kesehatan berupa posyandu dan puskesmas	Sudah tercakup layanan kesehatan berupa posyandu dan puskesmas
Pendidikan	Sudah tercakup layanan pendidikan berupa TK dan SD	Sudah tercakup layanan pendidikan berupa TK dan SD	Sudah tercakup layanan pendidikan berupa TK dan SD
Perdagangan	Sudah tercakup sarana perdagangan berupa Pasar Krian	Sudah tercakup sarana perdagangan berupa Pasar Krian	Sudah tercakup layanan perdagangan

Aspek	Kawasan Gersikan	Kawasan Krajan Pasar	Kawasan Krajan Stasiun
RTH	Ketersediaan RTH (khususnya RTH Privat) sangat minim, RTH yang ada yaitu berupa lapangan digunakan untuk tempat pembuangan sampah	Ketersediaan RTH (khususnya RTH Privat) sangat minim	Terdapat sebuah taman, yaitu Taman Abhirupa
Jenis Mata Pencaharian	Mayoritas penduduk pada Kelurahan Krian bekerja sebagai wiraswasta dan karyawan pegawai swasta	Mayoritas penduduk pada Kelurahan Krian bekerja sebagai wiraswasta dan karyawan pegawai swasta	Mayoritas penduduk pada Kelurahan Krian bekerja sebagai wiraswasta dan karyawan pegawai swasta

Sumber : Hasil analisis, 2020

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

4.2.2 Analisa Kebijakan Tata Ruang dan Permukiman

. Pada tahapa ini, dilakukan *content analysis* pada dokumen perencanaan tata ruang dan dokumen perencanaan permukiman yang terkait untuk mengetahai kebijakan apa saja yang telah dibuat pemerintah untuk menangani pemukiman kumuh. Kebijakan yang akan digunakan yaitu dokumen RP3KP Kabupaten Sidoarjo, RP2KPKP Kabupaten Sidoarjo, dan RPLP Kelurahan Krian.

4.2.1.6 Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sidoarjo

Adapun rencana pengembangan kawasan permukiman dalam bentuk program/ kegiatan penanganan dan rencana teknis peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dilakukan di wilayah studi dalam Dokumen Pengembangan Kawasan Permukiman dalam Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada **Tabel 4.21**

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Tabel 4. 21
Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan RP3KP Kabupaten Sidoarjo

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Kondisi bangunan (V1)	**Penataan dan perbaikan lingkungan** kampung	V1.1	Penataan dan perbaikan lingkungan	Melakukan perbaikan dan penataan lingkungan
Kepadatan bangunan (V2)	Pembangunan perumahan dan permukiman berupa **penataan kawasan padat dan kumuh** di Kabupaten Sidoarjo diarahkan pada kawasan perumahan kampung, baik yang secara administratif berijin (legal), maupun pada yang tidak berijin (ilegal).	V2.1	Penataaan kawasan padat	Melakukan penataan kawasan padat dan kumuh

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Dengan status, dan karakteristik fisik dan sosial yang berbeda, maka penanganan atau penataan pada setiap kawasan tersebut bisa berbeda.			
Kondisi Jalan lingkungan (V3)	Rencana **peningkatan fungsi dan kualitas jaringan jalan** yang ada, dimaksudkan untuk menambah kelancaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Rencana peningkatan ini meliputi kegiatan peningkatan daya dukung perkerasan, pelebaran	V3.1	peningkatan fungsi dan kualitas jaringan jalan	Melakukan penigkatan fungsi dan kualitas jaingan jalan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	jalan, pengaspalan perkerasan jalan ataupun pelapisan ulang perkerasan jalan.			
	Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan kabupaten ditekankan pada **peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan**	V3.2	Menyediakan sarana dan prasarana dasar	Menyediakan sarana dan prasarana dasar
	Pembangunan permukiman yang terpadu dengan **pengembangan sarana dan prasarana kota**	V3.3	Mengembangkan sarana dan prasarana kota	Menyediakan sarana dan prasarana dasar

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Mewujudkan **ketersediaan sarana dan prasarana dasar**	V3.4	Menyediakan sarana dan prasarana dasar	Menyediakan sarana dan prasarana dasar
	Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial	V3.5	Peningkatan jalan dengan perkerasan	Melakukan penigkatan fungsi dan kualitas jaringan jalan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan Lingkungan (PLP), dan lain-lain. Program tersebut antara lain berupa **peningkatan (perkerasan) jalan (pavingisasi)**, pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih), perbaikan bangunan rumah, perbaikan saluran drainase, perbaikan atau penyediaan			

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain.			
Drainase (V4)	Mewujudkan **ketersediaan sarana dan prasarana dasar**	V4.1	Menyediakan sarana dan prasarana dasar	Menyediakan prasarana dan sarana perumahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan
	Mengoptimalkan sistem pengelolaan pengendalian banjir untuk mengurangi luas genangan dan lamanya genangan	V4.2	Pengoptimalan sistem pengelolaan pengendalian banjir	Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pengendalan banjir
	Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan	V4.3	perbaikan saluran drainase	Melakukan penanganan,

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan			normalisasi, dan pengembangan drainase serta prasarana dan sarana penunjang

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Lingkungan (PLP), dan lain-lain. Program tersebut antara lain berupa peningkatan (perkerasan) jalan (pavingisasi), pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih), perbaikan bangunan rumah**, perbaikan saluran drainase**, perbaikan atau penyediaan sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain.			

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Air bersih dan Air Minum (V5)	Mewujudkan **ketersediaan sarana dan prasarana dasar**	V5.1	Menyediakan sarana dan prasarana dasar	Membenahi prasarana dan sarana perumahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan
	Meningkatkan kualitas dan kecukupan penyediaan air bersih yang layak dan memenuhi standar sebagai air sehat	V5.2	Meningkatkan kualitas dan kecukupan penyediaan air bersih	Peningkatan kualitas dan penyediaan air bersih
	Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian.	V5.3	Pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan	Peningkatan kualitas dan penyediaan air bersih

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan Lingkungan (PLP), dan lain-lain. Program tersebut antara lain berupa peningkatan			

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	(perkerasan) jalan (pavingisasi), **pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih)**, perbaikan bangunan rumah, perbaikan saluran drainase, perbaikan atau penyediaan sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain.			
Sanitasi (V6)	Mewujudkan **ketersediaan sarana dan prasarana dasar**	V6.1	Menyediakan sarana dan prasarana dasar	Perlunya penyediaan sarana dan prasarana dasar
	Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan	V6.2	Pembangunan dan perbaikan	Melakukan pembangunan dan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan		prasarana sanitasi lingkungan	perbaikan prasarana sanitasi

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Lingkungan (PLP), dan lain-lain. Program tersebut antara lain berupa peningkatan (perkerasan) jalan (pavingisasi), **pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih)**, perbaikan bangunan rumah, perbaikan saluran drainase, perbaikan atau penyediaan sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain.			

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Persampahan (V7)	Mewujudkan **ketersediaan sarana dan prasarana dasar**	V7.1	Ketersediaan sarana dan prasarana dasar	Menyediakan sarana dan prasarana dasar
	Peningkatan sistem pengelolaan sampah	V7.2	Peningkatan sistem pengelolaan sampah	Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sampah
	Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh	V7.3	Pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan	Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sampah

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan Lingkungan (PLP), dan lain-lain. Program tersebut antara lain berupa peningkatan (perkerasan) jalan (pavingisasi), **pembangunan dan perbaikan prasarana**			

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih), perbaikan bangunan rumah, perbaikan saluran drainase, perbaikan atau penyediaan sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain.			
Proteksi bencana (V8)	Mewujudkan **ketersediaan sarana dan prasarana dasar**	V8.1	Menyediakan sarana dan prasarana dasar	Perlunya penyediaan sarana dan prasarana dasar
	Arahan penanganan terhadap kawasan padat dan kumuh rawan bencana kebakaran mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan	V8.2	Arahan penanganan terhadap kawasan padat dan kumuh	Arahan penanganan terhadap kawasan padat dan kumuh rawan bencana kebakaran melalui

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Umum tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan-bangunan gedung, dan Petunjuk Pencegahan Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidoarjo. Penanganan tersebut dapat dilakukan **melalui upaya pencegahan kebakaran pada lingkup lingkungan, lingkup tapak dan lingkup bangunan**.		rawan bencana kebakaran	upaya pencegahan kebakaran pada lingkup lingkungan, lingkup tapak dan lingkup bangunan.

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Pada lingkungan perumahan **perlu disediakan akses berupa gang kebakaran atau jalur jalan kaki** untuk memudahkan petugas penangggulangan kebakaran.	V8.3	Perlu disediakan akses berupa gang kebakaran atau jalur jalan kaki	Menyediakan jalur evakuasi bencana kebakaran
	Penyediaan jalan akses mobil PMK yang dapat berupa jalan lingkungan yang lebar ROW dan perkerasannya dapat diakses dan mampu menahan beban berat mobil PMK. Selain itu lokasi jalan akses ini juga memungkinkan mobil PMK	V8.4	Penyediaan jalan akses mobil PMK	Menyediakan jalur evakuasi bencana kebakaran

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	dapat mencapai lokasi kebakaran atau setidaknya pipa pemadam dapat menjangkau titik kebakaran.			
	Lingkungan perumahan padat perlu dilengkapi hidran kebakaran umum (dialiri air dengan kapasitas air 1000 liter per menit) atau sumur gali (reservoir kebakaran).	V8.5	Lingkungan perumahan padat perlu dilengkapi hidran kebakaran umum	Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Kedekatan dengan kawasan industri (V9)	Arahan **pembangunan/ penyediaan** lahan untuk **RUSUNAWA** untuk **pekerja**	V9.1	Pembangunan/ penyediaan lahan untuk RUSUNAWA	Pembangunan atau penyediaan lahan untuk RUSUNAWA yang

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	atau Mess pada kawasan industri (industri estate).		untuk pekerja atau Mess	diperuntukan bagi pekerja
Kesehatan (V11)	Pembangunan permukiman yang terpadu dengan **pengembangan sarana dan prasarana kota**	V11.1	Pengembangan sarana dan prasarana kota	Mengembangkan sarana dan prasarana kota
Pendidikan (V12)	Pembangunan permukiman yang terpadu dengan **pengembangan sarana dan prasarana kota**	V12.1	Pengembangan sarana dan prasarana kota	Mengembangkan sarana dan prasarana kota
Perdagangan (V13)	Pembangunan permukiman yang terpadu dengan **pengembangan sarana dan prasarana kota**	V13.1	pengembangan sarana dan prasarana kota	Mengembangkan sarana dan prasarana kota

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
RTH (V14)	**Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau** untuk kawasan perkotaan ditetapkan dan diupayakan secara bertahap **sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah perkotaan, yang terdiri dari ruang Terbuka Hijau publik (20 %) dan Ruang Terbuka Hijau privat (10%).** Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan, sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem	V14.1	Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah perkotaan, yang terdiri dari ruang Terbuka Hijau publik (20 %) dan Ruang Terbuka Hijau privat (10%).	Menyediakan RTH sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10 RTH privat

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.			
	Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau	V14.2	Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau	Meninngkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau
	Optimalisasi fungsi RTH sebagai fungsi ekologi (penyerapan air)	V14.3	Optimalisasi fungsi RTH sebagai fungsi ekologi	RTH dioptimalkan sebagai fungsi ekologi

Sumber : Hasil analisis, 2020

Pada hasil analisa konten pada dokumen RP3KP Kabupaten Sidoarjo tersebut dapat terlihat bahwa dokumen kebijakan tersebut telah memuat variable yang ada, kecuali variabel kemudahan memperoleh transportasi dan variabel jenis pekerjaan.

4.2.1.7 Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kabupaten Sidoarjo

Berikut rencana penanganan dalam bentuk program/ kegiatan penanganan dan rencana teknis peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dilakukan di wilayah studi dalam Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada **Tabel 4.22**

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Tabel 4. 22
Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan RP2KPKP Kabupaten Sidoarjo

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Kondisi bangunan (V1)	**Memperbaiki rumah dan lingkungan permukiman yang layak huni**	V1.1	Perbaikan rumah dan lingkungan permukiman	Melakukan perbaikan dan penataan lingkungan
Kepadatan bangunan (V2)	**Penyediaan infrastruktur yang memadai** pada **permukiman padat**	V2.1	Penyediaan infrastruktur yang memadai	Menyediakan infrastruktur yang memadai di permukiman padat
Kondisi Jalan lingkungan (V3)	**Peningkatan kondisi dan kualitas jalan utama dan lingkungan**	V3.1	Peningkatan fungsi dan kualitas jaringan jalan	Meningkatkan fungsi dan kualitas jalan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Drainase (V4)	**Penanganan, normalisasi dan pengembangan drainase** dengan pendekatan sistem	V4.1	Penanganan, normalisasi dan pengembangan drainase	Melakukan penanganan, normalisasi, dan pengembangan drainase serta prasarana dan sarana penunjang
Air bersih dan Air Minum (V5)	**Pengembangan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum** pada daerah terdapat MBR.	V5.1	Pengembangan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum	Mengembangkan jaringan perpipaan PDAM dan hidran uumum
	Menyediakan air bersih sampai tingkat perdesaan dengan memanfaatkan dan pengolahan sumber air baku yang ada	V5.2	Penyediaan air bersih	Peningkatan kualitas dan penyediaan air bersih

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Peningkatan pelayanan air minum melalui pipanisasi baru	V5.3	Peningkatan pelayanan air minum	Meningkatkan pelayanan air minum
	Melindungi terhadap sumber air dan daerah resapan air	V5.4	Melindungi sumber air dan daerah resapan air	Melindungi sumber air dan daerah resapan air
Sanitasi (V6)	**Pembangunan sarana sanitasi** yang memadai di masing - masing rumah	V6.1	Pembangunan sarana sanitasi	Melakukan pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi
	Penyediaan IPAL/septictank komunal untuk menjaga kualitas air tanah	V6.2	Penyediaan IPAL/septictank komunal	Melakukan pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Persampahan (V7)	**Penyediaan TPST, Armada angkut sampah, kelembagaan, Pelatihan pengelolaan sampah**;	V7.1	Penyediaan TPST, Armada angkut sampah, kelembagaan, dan pelatihan pengelolaan sampah	Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sampah
	Membangun TPST 3R dan membentuk KSM pengelola sampah melalui pendampingan peningkatan capacity bulding yang berkelanjutan	V7.2	Membangun TPST 3R dan membentuk KSM pengelola sampah	Membanguun TPST 3R dan membentuk KSM Pengelola sampah
	Meningkatkan teknologi pengolahan sampah melalui pengkomposan sampah organik,	V7.3	Meningkatkan teknologi pengolahan sampah	Meningkatkan teknologi pengolahan sampah melalui

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	teknologi daur ulang sampah non organic dengan prinsip 3R			pengkomposan, dan teknologi daur ulang sampah non organik dengan 3R
Proteksi bencana (V8)	**Pengembangan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum pada daerah terdapat MBR**	V8.1	Pengembangan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum	Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Kesehatan (V11)	Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan **penyediaan infrastruktur yang memadai** dan harus menghindari pola enclove	V11.1	Penyediaan infrastruktur yang memadai	Mengembangkan sarana dan prasarana kota

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Pendidikan (V12)	Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan **penyediaan infrastruktur yang memadai** dan harus menghindari pola enclove	V12.1	Penyediaan infrastruktur yang memadai	Mengembangkan sarana dan prasarana kota
Perdagangan (V13)	Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan **penyediaan infrastruktur yang memadai** dan harus menghindari pola enclove	V13.1	Penyediaan infrastruktur yang memadai	Mengembangkan sarana dan prasarana kota
RTH (V14)	**Pengembangan jalur hijau dan Penghijauan** di lingkungan permukiman.	V14.1	Pengembangan jalur hijau dan penghijauan	Meninngkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Penyediaan RTH taman tematik di lahan kosong (DAS)	V14.2	Penyediaan RTH taman tematik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau

Sumber : Hasil analisis, 2020

“*Halaman ini sengaja dikosongkan”*

Pada hasil analisa konten pada dokumen RP2KPKP Kabupaten Sidoarjo tersebut dapat terlihat bahwa dokumen kebijakan tersebut telah memuat variable yang ada, kecuali variabel kedekatan dengan kawasan industri, dan kemudahan memperoleh transportasi serta variabel jenis pekerjaan.

4.2.1.8 Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam Rencana Pencegahan dan Penigkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kabupaten Sidoarjo

Berikut rencana penanganan dalam bentuk program/ kegiatan penanganan dan rencana teknis peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dilakukan di wilayah studi dalam Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Krian dapat dilihat pada **Tabel 4.21**

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Tabel 4. 23
Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan RPLP Kelurahan Krian

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Kondisi bangunan (V1)	Pembangunan perumahan / permukiman di Kabupaten Sidoarjo diarahkan dalam rangka **mewujudkan** suatu kondisi lingkungan **kawasan perumahan/permukiman yang layak huni**, indah, aman, nyaman dan asri dengan memperhatikan kelayakan teknis, lingkungan, sosial dan ekonomis yang dapat	V1.1	Mewujudkan kawasan perumahan/permukiman yang layak huni	Melakukan perbaikan dan penataan lingkungan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	meminimalkan timbulnya dampak-dampak negatif			
	Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada **peningkatan kualitas lingkungan**, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.	V1.2	Peningkatan kualitas lingkungan	Melakukan perbaikan dan penataan lingkungan
	Kebijakan **penanganan bangunan permanen dan semi permanen** • Meningkatkan kualitas bangunan perumahan	V1.3	Penanganan bangunan permanen dan semi permanen	Meningkatkan kualitas bangunan perumahan dan mengatur secara tegas terhadap izin pendirian rumah

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	• Mengatur secara tegas terhadap izin pendirian rumah • Meningkatkan luasan RTH publik dan privat. • Menjaga dan memantapkan pola pengadaan perumahan dan permukiman			
Kepadatan bangunan (V2)	Pembangunan **perumahan secara vertikal** dilakukan dengan **pembangunan rumah susun baik pada kawasan perumahan baru, maupun kawasan padat**	V2.1	Pembangunan perumahan secara vertical pada kawasan padat hunian	Membangun perumahan secara vertikal pada kawasan perumahan baru, maupun kawasan padat hunian

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	hunian yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya			
Kondisi Jalan lingkungan (V3)	Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan **pembenahan prasarana dan sarana perumahan**.	V3.1	Pembenahan prasarana dan sarana perumahan	Menyediakan sarana dan prasarana dasar
	Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib **menyediakan**	V3.2	Penyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial	Menyediakan sarana dan prasarana dasar

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah			
	• **Perbaikan jalan rusak** • **Peningkatan perkerasan jalan dengan pavingisasi**	V3.3	Perbaikan jalan rusak, pavingisasi, penyediaan fasilitas pelengkap jalan	Melakukan penigkatan fungsi dan kualitas jaringan jalan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	• **Penyediaan fasilitas pelengkap jalan seperti PJU**			
Drainase (V4)	Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan **pembenahan prasarana dan sarana perumahan**.	V4.1	Pembenahan prasarana dan sarana perumahan	Menyediakan sarana dan prasarana dasar
	Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib **menyediakan**	V4.2	Penyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial	Menyediakan sarana dan prasarana dasar

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah			
	Peningkatan dan optimalisasi fungsi saluran pematusan dan lokasi penampungan air yang telah ada yang disertai dengan **penyediaan prasarana**	V4.3	Peningkatan dan optimalisasi saluran pematusan dan penampungan air, dan penyediaan prasarana dan sarana penunjang	Melakukan penanganan, normalisasi, dan pengembangan drainase serta prasarana dan sarana penunjang

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	dan sarana penunjang yang dapat meningkatkan kinerja saluran pematusan			
	Pembangunan saluran pematusan dan lokasi penampungan air baru terutama pada kawasan – kawasan pertumbuhan baru yang diintegrasikan dengan sistem saluran yang telah ada	V4.4	Pembangunan saluran pematusan dan lokasi penampungan air baru	Melakukan penanganan, normalisasi, dan pengembangan drainase serta prasarana dan sarana penunjang
	Peningkatan dan pembangunan saluran pematusan disertai dengan upaya pengawasan terhadap pembangunan	V4.5	Peningkatkan, pembangunan saluran pematusan	Melakukan penanganan, normalisasi, dan pengembangan drainase serta prasarana dan sarana penunjang

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	dan pemanfaatan lahan di sekitar saluran pematusan, serta upaya untuk pemeliharaan dan menjaga kebersihan saluran			
Air bersih dan Air Minum (V5)	Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan **pembenahan prasarana dan sarana perumahan**.	V5.1	Pembenahan prasarana dan sarana perumahan	Membenahi prasarana dan sarana perumahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib **menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan**, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah	V5.2	Penyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial	Membenahi prasarana dan sarana perumahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan
Sanitasi (V6)	Pengembangan lokasi perumahan lama dan	V6.1	Pembenahan prasarana dan sarana perumahan	Menyediakan sarana dan prasarana dasar

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan **pembenahan prasarana dan sarana perumahan**.			
	Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib **menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari**	V6.2	Penyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial	Menyediakan sarana dan prasarana dasar

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah			
	Pelayanan minimal sistem **pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat** agar tidak mencemari daerah	V6.3	Pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja	Pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	tangkapan air/resapan air baku. Sistem pembuangan air limbah setempat diperuntukkan bagi orang perseorangan/rumah tangga. Sedangkan Sistem pembuangan air limbah terpusat diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.			

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	1) Hasil pengolahan air limbah terpusat meliputi bentuk cairan dan padatan. 2) Kualitas hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan wajib memperhatikan standar baku mutu air buangan dan baku mutu sumber air baku yang mencakup syarat fisik, kimia, dan bakteriologi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.			

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	3) Hasil pengolahan air limbah yang berbentuk padatan dan sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali wajib diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan.			
Persampahan (V7)	Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas	V7.1	Pembenahan prasarana dan sarana perumahan	Menyediakan sarana dan prasarana dasar

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	lingkungan, dan **pembenahan prasarana dan sarana perumahan**.			
	Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib **menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan**, dan	V7.2	Penyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial	Menyediakan sarana dan prasarana dasar

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah			
	Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/ persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan **penyediaan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS)** yang tersebar pada wilayah SSWP di sekitar kawasan perumahan sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan	V7.3	Penyediaan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS)	Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sampah
	Pembangunan LPS dapat dilakukan pada lahan-	V7.4	Pembangunan LPS	Melakukan pembangunan dan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	lahan yang direncanakan untuk fasilitas umum dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang penanganan dan pengelolaan sampah			perbaikan sarana dan prasarana sampah
	Upaya **pengelolaan sampah secara mandiri**	V7.5	Pengelolaan sampah secara mandiri	Mengolah sampah secara mandiri
	Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman (persampahan)	V7.6	Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman, meningkatkan rute dan sarana, meningkatkan rute dan sarana, penyediaan beberapa	Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sampah

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
			prasarana dan sarana pendukung TPST, penyedian prasarana dan sarana persampahan, pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	
	Meningkatkan rute dan sarana pengangkutan sampah	V7.7	Meningkatkan rute dan sarana pengangkutan sampah	Meningkatkan rute dan sarana pengangkutan sampah
	Penyediaan beberapa prasarana dan sarana pendukung TPST yang dibutuhkan ialah; alat pengangkut, incinerator (tungku pembakaran), pemilah	V7.8	Penyediaan beberapa prasarana dan sarana pendukung TPST	Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sampah

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	sampah, conveyor, karyawan/ petugas kebersihan, pagar, dll.			
	Penyedian prasarana dan sarana persampahan untuk masyarakat, baik dalam tingkat RT/ RW, seperti bak sampah, kendaraan pengangkut sampah, serta petugas kebersihan.	V7.9	Penyedian prasarana dan sarana persampahan	Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sampah
	Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R yaitu pengembangan	V7.10	Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	komposter di TPST serta pemisahan sampah organik non organik			
Proteksi bencana (V8)	Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan **pembenahan prasarana dan sarana perumahan**.	V8.1	Pembenahan prasarana dan sarana perumahan	Perlunya penyediaan sarana dan prasarana dasar
	Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib **menyediakan**	V8.2	Penyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial	Perlunya penyediaan sarana dan prasarana dasar

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah			
	Penambahan sarana dan prasarana proteksi kebakaran di lingkup RW Hydrant/APAR/Mini DAMKAR/Pawang Geni)	V8.3	Penambahan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	• **Pembuatan hydran/ sumur untuk proteksi kebakaran**	V8.4	Pembuatan hydran/ sumur	Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Kesehatan (V11)	Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan **pembenahan prasarana dan sarana perumahan**.	V11.1	Pembenahan prasarana dan sarana perumahan	Mengembangkan sarana dan prasarana kota
	Pada pembangunan perumahan real estate,	V11.2	Penyediakan prasarana lingkungan, utilitas	Mengembangkan sarana dan prasarana kota

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib **menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan**, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah		umum, dan fasilitas sosial	
Pendidikan (V12)	Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada	V12.1	Pembenahan prasarana dan sarana perumahan	Mengembangkan sarana dan prasarana kota

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	peningkatan kualitas lingkungan, dan **pembenahan prasarana dan sarana perumahan**.			
	Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib **menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan**, dan	V12.2	Penyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial	Mengembangkan sarana dan prasarana kota

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah			
Perdagangan (V13)	Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan **pembenahan prasarana dan sarana perumahan**.	V13.1	Pembenahan prasarana dan sarana perumahan	Mengembangkan sarana dan prasarana kota
	Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib **menyediakan**	V13.2	Penyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial	Mengembangkan sarana dan prasarana kota

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah			
RTH (V14)	Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada **peningkatan kualitas lingkungan, dan**	V14.1	Pembenahan prasarana dan sarana perumahan	Mengembangkan sarana dan prasarana kota

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	pembenahan prasarana dan sarana perumahan.			
	Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib **menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan**, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah	V14.2	Penyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan	Mengembangkan sarana dan prasarana kota

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Pengembangan RTH/RTP skala RW dan RT	V14.3	Pengembangan RTH/RTP dan penambahan RTH Privat	Mengembangkan RTH/RTP dan menambahkan RTH Privat
	Penambahan RTH privat dengan pot dan vertical garden	V14.4	Penambahan RTH privat	

Sumber : Hasil analisis, 2020

Pada hasil analisa konten pada dokumen RPLP Kelurahan Krian tersebut dapat terlihat bahwa dokumen kebijakan tersebut telah memuat variable yang ada, kecuali variabel kemudahan memperoleh transportasi dan variabel jenis pekerjaan.

Tabel 4. 24 Hasil *Content Analysis* berdasarkan Dokumen Kebijakan Terpilih

Hasil Analisis	RP3KP		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
Melakukan perbaikan dan penataan lingkungan	V1.1	√	V1.1	√	V1.1.,V1.2	√	Terkonfirmasi
Meningkatkan kualitas bangunan perumahan dan mengatur secara tegas terhadap izin pendirian rumah	-		-		V1.3	√	
Melakukan penataan kawasan padat dan kumuh	V2.1	√	-	-	-	-	Terkonfirmasi
Menyediakan infrastruktur yang memadai di permukiman padat	-	-	V2.1	√	-	-	Terkonfirmasi

Hasil Analisis	RP3KP		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
Membangun perumahan secara vertikal pada kawasan perumahan baru, maupun kawasan padat hunian	-	-	-	-	V2.1	√	
Melakukan penigkatan fungsi dan kualitas jaingan jalan	V3.1.,V3.5.	√	V3.1	√	V3.3	√	Terkonfirmasi
Menyediakan sarana dan prasarana dasar	V3.2.,V3.3.,V3.4.	-	-	-	V3.1.,V3.2	√	
Menyediakan sarana dan prasarana dasar	V4.3.,	√	V4.1.	√	V4.1.,V.4.2	-	Terkonfirmasi

Hasil Analisis	RP3KP		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
Mengoptimalkan system pengelolaan dan pengendalan banjir	V4.2	√	-	-	-	-	Terkonfirmasi
Melakukan penanganan, normalisasi, dan pengembangan drainase serta prasarana dan sarana penunjang	-	-	V4.1	√	V4.3.,V4.4.,V. 4.5	√	Terkonfirmasi
Menyediakan sarana dan prasarana dasar	V5.1.	√	-	-	V5.1., V5.2.	√	Terkonfirmasi
Peningkatan kualitas dan penyediaan air bersih	V5.2.,V5.3	√	V5.2	√	-	-	Terkonfirmasi

Hasil Analisis	RP3KP		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
Mengembangkan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum	-	-	V5.1	√	-	-	
Meningkatkan pelayanan air minum	-	-	V5.3.	√	-	-	Terkonfirmasi
Melindungi sumber air dan daerah resapan air	-	-	V5.4	√	-	-	
Menyediakan sarana dan prasarana dasar	V6.1.	√	-	-	V6.1., V6.2.,	√	Terkonfirmasi
Melakukan pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi	V6.2	√	V6.1., V6.2	√	-	-	Terkonfirmasi

Hasil Analisis	RP3KP		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
Pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat	-	-	-	-	V6.3	√	
Menyediakan sarana dan prasarana dasar	V7.1., V9.2., V9.4	√	-	-	V7.1., V7.2	√	Terkonfirmasi
Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sampah	V7.2.,V7.3	√	V7.1	√	V7.3.,V7.4., V7.6., V7.8., V7.9	√	

Hasil Analisis	RP3KP		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
Membanguun TPST 3R dan membentuk KSM Pengelola sampah	-	-	V7.2	√	-	-	
Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	-	-	V7.3	√	V7.10	√	
Mengolah sampah secara mandiri	-	-	-	-	V7.5	√	
Meningkatkan rute dan sarana pengangkutan sampah	-	-	-	-	V7.7	√	

Hasil Analisis	RP3KP		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
Perlunya penyediaan sarana dan prasarana dasar	V8.1	√	-	-	V8.1., V8.2.	√	Terkonfirmasi
Arahan penanganan terhadap kawasan padat dan kumuh rawan bencana kebakaran melalui upaya pencegahan kebakaran pada lingkup lingkungan, lingkup tapak dan lingkup bangunan.	V8.2	√	-	-	-	-	Terkonfirmasi
Menyediakan jalur evakuasi bencana kebakaran	V8.3.,V8.5	√	-	-	-	-	Terkonfirmasi
Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	V8.5	√	V8.1	√	V8.3.,V8.4	√	

Hasil Analisis	RP3KP		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
Pembangunan atau penyediaan lahan untuk RUSUNAWA yang diperuntukan bagi pekerja	V9.1	√	-	-	-	-	Terkonfirmasi
Mengembangkan sarana dan prasarana kota	V11.1.	√	V11.1	√	V11.1.,V11.2	√	
Mengembangkan sarana dan prasarana kota	V12.1.	√	V12.1	√	V12.1.,V12.2	√	
Mengembangkan sarana dan prasarana kota	V13.1	√	V13.1	√	V13.1.,V13.2	√	
Mengembangkan sarana dan prasarana kota	-	-	-	-	V14.2.,V14.2	√	
Menyediakan RTH sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10 RTH privat	V14.1	√	-	-	-	-	

Hasil Analisis	RP3KP		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
Meninngkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau	V14.2	√	V14.1.,V 14.2	√	-	-	
RTH dioptimalkan sebagai fungsi ekologi	V14.3	√	-	-	-	-	

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Dari hasil analisa ketiga dokumen perencanaan tersebut, dapat terlihat kebijakan yang telah diterapkan oleh Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

❖ **Fisik :**

Kondisi Fisik Bangunan

- Melakukan perbaikan dan penataan lingkungan
- Meningkatkan kualitas bangunan perumahan dan mengatur secara tegas terhadap izin pendirian rumah

Kepadatan Banguanan

- Melakukan penataan kawasan padat dan kumuh
- Penyediaan infrastruktur yang memadai di permukiman padat, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan pembenahan prasaran dan sarana perumahan
- Membangun perumahan secara vertikal pada kawasan perumahan baru, maupun kawasan padat hunian

❖ **Sarana dan Prasarana :**

Kondisi Jalan Lingkungan

- Melakukan peningkatan fungsi dan kualitas jaingan jalan
- Menyediakan sarana dan prasarana dasar

Drainase

- Menyediakan sarana dan prasarana dasar
- Mengoptimalkan system pengelolaan dan pengendalan banjir
- Melakukan penanganan, normalisasi, dan pengembangan drainase

- Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi saluran pematusan dan lokasi penampungan air, dan menyediakan prasarana dan sarana penunjang

Air Minum dan Air Bersih

- Menyediakan sarana dan prasarana dasar
- Peningkatan kualitas dan penyediaan air bersih
- Meningkatkan pelayanan air minum
- Mengembangkan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum
- Melindungi sumber air dan daerah resapan air

Sanitasi

- Mengembangkan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum
- Melakukan pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi
- Pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat

Persampahan

- Menyediakan sarana dan prasarana dasar
- Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sampah
- Membanguun TPST 3R dan membentuk KSM Pengelola sampah
- Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
- Mengolah sampah secara mandiri
- Meningkatkan rute dan sarana pengangkutan sampah

Proteksi Bencana

- Perlunya penyediaan sarana dan prasarana dasar
- Arahan penanganan terhadap kawasan padat dan kumuh rawan bencana kebakaran melalui upaya pencegahan kebakaran pada lingkup lingkungan, lingkup tapak dan lingkup bangunan.
- Menyediakan jalur evakuasi bencana kebakaran
- Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran

❖ **Aksesbilitas**

- Pembangunan atau penyediaan lahan untuk RUSUNAWA yang diperuntukan bagi pekerja

❖ **Fasilitas Umum**

- Pengembangan sarana dan prasarana kota
- Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari luas perumahan

RTH

- Pengembangan sarana dan prasarana kota
- Perlunya penyediaan RTH sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10 RTH privat
- Meninngkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau
- RTH dioptimalkan sebagai fungsi ekologi

Dari hasil analisa kebijakan yang telah dilakukan, kebijakan yang telah dianalisis akan disesuaikan dengan kondisi eksisting tiap-tiap kawasan kumuh Kelurahan Krian.

4.2.3 Penentuan Strategi Penangan Pemukiman Kumuh di Area Pendukung Industri Kelurahan Krian

Berdasarkan hasil analisa pada sasaran pertama dan sasaran kedua, maka perlu adanya penentuan strategi berdasarkan hasil analisa kedua sasaran tersebut dengan dibandingkan dengan literatur atau *best practice* yang telah ada dengan menggunakan metode triangulasi, berikut penentuan strategi penanganan pemukiman kumuh di tiap kawasan.

4.2.3.1 Kawasan Gersikan

Berdasarkan karakteristik, tinjauan kebijakan, dan literatur atau *best practice* maka strategi yang dapat diterapkan pada Kawasan Gersikan dapat dilihat pada **Tabel 4.25.**

Tabel 4. 25
Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh Area Pendukung Industri Kawasan Gersikan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
Kondisi bangunan	Terdapat bangunan rumah tidak memenuhi syarat teknis (RTLH) serta masih terdapat bangunan yang belum teratur terutama pada sepadan sungai	• Melakukan perbaikan dan penataan lingkungan • Meningkatkan kualitas bangunan perumahan dan mengatur secara tegas terhadap izin pendirian rumah	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan untuk kondisi bangunan dapat dilakukan dengan rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung. rekonstruksi dengan	Dalam menangani kondisi bangunan yang masih belum memenuhi syarat teknis atau termasuk rumah layak huni dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan atau penambahan komponen bangunan rumah sehingga dapat memenuhi standar teknis bangunan gedung, selain itu untuk

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			membongkar dan membangun kembali bangunan atau sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan penambahan komponen atau fungsi, serta dengan penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan **Putro,2011** Strategi perencanaan yang dapat dilakukan terhadap rumah yang tidak layak huni di	menangani permasalahan bangunan yang masih belum teratur dapat dilakukan dengan melakukan penataan lingkungan dengan mengatur jarak rumah dengan sepadan sungai sejauuh 3 meter

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			kawasan kumuh dilakukan dengan perbaikan bangunan dengan melihat prioritas dan tingkat kerusakan bangunan yang terdapat di kawasan kumuh, perbaikan bangunan dilaksanakan dengan pemberian material sesuai kebutuhan tidak berupa uang, pemerintah dapat bekerja sama dengan instansi terkait seperti Menpera yang memiliki program	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			perbaikan rumah tidak layak. **Permen PU, 2018** Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.	
Kepadatan bangunan	Kepadatan bangunan tinggi di beberapa RT	• Melakukan penataan kawasan padat dan kumuh	**Putro,2011** Perencanaan terhadap kepadatan bangunan ini diprioritaskan untuk	Strategi dalam penangan pemukiman kumuh untuk kepadatan bangunan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
	(kepadatan hingga 100 unit/HA)	• Penyediaan infrastruktur yang memadai di permukiman padat, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan pembenahan prasaran dan sarana perumahan • Membangun perumahan secara vertikal pada kawasan perumahan baru, maupun kawasan padat hunian	daerah dengan tingkat kepadatan lebih dari 100unit/ha dapat dilakukan dengan strategi membuat konsep rumah secara vertikal sehingga sisa lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka, memaksimalkan ruang terbuka yang ada dengan tidak menutupi dengan perkerasan beton, memanfaatkan jarak antar bangunan sebagai ruang terbuka hijau.	dapat dilakukan dengan penataan kawasan padat dan kumuh atau dengan melakukan pembangunan perumahan secara vertical. Untuk penataan kawasan padat dapat dilakukan dengan memprioritakan daerah dengan tingkat kepadatan lebih dari 100unit/ha dilakukan dengan strategi membuat konsep

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			Sedangkan kepadatan bangunan kurang dari 100unit/ha strategi yang dapat dipergunakan adalah dengan strategi mengendalikan kepadatan bangunan dengan peraturan KDB yang sesuai dengan RTRW, memaksimalkan ruang terbuka yang ada disetiap kawasan untuk aktivitas	rumah secara vertikal sehingga sisa lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka, sedangkan kepadatan bangunan kurang dari 100unit/ha dilakukan pengendalian kepadatan bangunan dengan peraturan KDB yang sesuai dengan RTRW dan mengatur kepadatan bangunan dengan menetapkan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			sosial masyarakat, mengatur kepadatan bangunan dengan menetapkan jarak minimal antarbangunan.	jarak minimal antar bangunan.
Kondisi Jalan lingkungan	Kondisi jalan masih banyak yang belum memenuhi persyaratan teknis seperti jalan rusak. Masih ada jalan yang belum memiliki sarana jalan yang cukup	• Melakukan peningkatan fungsi dan kualitas jaingan jalan • Menyediakan sarana dan prasarana dasar	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan masalah kondisi jalan dapat dilakukan dengan rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material,	Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan banyaknya jalan yang masih belum memenuhi persyaratan teknis, dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan fungsi dan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			penambahan bangunan pelengkap jalan, serta dengan peningkatan struktur jalan **Putro,2011** Strategi perencanaan terhadap jalan lingkungan di kawasan kumuh dapat dilakukan dengan prioritas perbaikan diutamakan dilakukan di jalan lingkungan bukan jalan pribadi yang berhubungan dengan	kualitas jalan serta melakukan perbaikan jalan rusak, peningkatan perkerasan jalan dengan pavingisasi. Penambahan sarana jalan seperti lampu jalan, lampu lalu lintas, dan *zebra cross* untuk memberi kemudahan masyarakat untuk menyebrang

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			jalan lingkungan, perbaikan yang dilakukan disesuaikan untuk setiap kerusakan. Kerusakan yang terparah mendapat prioritas perbaikan terlebih dahulu. **Hariyanto, 2007** Untuk penanganan jalan yang belum memenuhi standar teknis perlu peningkatan perbaikan jalan lingkungan dan sarana prasarana lainnya	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
Drainase	Masih terdapat drainase lingkungan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis (akibat pendangkalan dan tersumbat sampah)	• Menyediakan sarana dan prasarana dasar • Mengoptimalkan system pengelolaan dan pengendalan banjir • Melakukan penanganan, normalisasi, dan pengembangan drainase • Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi saluran pematusan dan lokasi penampungan air, dan	**Kementerian PUPR, 2015** Strategi yang dapat dilakukan untuk permasalahan drainase adalah peningkatan kualitas unit sistem drainase, penyedian sistem drainase, penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan sistem drainase kota. **Hariyanto, 2007**	Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan drainase yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis akibat adanya pendangkalan dan tumpukan sampah yang yang menyumbat adalah dengan melakukan normalisasi drainase dan merehabilirasi saluran yang ada serta dengan melakukan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		menyediakan prasarana dan sarana penunjang	Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah	peningkatan kualitas unit system drainase. Selain itu dengan melakukan pemisahan saluran drainase dengan saluran limbah.

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
Air bersih dan Air Minum	Pelayanan air minum sudah baik, namun masih terdapat masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan air minum, mandi, dan cuci	• Menyediakan sarana dan prasarana dasar • Peningkatan kualitas dan penyediaan air bersih • Meningkatkan pelayanan air minum • Mengembangkan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum • Melindungi sumber air dan daerah resapan air	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan permasalahan dapat dilakukan dengan rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan, penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasi pengelolaan air minum **Putro,2011** Strategi perencanaan terhadap daerah yang	Strategi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air minum, mandi, dan cuci bagi masyarakat dapat dilakukan dengan rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan PDAM dengan memanfaatkan air baku dari sungai/air permukaan, penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasi

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			belum terjangkau aliran PDAM adalah dengan menyediakan air bersih melalui jaringan pipa PDAM dengan memanfaatkan air baku dari sungai/air permukaan **Hariyanto, 2007** Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan.	pengelolaan air minum, meningkatkan pelayanan air minum.

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah	
Sanitasi	Masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga/bersama yang sesuai dengan persyaratan teknis, saluran pembuangan	• Menyediakan sarana dan prasarana dasar • Peningkatan kualitas dan penyediaan air bersih • Meningkatkan pelayanan air minum • Mengembangkan jaringan perpipaan	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan sanitasi dapat dilakukan dengan penyediaan sistem sanitasi setempat atau terpusat serta dengan perbaikan komponen sanitasi pengelolaan air limbah.	Strategi yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pembangunan WC umum, mengembangkan MCK Komunal atau MCK++ atau tangki septik komunal,

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
	limbah rumah tangga masih menyatu dengan saluran drainase	PDAM dan hidran umum • Melindungi sumber air dan daerah resapan air	**Putro,2011** Sistem pengelolaan air limbah di kawasan kumuh diarahkan untuk pengelolaan air limbah domestik baik di kawasan kumuh pedesaan maupun perkotaan diarahkan dengan sistem individual dengan sarana pembuangan berupa jamban keluarga, sistem pembuangan limbah domestik kawasan	mengembangkan tangki septik sesuai SNI dan IPLT, meningkatkan program pembangunan jamban dan tangki septik individual, meningkatkan kualitas pembangunan prasarana air limbah. Lalu perlu adanya IPAL untuk menampung air limbah dari kawasan industi agar tidak mencemari kawasan pemukiman.

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			kumuh perkotaan, sebagian diarahkan menggunakan sistem septik tank dengan resapan/filter, sebagian dengan septik tank tanpa resapan. Dengan proses pengolahan langsung ke dalam IPLT yang sudah ada (menggunakan truk tinja) dan di pedesaan menggunakan sistem SPAL. **Mardhani, 2012**	Selain itu perlu adanya pemisahan saluran sanitasi dengan saluran drainase serta tidak mengalirkan buangan langsung menuju sungai agar tidak mencemai sungai

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			Dalam permasalahn sanitasi yang belum memenuhi persyaratan teknis, perlu adanya pembangunan MCK Umum dengan Program sanitasi Berbasis Masyarakat serta Tangki septic individu dan resapan individu **Hariyanto, 2007** Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah	
Persampahan	Belum terlayani sistem persampahan yang baik, dan belum tersedianya TPS. Masih ada yang membuang sampah disungai	• Menyediakan sarana dan prasarana dasar • Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sampah	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan masalah persampahan dapat dilakukan dengan pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP) atau rehabilitasi	Strategi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahn ini adalah dengan melakukan pembangunan atau rehabilitasi prasarana dan sarana

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		• Membanguun TPST 3R dan membentuk KSM Pengelola sampah • Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R • Mengolah sampah secara mandiri • Meningkatkan rute dan sarana pengangkutan sampah	PSP dengan perbaikan dan penambahan komponen bangunan PSP. **Mardhani, 2012** Untuk menanganani system persampahan yang kurang baik, dapat dilakukan dengan pengadaan TPS dengan jarak minimal depo 15 menit perjalanan gerobak sampah dan tiap gerobak sampah melayani 30 -50 unit	persampahan seperti TPS, armada angkut sampah, kelembagaan, dan pelatihan pengelolaan sampah dengan jarak minimal depo 15 menit perjalanan gerobak sampah dan tiap gerobak sampah melayani 30 -50 unit rumah. Selain itu perlu adanya peningkatan sistem pengelolaan sampah dengan melakukan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			rumah, serta pengelolaan sampah lingkungan ditangani oleh masyarakat setempat **Hariyanto, 2007** Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air	pengangkutan sampah 2 kali seminggu

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah	
Proteksi bencana	Belum terdapat adanya sarana/prasarana untuk proteksi kebakaran	• Perlunya penyediaan sarana dan prasarana dasar • Arahan penanganan terhadap kawasan padat dan kumuh rawan bencana kebakaran melalui upaya pencegahan kebakaran pada lingkup lingkungan, lingkup tapak dan lingkup bangunan.	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan maslaah proteksi bencana dengan pembangunan sarana proteksi kebakaran atau dengan Peningkatan kualitas sarana sistem proteksi kebakaran **Oktaviansyah, 2012** Dalam penanganan proteksi bencana daan	Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan sarana dan prasarana proteksi kebakarana, penyediaan akses berupa gang kebakaran atau jalur jalan kaki untuk memudahkan petugas penanggulangan kebakaran, penyediaan jalan akses mobil

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		• Menyediakan jalur evakuasi bencana kebakaran • Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	permukiman kumuh perlu memperhatikan aksesbilitas dan aksesibilitas dan kondisi air. Dimana aksesbilitas merupakan faktor yang berperan besar dalam kekumuhan dan bahaya kebakaran. Pada permukiman kumuh, jarak bangunan cenderung rapat dan aksesibilitas sulit, jalan penghubung relatif kecil dan sempit sehingga jika terjadi kebakaran akan	PMK yang dapat berupa jalan lingkungan yang lebar, dan dilengkapi hidran kebakaran umum

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			menimbulkan masalah dalam penanganan dan upaya penanganan kebakaran, sedangkan ketersediaan air merupakan sumber vital dalam penanganan kebakaran.	
Kedekatan dengan kawasan industri	Berjarak kurang dari 2KM dari kawasan industri	• Pembangunan atau penyediaan lahan untuk RUSUNAWA yang diperuntukan bagi pekerja	**Dirgapraja dkk, 2019** Pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi kegiatan industri, memiliki tiga tujuan pokok, yaitu:	Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun atau menyediakan lahan untuk RUSUNAWA khusus untuk pekerja dengan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			1. Berdampak positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan aspek pemasaran produk. Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan adanya kebutuhan tambahan akan perumahan sebagai akibat daripembangunan Kawasan Industri. Dalam kaitannya dengan jarak terhadap permukiman di sini harus mempertimbangkan	lokasi minimal 2 Km dari lokasi industri

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			masalah pertumbuhan perumahan, di mana sering terjadi areal tanah di sekitar lokasi industri menjadi kumuh dan tidak ada lagi jarak antara perumahan dengan kegiatan industri. 2. Berdampak negatif karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat.	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			3. Jarak terhadap permukiman yang ideal minimal 2 (dua) Km dari lokasi industri.	
Kemudahan dalam memperoleh transportasi	Belum terlayani oleh transportasi umum	(Tidak ada dalam dokumen kebijakan)	**Sutandi, 2015** Sistem transportasi umum berkelanjutan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup dari komunitas yang dilayani. Keberadaan	Strategi yang dapat dilakukan untuk menangani keberadaan transportasi umum yang kurang di kawasan ini adalah dengan melakukan penambahan transportasi umum di kawasan Krian, bias

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			sistem transportasi adalah untuk memenuhi kebutuhan keterkaitan ekonomi dan sosial serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan mobilitas **Muna,2009** lokasi perumahan sebaiknya dipilih di daerah yang memberikan akses yang mudah bagi orang yang bermukim (maksimal 30	dengan melalui penambahan rute untuk lyn atau penyediaan becak

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			menit dengan menggunakan alat transportasi umum) untuk menuju tempat kerja.	
Kesehatan	Sudah tercakup layanan kesehatan berupa posyandu dan puskesmas	• Pengembangan sarana dan prasarana kota • Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari luas perumahan	**Huang (2003)** masyarakat menginginkan suatu lingkungan hunian yang dekat dengan lokasi persebaran fasilitas umum perkotaan **Irfiyanti dan Manaf (2014)**	Strategi penanganan yang dapat dilakukan untuk aspek sarana kesehatan adalah dengan perawatan dan pemeliharaan sarana kesehatan.

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			Berdasarkan penelitian yang dilakukan, buruh industri merasa puas dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan hunian mereka. Tingkat kepuasan ini dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana berkondisi baik dan terawat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan mudah dijangkau.	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			Muna, 2009 jarak yang jauh dengan tempat kerja dan fasilitas sosial berarti akan menambah persentase pengeluaran ongkos transportasi dibandingkan seluruh pengeluaran rutin keluarga.	
Pendidikan	Sudah tercakup layanan pendidikan berupa TK dan SD	• Pengembangan sarana dan prasarana kota • Menyediakan prasarana	**Huang (2003)** masyarakat menginginkan suatu lingkungan hunian yang dekat dengan lokasi	Strategi penanganan yang dapat dilakukan untuk aspek sarana pendidikan adalah dengan perawatan dan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari luas perumahan	persebaran fasilitas umum perkotaan **Irfiyanti dan Manaf (2014)** Berdasarkan penelitian yang dilakukan, buruh industri merasa puas dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan hunian mereka. Tingkat kepuasan ini dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana berkondisi	pemeliharaan sarana pendidikan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			baik dan terawat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan mudah dijangkau. **Muna, 2009** jarak yang jauh dengan tempat kerja dan fasilitas sosial berarti akan menambah persentase pengeluaran ongkos transportasi dibandingkan seluruh pengeluaran rutin keluarga.	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
Perdagangan	Sudah tercakup sarana perdagangan berupa Pasar Krian	• Pengembangan sarana dan prasarana kota • Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari luas perumahan	**Huang (2003)** masyarakat menginginkan suatu lingkungan hunian yang dekat dengan lokasi persebaran fasilitas umum perkotaan **Irfiyanti dan Manaf (2014)** Berdasarkan penelitian yang dilakukan, buruh industri merasa puas dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan	Strategi penanganan yang dapat dilakukan untuk aspek sarana perdagangan adalah dengan perawatan dan pemeliharaan sarana perdagangan.

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			hunian mereka. Tingkat kepuasan ini dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana berkondisi baik dan terawat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan mudah dijangkau. **Muna, 2009** jarak yang jauh dengan tempat kerja dan fasilitas sosial berarti akan menambah persentase	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			pengeluaran ongkos transportasi dibandingkan seluruh pengeluaran rutin keluarga.	
RTH	Ketersediaan RTH (khususnya RTH Privat) sangat minim, RTH yang ada yaitu berupa lapangan digunakan untuk tempat pembuangan sampah	• Pengembangan sarana dan prasarana kota • Perlunya penyediaan RTH sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10 RTH privat	**Behdu dan Yahya, 2015** Ruang Terbuka dan Tata Hijau Perancangan ruang terbuka hijau diterapkan dengan konsep sebagai berikut: a) Menyediakan jalur hijau pada seluruh sisi jalan lingkungan.	Memanfaatkan lapangan yang ada untuk dijadikan ruang terbuka hijau, serta dengan penambahan jalur hijau pada seluruh sisi jalan lingkungan serta melakukan perawatan terhadap RTH yang sudah ada

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		• Meninngkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau • RTH dioptimalkan sebagai fungsi ekologi	Penataan dilakukan dengan mengatur penempatan pohon dan tanaman perdu, merancang perletakan papan informasi/ reklame. Jalur hijau ditanami pohon spesifik yang teduh, selain sebagai pengarah, juga memberikan kesejukan, mere duksi polusi udara dan bising. b) Membentuk RTH berupa taman skala	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			lingkungan pada lahan kosong, untuk menyeimbangkan lahan terbangun dan lahan belum terbangun serta untuk memenuhi kebutuhan bersosialisasi. c) Mengatur dan menata perlengkapan jalan dan papan informasi/ papan inormasi pada ruang terbuka perkerasan dan RTH, termasuk pada jalur hijau.	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			Mardhani, 2012 Dengan kurangnya ruang terbuka hijau, perlu adanya Pembangunan khusus ruang terbuka hijau dan atau menciptakan suasana teduh dengan dilakukan penghijauan guna meredam polusi udara.	
Jenis Mata Pencaharian	Mayoritas penduduk pada Kelurahan Krian	(Tidak ada dalam dokumen kebijakan)	**Muna, 2009** Penentuan prioritas tempat tinggal bagi	Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
	bekerja sebagai wiraswasta dan karyawan pegawai swasta		masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk buruh industri,cenderung didasarkan pada prioritas utama yaitu lokasi tempat tinggal yang berdekatan dengan lokasi kerja.	tempat tinggal khusus untuk pekerja industri yang ada di Kelurahan Krian

Sumber : Hasil analisis, 2020

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Strategi penanganan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kawasan Gersikan :

Aspek Kondisi Bangunan Melakukan perbaikan atau penambahan komponen bangunan rumah sehingga dapat memenuhi standar teknis bangunan gedung, selain itu untuk menangani permasalahan bangunan yang masih belum teratur dengan melakukan penataan lingkungan dengan mengatur jarak rumah dengan sepadan sungai sejauh 3 meter
Aspek Kepadatan Bangunan Untuk penataan kawasan padat dapat dilakukan dengan memprioritakan daerah dengan tingkat kepadatan lebih dari 100unit/ha dilakukan dengan strategi membuat konsep rumah secara vertikal sehingga sisa lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka, sedangkan kepadatan bangunan kurang dari 100unit/ha dilakukan pengendalian kepadatan bangunan dengan peraturan KDB yang sesuai dengan RTRW dan mengatur kepadatan bangunan dengan menetapkan jarak minimal antar bangunan.
Aspek Kondisi Jalan Lingkungan Peningkatan fungsi dan kualitas jalan serta melakukan perbaikan jalan rusak, peningkatan perkerasan jalan dengan pavingisasi serta penambahan sarana pelengkap jalan seperti PJU. Penambahan sarana jalan seperti lampu jalan, lampu lalu lintas, dan zebra cross untuk memberi kemudahan masyarakat untuk menyebrang
Aspek Drainase Normalisasi drainase dan merehabilirasi saluran yang ada serta dengan melakukan poeningkatan kualitas unit system drainase. Selain itu perlu adanya pemisahan saluran drainase dengan saluran limbah.

Aspek Air Minum dan air Bersih Rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan PDAM dengan memanfaatkan air baku dari sungai/air permukaan,penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasi pengelolaan air minum,meningkatkan pelayanan air minum
Aspek Sanitasi Melakukan pembangunan WC umum, mengembangkan MCK Komunal atau MCK++ atau tangki septik komunal, mengembangkan tangki septik sesuai SNI dan IPLT, meningkatkan program pembangunan jamban dan tangki septik individual, meningkatkan kualitas pembangunan prasarana air limbah. Selain itu perlu adanya pemisahan saluran sanitasi dengan saluran drainase serta tidak mengalirkan buangan langsung menuju sungai agar tidak mencemari sungai
Aspek Persampahan Melakukan pembangunan atau rehabilitasi prasarana dan sarana persampahan seperti TPS, armada angkut sampah, kelembagaan, dan pelatihan pengelolaan sampah dengan jarak minimal depo 15 menit perjalanan gerobak sampah dan tiap gerobak sampah melayani 30 -50 unit rumah. Selain itu perlu adanya peningkatan system pengelolaan sampah dengan melakukan pengangkutan sampah 2 kali seminggu
Aspek Proteksi Bencana Penambahan sarana dan prasarana proteksi kebakarana, penyediaan akses berupa gang kebakaran atau jalur jalan kaki untuk memudahkan petugas penangggulangan kebakaran, penyediaan jalan akses mobil PMK yang dapat berupa jalan lingkungan yang lebar, dan dilengkapi hidran kebakaran umum
Aspek Kedekatan dengan Lokasi Industri Membangun atau menyediakan lahan untuk RUSUNAWA khusus untuk pekerja dengan lokasi minimal 2 Km dari lokasi industri

Aspek Kemudahan dalam Memperoleh Transportasi Melakukan penambahan transportasi umum di kawasan Krian, bias dengan melalui penambahan rute untuk lyn atau penyediaan becak
Aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan Perawatan dan pemeliharaan sarana kesehatan, pendidikan, dan perdagangan yang sudah ada.
Aspek RTH Memanfaatkan lapangan yang ada untuk dijadikan ruang terbuka hijau, serta dengan penambahan jalur hijau pada seluruh sisi jalan lingkungan serta melakukan perawatan terhadap RTH yang sudah ada
Aspek Jenis Pekerjaan Menyediakan tempat tinggal khusus untuk pekerja industri yang ada di Kelurahan Krian

4.2.3.2 Kawasan Krajan Pasar

Berdasarkan karakteristik, tinjauan kebijakan, dan literatur atau *best practice* maka strategi yang dapat diterapkan pada Kawasan Krajan Pasar dapat dilihat pada **Tabel 4.25.**

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Tabel 4. 26
Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh Area Pendukung Industri Kawasan Krajan Pasar

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
Kondisi bangunan	Terdapat bangunan rumah tidak memenuhi syarat teknis (RTLH) serta masih terdapat bangunan yang belum teratur	• Melakukan perbaikan dan penataan lingkungan • Meningkatkan kualitas bangunan perumahan dan mengatur secara tegas terhadap izin pendirian rumah	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan untuk kondisi bangunan dapat dilakukan dengan rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung. rekonstruksi dengan	Dalam menangani kondisi bangunan yang masih belum memenuhi syarat teknis atau termasuk rumah layak huni dapat dilakukan denan melakukan perbaikan atau penambahan komponen bangunan rumah sehingga dapat memenuhi standar teknis bangunan gedung, selain itu untuk

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			membongkar dan membangun kembali bangunan atau sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan penambahan komponen atau fungsi, serta dengan penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan **Putro,2011** Strategi perencanaan yang dapat dilakukan terhadap rumah yang tidak layak huni di	menangani permasalahan bangunan yang masih belum teratur dapat dilakukan dengan melakukan penataan lingkungan.

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			kawasan kumuh dilakukan dengan perbaikan bangunan dengan melihat prioritas dan tingkat kerusakan bangunan yang terdapat di kawasan kumuh, perbaikan bangunan dilaksanakan dengan pemberian material sesuai kebutuhan tidak berupa uang, pemerintah dapat bekerja sama dengan instansi terkait seperti Menpera yang memiliki program	

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			perbaikan rumah tidak layak.	
Kepadatan bangunan	Kepadatan bangunan tinggi di beberapa RT (kepadatan hingga 100 unit/HA)	• Melakukan penataan kawasan padat dan kumuh • Penyediaan infrastruktur yang memadai di permukiman padat, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan pembenahan prasaran dan sarana perumahan • Membangun perumahan secara	**Putro,2011** Perencanaan terhadap kepadatan bangunan ini diprioritaskan untuk daerah dengan tingkat kepadatan lebih dari 100unit/ha dapat dilakukan dengan strategi membuat konsep rumah secara vertikal sehingga sisa lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka, memaksimalkan ruang	Strategi dalam penangan pemukiman kumuh untuk kepadatan bangunan dapat dilakukan dengan penataan kawasan padat dan kumuh atau dengan melakukan pembangunan perumahan secara vertikal. Untuk penataan kawasan padat dapat dilakukan dengan

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		vertikal pada kawasan perumahan baru, maupun kawasan padat hunian	terbuka yang ada dengan tidak menutupi dengan perkerasan beton, memanfaatkan jarak antar bangunan sebagai ruang terbuka hijau. Sedangkan kepadatan bangunan kurang dari 100unit/ha strategi yang dapat dipergunakan adalah dengan strategi mengendalikan kepadatan bangunan dengan peraturan KDB yang sesuai	memprioritakan daerah dengan tingkat kepadatan lebih dari 100unit/ha dilakukan dengan strategi membuat konsep rumah secara vertikal sehingga sisa lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka, sedangkan kepadatan bangunan kurang dari 100unit/ha dilakukan pengendalian kepadatan bangunan

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			dengan RTRW, memaksimalkan ruang terbuka yang ada disetiap kawasan untuk aktivitas sosial masyarakat, mengatur kepadatan bangunan dengan menetapkan jarak minimal antarbangunan.	dengan peraturan KDB yang sesuai dengan RTRW dan mengatur kepadatan bangunan dengan menetapkan jarak minimal antar bangunan.
Kondisi Jalan lingkungan	Kondisi jalan masih banyak yang belum memenuhi persyaratan	• Melakukan peningkatan fungsi dan kualitas jaingan jalan	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan masalah kondisi jalan dapat dilakukan dengan	Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan banyaknya jalan yang

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
	teknis. Masih ada jalan yang belum memiliki sarana jalan yang cukup	• Menyediakan sarana dan prasarana dasar	rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material, penambahan bangunan pelengkap jalan, serta dengan peningkatan struktur jalan **Putro,2011** Strategi perencanaan terhadap jalan lingkungan di kawasan kumuh dapat dilakukan dengan prioritas	masih belum memenuhi persyaratan teknis, dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan fungsi dan kualitas jalan serta melakukan perbaikan jalan rusak, peningkatan perkerasan jalan dengan pavingisasi. Penambahan sarana jalan seperti lampu jalan, lampu lalu lintas, dan *zebra cross* untuk memberi kemudahan

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			perbaikan diutamakan dilakukan di jalan lingkungan bukan jalan pribadi yang berhubungan dengan jalan lingkungan, perbaikan yang dilakukan disesuaikan untuk setiap kerusakan. Kerusakan yang terparah mendapat prioritas perbaikan terlebih dahulu. **Hariyanto, 2007**	masyarakat untuk menyebrang

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			Untuk penanganan jalan yang belum memenuhi standar teknis perlu peningkatan perbaikan jalan lingkungan dan sarana prasarana lainnya	
Drainase	Masih terdapat drainase lingkungan yang tidak sesuai dengan persyaratn teknis (akibat pendangkalan dan tersumbat sampah)	• Menyediakan sarana dan prasarana dasar • Mengoptimalkan system pengelolaan dan pengendalan banjir • Melakukan penanganan, normalisasi, dan	**Kementerian PUPR, 2015** Strategi yang dapat dilakukan untuk permasalahan drainase adalah peningkatan kualitas unit sistem drainase, penyedian sistem drainase, penambahan segmen	Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan drainase yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis akibat adanya pendangkalan dan tumpukan sampah yang yang menyumbat

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		pengembangan drainase • Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi saluran pematusan dan lokasi penampungan air, dan menyediakan prasarana dan sarana penunjang	jaringan agar terhubung dengan sistem drainase kota. **Hariyanto, 2007** Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan,	adalah dengan melakukan normalisasi drainase dan merehabilirasi saluran yang ada serta dengan melakukan peningkatan kualitas unit system drainase. Selain itu dengan melakukan pemisahan saluran drainase dengan saluran limbah.

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			drainase, dan bak-bak sampah	
Air bersih dan Air Minum	Pelayanan air minum sudah baik, namun masih terdapat masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan air minum, mandi, dan cuci	• Menyediakan sarana dan prasarana dasar • Peningkatan kualitas dan penyediaan air bersih • Meningkatkan pelayanan air minum • Mengembangkan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan permasalahan dapat dilakukan dengan rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan, penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasi pengelolaan air minum	Strategi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air minum, mandi, dan cuci bagi masyarakat dapat dilakukan dengan rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan PDAM dengan memanfaatkan air baku

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		• Melindungi sumber air dan daerah resapan air	**Putro,2011** Strategi perencanaan terhadap daerah yang belum terjangkau aliran PDAM adalah dengan menyediakan air bersih melalui jaringan pipa PDAM dengan memanfaatkan air baku dari sungai/air permukaan **Hariyanto, 2007** Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di	dari sungai/air permukaan, penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasi pengelolaan air minum,meningkatkan pelayanan air minum,

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah	
Sanitasi	Masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga/bersama yang sesuai	• Menyediakan sarana dan prasarana dasar • Peningkatan kualitas dan penyediaan air bersih	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan sanitasi dapat dilakukan dengan penyediaan sistem sanitasi setempat atau	Strategi yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pembangunan WC umum,

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
	dengan persyaratan teknis, saluran pembuangan limbah rumah tangga masih menyatu dengan saluran drainase	• Meningkatkan pelayanan air minum • Mengembangkan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum • Melindungi sumber air dan daerah resapan air	terpusat serta dengan perbaikan komponen sanitasi pengelolaan air limbah. **Putro,2011** Sistem pengelolaan air limbah di kawasan kumuh diarahkan untuk pengelolaan air limbah domestik baik di kawasan kumuh pedesaan maupun perkotaan diarahkan dengan sistem individual dengan sarana	mengembangkan MCK Komunal atau MCK++ atau tangki septik komunal, mengembangkan tangki septik sesuai SNI dan IPLT, meningkatkan program pembangunan jamban dan tangki septik individual, meningkatkan kualitas pembangunan prasarana air limbah. Lalu perlu adanya IPAL untuk

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			pembuangan berupa jamban keluarga, sistem pembuangan limbah domestik kawasan kumuh perkotaan, sebagian diarahkan menggunakan sistem septik tank dengan resapan/filter, sebagian dengan septik tank tanpa resapan. Dengan proses pengolahan langsung ke dalam IPLT yang sudah ada (menggunakan truk tinja) dan di pedesaan	menampung air limbah dari kawasan industi agar tidak mencemari kawasan pemukiman. Selain itu perlu adanya pemisahan saluran sanitasi dengan saluran drainase.

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			menggunakan sistem SPAL. **Mardhani, 2012** Dalam permasalahn sanitasi yang belum memenuhi persyaratan teknis, perlu adanya pembangunan MCK Umum dengan Program sanitasi Berbasis Masyarakat serta Tangki septic individu dan resapan individu **Hariyanto, 2007**	

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah	
Persampahan	Belum terlayani sistem persampahan yang	• Menyediakan sarana dan prasarana dasar	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan masalah persampahan dapat	Strategi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahn ini adalah

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
	baik, dan belum tersedianya TPS	• Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sampah • Membanguun TPST 3R dan membentuk KSM Pengelola sampah • Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R • Mengolah sampah secara mandiri • Meningkatkan rute dan sarana	dilakukan dengan pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP) atau rehabilitasi PSP dengan perbaikan dan penambahan komponen bangunan PSP. **Mardhani, 2012** Untuk menanganani system persampahan yang kurang baik, dapat dilakukan dengan pengadaan TPS dengan jarak minimal depo 15	dengan melakukan pembangunan atau rehabilitasi prasarana dan sarana persampahan seperti TPS, armada angkut sampah, kelembagaan, dan pelatihan pengelolaan sampah dengan jarak minimal depo 15 menit perjalanan gerobak sampah dan tiap gerobak sampah melayani 30 -50 unit rumah. Selain itu perlu

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		pengangkutan sampah	menit perjalanan gerobak sampah dan tiap gerobak sampah melayani 30 -50 unit rumah, serta pengelolaan sampah lingkungan ditangani oleh masyarakat setempat **Hariyanto, 2007** Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan pengadaan infrastruktur	adanya peningkatan sistem pengelolaan sampah dengan melakukan pengangkutan sampah 2 kali seminggu

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah	
Proteksi bencana	Belum terdapat adanya sarana/prasarana untuk proteksi kebakaran	• Perlunya penyediaan sarana dan prasarana dasar • Arahan penanganan terhadap kawasan padat dan kumuh rawan bencana kebakaran melalui upaya pencegahan	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan maslaah proteksi bencana dengan pembangunan sarana proteksi kebakaran atau dengan Peningkatan kualitas sarana sistem proteksi kebakaran	Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan sarana dan prasarana proteksi kebakarana, penyediaan akses berupa gang kebakaran atau jalur jalan kaki untuk memudahkan

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		kebakaran pada lingkup lingkungan, lingkup tapak dan lingkup bangunan. • Menyediakan jalur evakuasi bencana kebakaran • Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	**Oktaviansyah, 2012** Dalam penanganan proteksi bencana daan permukiman kumuh perlu memperhatikan aksesbilitas dan aksesibilitas dan kondisi air. Dimana aksesbilitas merupakan faktor yang berperan besar dalam kekumuhan dan bahaya kebakaran. Pada permukiman kumuh, jarak bangunan cenderung rapat dan	petugas penangggulangan kebakaran, penyediaan jalan akses mobil PMK yang dapat berupa jalan lingkungan yang lebar, dan dilengkapi hidran kebakaran umum. Pada kawasan pasar dapat disediakan hidran khusus serta pengaturan jarak antar kios agar bila terjadi kebakaran tidak merambat dengan cepat

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			aksesibilitas sulit, jalan penghubung relatif kecil dan sempit sehingga jika terjadi kebakaran akan menimbulkan masalah dalam penanganan dan upaya penanganan kebakaran, sedangkan ketersediaan air merupakan sumber vital dalam penanganan kebakaran.	
Kedekatan dengan kawasan industri	Berjarak kurang dari 2KM dari kawasan industri	• Pembangunan atau penyediaan lahan untuk RUSUNAWA	**Dirgapraja dkk, 2019** Pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi	Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun atau menyediakan

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		yang diperuntukan bagi pekerja	kegiatan industri, memiliki tiga tujuan pokok, yaitu: 1. Berdampak positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan aspek pemasaran produk. Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan adanya kebutuhan tambahan akan perumahan sebagai akibat daripembangunan Kawasan Industri. Dalam kaitannya dengan jarak terhadap	lahan untuk RUSUNAWA khusus untuk pekerja dengan lokasi minimal 2 Km dari lokasi industri

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			permukiman di sini harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan, di mana sering terjadi areal tanah di sekitar lokasi industri menjadi kumuh dan tidak ada lagi jarak antara perumahan dengan kegiatan industri. 2. Berdampak negatif karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah yang dapat	

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			membahayakan bagi kesehatan masyarakat. 3. Jarak terhadap permukiman yang ideal minimal 2 (dua) Km dari lokasi industri.	
Kemudahan dalam memperoleh transportasi	Belum terlayani oleh transportasi umum	(Tidak ada dalam dokumen kebijakan)	**Sutandi, 2015** Sistem transportasi umum berkelanjutan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup dari	Strategi yang dapat dilakukan untuk menangani keberadaan transportasi umum yang kurang di kawasan ini adalah dengan melakukan penambahan

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			komunitas yang dilayani. Keberadaan sistem transportasi adalah untuk memenuhi kebutuhan keterkaitan ekonomi dan sosial serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan mobilitas (Schafer, A., 1998). Manfaat dari peningkatan mobilitas dalam transportasi untuk kepentingan publik adalah untuk	transportasi umum di kawasan Krian, bisa dengan melalui penambahan rute untuk lyn atau penyediaan becak

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			mengurangi dampak negatif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. **Muna,2009** lokasi perumahan sebaiknya dipilih di daerah yang memberikan akses yang mudah bagi orang yang bermukim (maksimal 30 menit dengan menggunakan alat transportasi umum) untuk menuju tempat kerja.	

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
Kesehatan	Sudah tercakup layanan kesehatan berupa posyandu dan puskesmas	• Pengembangan sarana dan prasarana kota • Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari luas perumahan	**Huang (2003)** masyarakat menginginkan suatu lingkungan hunian yang dekat dengan lokasi persebaran fasilitas umum perkotaan **Irfiyanti dan Manaf (2014)** Berdasarkan penelitian yang dilakukan, buruh industri merasa puas dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan	Strategi penanganan yang dapat dilakukan untuk aspek sarana kesehatan adalah dengan perawatan dan pemeliharaan sarana kesehatan.

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			hunian mereka. Tingkat kepuasan ini dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana berkondisi baik dan terawat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan mudah dijangkau. **Muna, 2009** jarak yang jauh dengan tempat kerja dan fasilitas sosial berarti akan menambah persentase	

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			pengeluaran ongkos transportasi dibandingkan seluruh pengeluaran rutin keluarga.	
Pendidikan	Sudah tercakup layanan pendidikan berupa TK dan SD	• Pengembangan sarana dan prasarana kota • Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari luas perumahan	**Huang (2003)** masyarakat menginginkan suatu lingkungan hunian yang dekat dengan lokasi persebaran fasilitas umum perkotaan **Irfiyanti dan Manaf (2014)**	Strategi penanganan yang dapat dilakukan untuk aspek sarana pendidikan adalah dengan perawatan dan pemeliharaan sarana pendidikan

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			Berdasarkan penelitian yang dilakukan, buruh industri merasa puas dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan hunian mereka. Tingkat kepuasan ini dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana berkondisi baik dan terawat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan mudah dijangkau.	

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			Muna, 2009 jarak yang jauh dengan tempat kerja dan fasilitas sosial berarti akan menambah persentase pengeluaran ongkos transportasi dibandingkan seluruh pengeluaran rutin keluarga.	
Perdagangan	Sudah tercakup sarana perdagangan berupa Pasar Krian	• Pengembangan sarana dan prasarana kota • Menyediakan prasarana	**Huang (2003)** masyarakat menginginkan suatu lingkungan hunian yang dekat dengan lokasi	Strategi penanganan yang dapat dilakukan untuk aspek sarana perdagangan adalah dengan perawatan dan

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari luas perumahan	persebaran fasilitas umum perkotaan **Irfiyanti dan Manaf (2014)** Berdasarkan penelitian yang dilakukan, buruh industri merasa puas dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan hunian mereka. Tingkat kepuasan ini dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana berkondisi	pemeliharaan sarana perdagangan.

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			baik dan terawat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan mudah dijangkau. **Muna, 2009** jarak yang jauh dengan tempat kerja dan fasilitas sosial berarti akan menambah persentase pengeluaran ongkos transportasi dibandingkan seluruh pengeluaran rutin keluarga.	

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
RTH	Ketersediaan RTH (khususnya RTH Privat) sangat minim	• Pengembangan sarana dan prasarana kota • Perlunya penyediaan RTH sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10 RTH privat • Meninngkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau	**Behdu dan Yahya, 2015** Ruang Terbuka dan Tata Hijau Perancangan ruang terbuka hijau diterapkan dengan konsep sebagai berikut: a) Menyediakan jalur hijau pada seluruh sisi jalan lingkungan. Penataan dilakukan dengan mengatur penempatan pohon dan tanaman perdu, merancang	Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan RTH yang berupa taman skala lingkungan pada lahan kosong dan menyediakan jalur hijau pada seluruh sisi jalan lingkungan

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		• RTH dioptimalkan sebagai fungsi ekologi	perletakan papan informasi/ reklame. Jalur hijau ditanami pohon spesifik yang teduh, selain sebagai pengarah, juga memberikan kesejukan, mere duksi polusi udara dan bising. b) Membentuk RTH berupa taman skala lingkungan pada lahan kosong, untuk menyeimbangkan lahan terbangun dan lahan	

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			belum terbangun serta untuk memenuhi kebutuhan bersosialisasi. c) Mengatur dan menata perlengkapan jalan dan papan informasi/ papan inormasi pada ruang terbuka perkerasan dan RTH, termasuk pada jalur hijau. **Mardhani, 2012**	

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			Dengan kurangnya ruang terbuka hijau, perlu adanya Pembangunan khusus ruang terbuka hijau dan atau menciptakan suasana teduh dengan dilakukan penghijauan guna meredam polusi udara.	
Jenis Mata Pencaharian	Mayoritas penduduk pada Kelurahan Krian bekerja sebagai wiraswasta dan	(Tidak ada dalam dokumen kebijakan)	Muna, 2009 Penentuan prioritas tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk buruh	Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan tempat tinggal khusus untuk pekerja industri

Variabel	Kondisi Eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
	karyawan pegawai swasta		industri,cenderung didasarkan pada prioritas utama yaitu lokasi tempat tinggal yang berdekatan dengan lokasi kerja.	yang ada di Kelurahan Krian

Sumber : Hasil analisis, 2020

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Strategi penanganan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kawasan Krajan Pasar :

Aspek Kondisi Bangunan Melakukan perbaikan atau penambahan komponen bangunan rumah sehingga dapat memenuhi standar teknis bangunan gedung, selain itu untuk menangani permasalahan bangunan yang masih belum teratur dapat dilakukan dengan melakukan penataan lingkungan
Aspek Kepadatan Bangunan Penataan kawasan padat dan kumuh atau dengan melakukan pembangunan perumahan secara vertical. Untuk penataan kawasan padat dapat dilakukan dengan memprioritakan daerah dengan tingkat kepadatan lebih dari 100unit/ha dilakukan dengan strategi membuat konsep rumah secara vertikal sehingga sisa lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka, sedangkan kepadatan bangunan kurang dari 100unit/ha dilakukan pengendalian kepadatan bangunan dengan peraturan KDB yang sesuai dengan RTRW dan mengatur kepadatan bangunan dengan menetapkan jarak minimal antar bangunan.
Aspek Kondisi Jalan Lingkungan Peningkatan fungsi dan kualitas jalan serta melakukan perbaikan jalan rusak, peningkatan perkerasan jalan dengan pavingisasi serta penambahan sarana pelengkap jalan seperti PJU. Penambahan sarana jalan seperti lampu jalan, lampu lalu lintas, dan zebra cross untuk memberi kemudahan masyarakat untuk menyebrang
Aspek Drainase Normalisasi drainase dan merehabilirasi saluran yang ada serta dengan melakukan poeningkatan kualitas unit system drainase. Selain itu perlu adanya pemisahan saluran drainase dengan saluran limbah.

Aspek Air Minum dan air Bersih Rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan PDAM dengan memanfaatkan air baku dari sungai/air permukaan,penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasi pengelolaan air minum,meningkatkan pelayanan air minum,
Aspek Sanitasi Melakukan pembangunan WC umum, mengembangkan MCK Komunal atau MCK++ atau tangki septik komunal, mengembangkan tangki septik sesuai SNI dan IPLT, meningkatkan program pembangunan jamban dan tangki septik individual, meningkatkan kualitas pembangunan prasarana air limbah. Lalu perlu adanya IPAL untuk menampung air limbah dari kawasan industi agar tidak mencemari kawasan pemukiman. Selain itu perlu adanya pemisahan saluran sanitasi dengan saluran drainase.
Aspek Persampahan Melakukan pembangunan atau rehabilitasi prasarana dan sarana persampahan seperti TPS, armada angkut sampah, kelembagaan, dan pelatihan pengelolaan sampah dengan jarak minimal depo 15 menit perjalanan gerobak sampah dan tiap gerobak sampah melayani 30 -50 unit rumah. Selain itu perlu adanya peningkatan system pengelolaan sampah dengan melakukan pengangkutan sampah 2 kali seminggu
Aspek Proteksi Bencana Penambahan sarana dan prasarana proteksi kebakaran, penyediaan akses berupa gang kebakaran atau jalur jalan kaki untuk memudahkan petugas penangggulangan kebakaran, penyediaan jalan akses mobil PMK yang dapat berupa jalan lingkungan yang lebar, dan dilengkapi hidran kebakaran umum. Pada kawasan pasar dapat disediakan hidran khusus serta pengaturan jarak antar kios agar bila terjadi kebakaran tidak merambat dengan cepat.

Aspek Kedekatan dengan Lokasi Industri Membangun atau menyediakan lahan untuk RUSUNAWA khusus untuk pekerja dengan lokasi minimal 2 Km dari lokasi industri
Aspek Kemudahan dalam Memperoleh Transportasi Melakukan penambahan transportasi umum di kawasan Krian, bias dengan melalui penambahan rute untuk lyn atau penyediaan becak
Aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan Perawatan dan pemeliharaan sarana kesehatan, pendidikan, dan perdagangan yang sudah ada.
Aspek RTH Menyediakan RTH yang berupa taman skala lingkungan pada lahan kosong dan menyediakan jalur hijau pada seluruh sisi jalan lingkungan
Aspek Jenis Pekerjaan Menyediakan tempat tinggal khusus untuk pekerja industri yang ada di Kelurahan Krian

4.2.3.3 Kawasan Krajan Stasiun

Berdasarkan karakteristik, tinjauan kebijakan, dan literatur atau *best practice* maka strategi yang dapat diterapkan pada Kawasan Krajan Stasiun dapat dilihat pada **Tabel 4.27**

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Tabel 4. 27
Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh Area Pendukung Industri Kawasan Krajan Stasiun

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
Kondisi bangunan	Terdapat bangunan rumah tidak memenuhi syarat teknis (RTLH) serta masih terdapat bangunan yang belum teratur.	• Melakukan perbaikan dan penataan lingkungan • Meningkatkan kualitas bangunan perumahan dan mengatur secara tegas terhadap izin pendirian rumah	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan untuk kondisi bangunan dapat dilakukan dengan rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung. rekonstruksi dengan membongkar dan	Dalam menangani kondisi bangunan yang masih belum memenuhi syarat teknis atau termasuk rumah layak huni dapat dilakukan denan melakukan perbaikan atau penambahan komponen bangunan rumah sehingga dapat memenuhi standar teknis bangunan gedung, selain itu untuk menangani

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			membangun kembali bangunan atau sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan penambahan komponen atau fungsi, serta dengan penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan **Putro,2011** Strategi perencanaan yang dapat dilakukan terhadap rumah yang tidak layak huni di kawasan kumuh dilakukan dengan	permasalahan bangunan yang masih belum teratur dapat dilakukan dengan melakukan penataan lingkungan dengan memperhatikan jarak bangunan dengan sepadan rel.

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			perbaikan bangunan dengan melihat prioritas dan tingkat kerusakan bangunan yang terdapat di kawasan kumuh, perbaikan bangunan dilaksanakan dengan pemberian material sesuai kebutuhan tidak berupa uang, pemerintah dapat bekerja sama dengan instansi terkait seperti Menpera yang memiliki program perbaikan rumah tidak layak.	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
Kepadatan bangunan	Kepadatan bangunan cukup tinggi, dan berdiri di sekitar saluran	• Melakukan penataan kawasan padat dan kumuh • Penyediaan infrastruktur yang memadai di permukiman padat, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan pembenahan prasaran dan sarana perumahan • Membangun perumahan secara vertikal pada kawasan perumahan baru,	**Putro,2011** Perencanaan terhadap kepadatan bangunan ini diprioritaskan untuk daerah dengan tingkat kepadatan lebih dari 100unit/ha dapat dilakukan dengan strategi membuat konsep rumah secara vertikal sehingga sisa lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka, memaksimalkan ruang terbuka yang ada dengan tidak menutupi dengan perkerasan beton,	Strategi dalam penangan pemukiman kumuh untuk kepadatan bangunan dapat dilakukan dengan penataan kawasan padat dan kumuh atau dengan melakukan pembangunan perumahan secara vertikal. Untuk penataan kawasan padat dapat dilakukan dengan memprioritakan daerah dengan tingkat kepadatan lebih dari

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		maupun kawasan padat hunian	memanfaatkan jarak antar bangunan sebagai ruang terbuka hijau. Sedangkan kepadatan bangunan kurang dari 100unit/ha strategi yang dapat dipergunakan adalah dengan strategi mengendalikan kepadatan bangunan dengan peraturan KDB yang sesuai dengan RTRW, memaksimalkan ruang terbuka yang ada disetiap kawasan untuk aktivitas	100unit/ha dilakukan dengan strategi membuat konsep rumah secara vertikal sehingga sisa lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka, sedangkan kepadatan bangunan kurang dari 100unit/ha dilakukan pengendalian kepadatan bangunan dengan peraturan KDB yang sesuai dengan RTRW dan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			sosial masyarakat, mengatur kepadatan bangunan dengan menetapkan jarak minimal antarbangunan.	mengatur kepadatan bangunan dengan menetapkan jarak minimal antar bangunan.
Kondisi Jalan lingkungan	Kondisi jalan masih banyak yang belum memenuhi persyaratan teknis	• Melakukan peningkatan fungsi dan kualitas jaingan jalan • Menyediakan sarana dan prasarana dasar	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan masalah kondisi jalan dapat dilakukan dengan rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material, penambahan bangunan	Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan banyaknya jalan yang masih belum memenuhi persyaratan teknis, dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan fungsi dan kualitas jalan serta

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			pelengkap jalan, serta dengan peningkatan struktur jalan **Putro,2011** Strategi perencanaan terhadap jalan lingkungan di kawasan kumuh dapat dilakukan dengan prioritas perbaikan diutamakan dilakukan di jalan lingkungan bukan jalan pribadi yang berhubungan dengan jalan lingkungan, perbaikan yang	melakukan perbaikan jalan rusak, peningkatan perkerasan jalan dengan pavingisasi.

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			dilakukan disesuaikan untuk setiap kerusakan. Kerusakan yang terparah mendapat prioritas perbaikan terlebih dahulu. **Hariyanto, 2007** Untuk penanganan jalan yang belum memenuhi standar teknis perlu peningkatan perbaikan jalan lingkungan dan sarana prasarana lainnya	
Drainase	Masih terdapat drainase lingkungan yang	• Menyediakan sarana dan prasarana dasar	**Kementerian PUPR, 2015**	Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
	tidak sesuai dengan persyaratan teknis (akibat pendangkalan dan tersumbat sampah)	• Mengoptimalkan system pengelolaan dan pengendalan banjir • Melakukan penanganan, normalisasi, dan pengembangan drainase • Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi saluran pematusan dan lokasi penampungan air, dan menyediakan prasarana dan sarana penunjang	Strategi yang dapat dilakukan untuk permasalahan drainase adalah peningkatan kualitas unit sistem drainase, penyedian sistem drainase, penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan sistem drainase kota. **Hariyanto, 2007** Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan	permasalahan drainase yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis akibat adanya pendangkalan dan tumpukan sampah yang yang menyumbat adalah dengan melakukan normalisasi drainase dan merehabilirasi saluran yang ada serta dengan melakukan peningkatan kualitas unit system drainase. Selain itu dengan melakukan pemisahan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah	saluran drainase dengan saluran limbah
Air bersih dan Air Minum	Pelayanan air minum sudah baik	• Menyediakan sarana dan prasarana dasar • Peningkatan kualitas dan penyediaan air bersih • Meningkatkan pelayanan air minum	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan permasalahan dapat dilakukan dengan rehabilitasi unit SPAM	Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemeliharaan dan meningkatkan pelayanan air minum

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		• Mengembangkan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum • Melindungi sumber air dan daerah resapan air	dengan penambahan jaringan perpipaan, penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasi pengelolaan air minum **Putro,2011** Strategi perencanaan terhadap daerah yang belum terjangkau aliran PDAM adalah dengan menyediakan air bersih melalui jaringan pipa PDAM dengan memanfaatkan air baku	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			dari sungai/air permukaan **Hariyanto, 2007** Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
Sanitasi	Masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga/bersama yang sesuai dengan persyaratan teknis, saluran pembuangan limbah rumah tangga masih menyatu dengan saluran drainase	• Menyediakan sarana dan prasarana dasar • Peningkatan kualitas dan penyediaan air bersih • Meningkatkan pelayanan air minum • Mengembangkan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum • Melindungi sumber air dan daerah resapan air	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan sanitasi dapat dilakukan dengan penyediaan sistem sanitasi setempat atau terpusat serta dengan perbaikan komponen sanitasi pengelolaan air limbah. **Putro,2011** Sistem pengelolaan air limbah di kawasan kumuh diarahkan untuk pengelolaan air limbah domestik baik di	Strategi yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pembangunan WC umum, mengembangkan MCK Komunal atau MCK++ atau tangki septik komunal, mengembangkan tangki septik sesuai SNI dan IPLT, meningkatkan program pembangunan jamban dan tangki septik individual,

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			kawasan kumuh pedesaan maupun perkotaan diarahkan dengan sistem individual dengan sarana pembuangan berupa jamban keluarga, sistem pembuangan limbah domestik kawasan kumuh perkotaan, sebagian diarahkan menggunakan sistem septik tank dengan resapan/filter, sebagian dengan septik tank tanpa resapan. Dengan proses pengolahan langsung ke	meningkatkan kualitas pembangunan prasarana air limbah. Lalu perlu adanya IPAL untuk menampung air limbah dari kawasan industi agar tidak mencemari kawasan pemukiman. Selain itu perlu adanya pemisahan saluran sanitasi dengan saluran drainase.

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			dalam IPLT yang sudah ada (menggunakan truk tinja) dan di pedesaan menggunakan sistem SPAL. **Mardhani, 2012** Dalam permasalahn sanitasi yang belum memenuhi persyaratan teknis, perlu adanya pembangunan MCK Umum dengan Program sanitasi Berbasis Masyarakat serta Tangki septic individu dan resapan individu	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			Hariyanto, 2007 Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah	
Persampahan	Belum terlayani sistem persampahan yang	• Menyediakan sarana dan prasarana dasar	**Kementerian PUPR, 2015**	Strategi yang dapat dilakukan untuk menangani

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
	baik, dan belum tersedianya TPS. Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di selokan.	• Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sampah • Membanguun TPST 3R dan membentuk KSM Pengelola sampah • Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R • Mengolah sampah secara mandiri • Meningkatkan rute dan sarana	Penanganan masalah persampahan dapat dilakukan dengan pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP) atau rehabilitasi PSP dengan perbaikan dan penambahan komponen bangunan PSP. **Mardhani, 2012** Untuk menanganani system persampahan yang kurang baik, dapat dilakukan dengan pengadaan TPS dengan	permasalahn ini adalah dengan melakukan pembangunan atau rehabilitasi prasarana dan sarana persampahan seperti TPS, armada angkut sampah, kelembagaan, dan pelatihan pengelolaan sampah dengan jarak minimal depo 15 menit perjalanan gerobak sampah dan tiap gerobak sampah melayani 30 -50 unit rumah. Selain itu perlu

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		pengangkutan sampah	jarak minimal depo 15 menit perjalanan gerobak sampah dan tiap gerobak sampah melayani 30 -50 unit rumah, serta pengelolaan sampah lingkungan ditangani oleh masyarakat setempat **Hariyanto, 2007** Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan pengadaan infrastruktur	adanya peningkatan system pengelolaan sampah dengan melakukan pengangkutan sampah 2 kali seminggu

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah	
Proteksi bencana	Belum terdapat adanya sarana/prasarana untuk proteksi kebakaran	• Perlunya penyediaan sarana dan prasarana dasar • Arahan penanganan terhadap kawasan padat dan kumuh rawan bencana kebakaran melalui upaya pencegahan kebakaran pada	**Kementerian PUPR, 2015** Penanganan maslaah proteksi bencana dengan pembangunan sarana proteksi kebakaran atau dengan Peningkatan kualitas sarana sistem proteksi kebakaran	Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan sarana dan prasarana proteksi kebakarana, penyediaan akses berupa gang kebakaran atau jalur jalan kaki untuk memudahkan petugas

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		lingkup lingkungan, lingkup tapak dan lingkup bangunan. • Menyediakan jalur evakuasi bencana kebakaran • Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	**Oktaviansyah, 2012** Dalam penanganan proteksi bencana daan permukiman kumuh perlu memperhatikan aksesbilitas dan aksesibilitas dan kondisi air. Dimana aksesbilitas merupakan faktor yang berperan besar dalam kekumuhan dan bahaya kebakaran. Pada permukiman kumuh, jarak bangunan cenderung rapat dan aksesibilitas sulit, jalan penghubung relatif kecil	penangggulangan kebakaran, penyediaan jalan akses mobil PMK yang dapat berupa jalan lingkungan yang lebar, dan dilengkapi hidran kebakaran umum

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			dan sempit sehingga jika terjadi kebakaran akan menimbulkan masalah dalam penanganan dan upaya penanganan kebakaran, sedangkan ketersediaan air merupakan sumber vital dalam penanganan kebakaran..	
Kedekatan dengan kawasan industri	Berjarak kurang dari 2KM dari kawasan industri	• Pembangunan atau penyediaan lahan untuk RUSUNAWA yang diperuntukan bagi pekerja	**Dirgapraja dkk, 2019** Pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi kegiatan industri, memiliki tiga tujuan pokok, yaitu:	Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun atau menyediakan lahan untuk RUSUNAWA khusus untuk pekerja dengan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			1. Berdampak positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan aspek pemasaran produk. Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan adanya kebutuhan tambahan akan perumahan sebagai akibat daripembangunan Kawasan Industri. Dalam kaitannya dengan jarak terhadap permukiman di sini harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan	lokasi minimal 2 Km dari lokasi industri

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			perumahan, di mana sering terjadi areal tanah di sekitar lokasi industri menjadi kumuh dan tidak ada lagi jarak antara perumahan dengan kegiatan industri. 2. Berdampak negatif karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat. 3. Jarak terhadap permukiman yang ideal	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			minimal 2 (dua) Km dari lokasi industri.	
Kemudahan dalam memperoleh transportasi	Belum terlayani oleh transportasi umum	(Tidak ada dalam dokumen kebijakan)	**Sutandi, 2015** Sistem transportasi umum berkelanjutan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup dari komunitas yang dilayani. Keberadaan sistem transportasi adalah untuk memenuhi kebutuhan keterkaitan	Strategi yang dapat dilakukan untuk menangani keberadaan tra nsportasi umum yang kurang di kawasan ini adalah dengan melakukan penambahan transportasi umum di kawasan Krian, bias dengan melalui penambahan rute untuk

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			ekonomi dan sosial serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan mobilitas (Schafer, A., 1998). Manfaat dari peningkatan mobilitas dalam transportasi untuk kepentingan publik adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. **Muna,2009**	lyn atau penyediaan becak

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			lokasi perumahan sebaiknya dipilih di daerah yang memberikan akses yang mudah bagi orang yang bermukim (maksimal 30 menit dengan menggunakan alat transportasi umum) untuk menuju tempat kerja.	
Kesehatan	Sudah tercakup layanan kesehatan berupa posyandu dan puskesmas	• Pengembangan sarana dan prasarana kota • Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas	**Huang (2003)** masyarakat menginginkan suatu lingkungan hunian yang dekat dengan lokasi	Strategi penanganan yang dapat dilakukan untuk aspek sarana kesehatan adalah dengan perawatan dan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari luas perumahan	persebaran fasilitas umum perkotaan **Irfiyanti dan Manaf (2014)** Berdasarkan penelitian yang dilakukan, buruh industri merasa puas dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan hunian mereka. Tingkat kepuasan ini dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana berkondisi baik dan terawat,	pemeliharaan sarana kesehatan.

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan mudah dijangkau. **Muna, 2009** jarak yang jauh dengan tempat kerja dan fasilitas sosial berarti akan menambah persentase pengeluaran ongkos transportasi dibandingkan seluruh pengeluaran rutin keluarga.	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
Pendidikan	Sudah tercakup layanan pendidikan berupa TK dan SD	• Pengembangan sarana dan prasarana kota • Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari luas perumahan	**Huang (2003)** masyarakat menginginkan suatu lingkungan hunian yang dekat dengan lokasi persebaran fasilitas umum perkotaan **Irfiyanti dan Manaf (2014)** Berdasarkan penelitian yang dilakukan, buruh industri merasa puas dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan hunian mereka. Tingkat	Strategi penanganan yang dapat dilakukan untuk aspek sarana pendidikan adalah dengan perawatan dan pemeliharaan sarana pendidikan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			kepuasan ini dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana berkondisi baik dan terawat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan mudah dijangkau. **Muna, 2009** jarak yang jauh dengan tempat kerja dan fasilitas sosial berarti akan menambah persentase pengeluaran ongkos transportasi	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			dibandingkan seluruh pengeluaran rutin keluarga.	
Perdagangan	Sudah tercakup layanan perdagangan	• Pengembangan sarana dan prasarana kota • Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari luas perumahan	**Huang (2003)** masyarakat menginginkan suatu lingkungan hunian yang dekat dengan lokasi persebaran fasilitas umum perkotaan **Irfiyanti dan Manaf (2014)** Berdasarkan penelitian yang dilakukan, buruh industri merasa puas dengan ketersediaan	Strategi penanganan yang dapat dilakukan untuk aspek sarana perdagangan adalah dengan perawatan dan pemeliharaan sarana perdagangan.

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			sarana dan prasarana yang ada di lingkungan hunian mereka. Tingkat kepuasan ini dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana berkondisi baik dan terawat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan mudah dijangkau. **Muna, 2009** jarak yang jauh dengan tempat kerja dan fasilitas sosial berarti akan	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			menambah persentase pengeluaran ongkos transportasi dibandingkan seluruh pengeluaran rutin keluarga.	
RTH	Terdapat sebuah taman, yaitu Taman Abhirupa	• Pengembangan sarana dan prasarana kota • Perlunya penyediaan RTH sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10 RTH privat	**Behdu dan Yahya, 2015** Ruang Terbuka dan Tata Hijau Perancangan ruang terbuka hijau diterapkan dengan konsep sebagai berikut: a) Menyediakan jalur hijau pada seluruh sisi jalan lingkungan.	Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas RTH yang sudah ada dengan menambahkan jumlah vegetasi agar lebih rindang, dan menyediakan jalur hijau pada seluruh sisi jalan lingkungan

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
		• Meninngkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau • RTH dioptimalkan sebagai fungsi ekologi	Penataan dilakukan dengan mengatur penempatan pohon dan tanaman perdu, merancang perletakan papan informasi/ reklame. Jalur hijau ditanami pohon spesifik yang teduh, selain sebagai pengarah, juga memberikan kesejukan, mere duksi polusi udara dan bising. b) Membentuk RTH berupa taman skala	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			lingkungan pada lahan kosong, untuk menyeimbangkan lahan terbangun dan lahan belum terbangun serta untuk memenuhi kebutuhan bersosialisasi. c) Mengatur dan menata perlengkapan jalan dan papan informasi/ papan inormasi pada ruang terbuka perkerasan dan RTH, termasuk pada jalur hijau.	

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
			Mardhani, 2012 Dengan kurangnya ruang terbuka hijau, perlu adanya Pembangunan khusus ruang terbuka hijau dan atau menciptakan suasana teduh dengan dilakukan penghijauan guna meredam polusi udara.	
Jenis Mata Pencaharian	Mayoritas penduduk pada Kelurahan Krian bekerja sebagai wiraswasta dan	(Tidak ada dalam dokumen kebijakan)	**Muna, 2009** Penentuan prioritas tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah,	Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan tempat tinggal khusus untuk pekerja industri

Variabel	Kondisi eksisting	Hasil Content Analisis	Literatur/Best Practice	Pembahasan
	karyawan pegawai swasta		termasuk buruh industri,cenderung didasarkan pada prioritas utama yaitu lokasi tempat tinggal yang berdekatan dengan lokasi kerja.	yang ada di Kelurahan Krian

Sumber : Hasil analisis, 2020

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Strategi penanganan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kawasan Krajan Stasiun :

Aspek Kondisi Bangunan Melakukan perbaikan atau penambahan komponen bangunan rumah sehingga dapat memenuhi standar teknis bangunan gedung, selain itu untuk menangani permasalahan bangunan yang masih belum teratur dapat dilakukan dengan melakukan penataan lingkungan dengan memperhatikan jarak bangunan dengan sepadan rel.
Aspek Kepadatan Bangunan Penataan kawasan padat dan kumuh atau dengan melakukan pembangunan perumahan secara vertical. Untuk penataan kawasan padat dapat dilakukan dengan memprioritakan daerah dengan tingkat kepadatan lebih dari 100unit/ha dilakukan dengan strategi membuat konsep rumah secara vertikal sehingga sisa lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka, sedangkan kepadatan bangunan kurang dari 100unit/ha dilakukan pengendalian kepadatan bangunan dengan peraturan KDB yang sesuai dengan RTRW dan mengatur kepadatan bangunan dengan menetapkan jarak minimal antar bangunan.
Aspek Kondisi Jalan Lingkungan Peningkatan fungsi dan kualitas jalan serta melakukan perbaikan jalan rusak, peningkatan perkerasan jalan dengan pavingisasi serta penambahan sarana pelengkap jalan seperti PJU.
Aspek Drainase Normalisasi drainase dan merehabilirasi saluran yang ada serta dengan melakukan peningkatan kualitas unit system drainase. Selain itu perlu adanya pemisahan saluran drainase dengan saluran limbah
Aspek Air Minum dan air Bersih Pemeliharaan dan meningkatkan pelayanan air minum

Aspek Sanitasi Melakukan pembangunan WC umum, mengembangkan MCK Komunal atau MCK++ atau tangki septik komunal, mengembangkan tangki septik sesuai SNI dan IPLT, meningkatkan program pembangunan jamban dan tangki septik individual, meningkatkan kualitas pembangunan prasarana air limbah. Lalu perlu adanya IPAL untuk menampung air limbah dari kawasan industi agar tidak mencemari kawasan pemukiman. Selain itu perlu adanya pemisahan saluran sanitasi dengan saluran drainase.
Aspek Persampahan Melakukan pembangunan atau rehabilitasi prasarana dan sarana persampahan seperti TPS, armada angkut sampah, kelembagaan, dan pelatihan pengelolaan sampah dengan jarak minimal depo 15 menit perjalanan gerobak sampah dan tiap gerobak sampah melayani 30 -50 unit rumah. Selain itu perlu adanya peningkatan system pengelolaan sampah dengan melakukan pengangkutan sampah 2 kali seminggu
Aspek Proteksi Bencana Penambahan sarana dan prasarana proteksi kebakarana, penyediaan akses berupa gang kebakaran atau jalur jalan kaki untuk memudahkan petugas penangggulangan kebakaran, penyediaan jalan akses mobil PMK yang dapat berupa jalan lingkungan yang lebar, dan dilengkapi hidran kebakaran umum
Aspek Kedekatan dengan Lokasi Industri Membangun atau menyediakan lahan untuk RUSUNAWA khusus untuk pekerja dengan lokasi minimal 2 Km dari lokasi industri
Aspek Kemudahan dalam Memperoleh Transportasi Melakukan penambahan transportasi umum di kawasan Krian, bias dengan melalui penambahan rute untuk lyn atau penyediaan becak

Aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan Perawatan dan pemeliharaan sarana kesehatan, pendidikan, dan perdagangan yang sudah ada.
Aspek RTH Meningkatkan kualitas RTH yang sudah ada dengan menambahkan jumlah vegetasi agar lebih rindang, dan menyediakan jalur hijau pada seluruh sisi jalan lingkungan
Aspek Jenis Pekerjaan Menyediakan tempat tinggal khusus untuk pekerja industri yang ada di Kelurahan Krian

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Krian merupakan area pendukung industri dikarenakan banyaknya pekerja yang tinggal di dalamnya. Dimana kawasan pemukiman kumuh ini terdiri dari 3 kawasan, yaitu Kawasan Gersikan, Kawasan Krajan Stasiun, dan Kawasan Krajan Pasar. Kawasan Gersikan merupakan kawasan yang berada di sepadan sungai di Kelurahan Krian, Kawasan Krajan Pasar merupakan kawasan yang berada di sekitar Pasar Krian, dan Kawasan Krajan Stasiun merupakan kawasan yang berada di sekitar kawasan sepadan rel kereta api
2. Berdasarkan hasil analisa, didapatkan bahwa permasalahan yang terjadi pada ketiga kawasan terjadi pada aspek kondisi bangunan, kepadatan bangunan, kondisi jalan, drainase, sanitasi, persampahan, proteksi bencana, RTH, kedekatan dengan lokasi industri, dan transportasi umum. Sedangkan permasalahan pada aspek air bersih dan air minum terjadi pada Kawasan Gersikan dan Kawasan Krajan Pasar.
3. Berdasarkan hasil temuan tersebut dan dengan dipadukan dengan kebijakan terkait dan juga *best practice* maka dirumuskan berbagai strategi sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian dari masing-masing variabel. Strategi yang dilakukan mencakup strategi pada Kawasan Gersikan, Kawasan Krajan Stasiun, dan Kawasan Krajan Pasar.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Hasil perumusan strategi penanganan pemukman kumuh di area pendukung industri di Kelurahan Krian dapat menjadi masukkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Penelitian ini terbatas pada pengumpulan data berdasarkan dokumen . Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penaganan permukiman kumuh Kelurahan Krian sesuai perspektif stakeholder terkait yang memiliki kepentingan terhadap penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Sidoarjo dan prioritas penanganan sesuai dengan perspektif stakeholder
3. Perlu adanya pengelompokkan atau clustering permukiman kumuh Kelurahan Krian berdasarkan kesamaan karakteristik sehingga nantinya penanganan yang dilakukan dapat lebih komprehensif dan mendalam
4. Dapat dilakukan penelitian penanganan kumuh di area pendukung industri di wilayah lain

DAFTAR PUSTAKA

Arifin. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Budiharjo, Eko. 1998. *Percikan Masalah Asitektur Perumahan Perkotaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Bachmid & Ariyanto. 2017. *Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Ternate*. Makasar: Universitas Bosowo

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2018. RP2KPKP Kota Surabaya

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2014. RP3KP Kabupaten Sidoarjo

Badan Pusat Statistik, Kecamatan Krian dalam Angka Tahun 2019. 2019

Bedu, S & Yahya, M. 2015. Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan Berbasis Penataan Bangunan dan Lingkungan. Makassar: Universitas Hasanudin

Chiara, J. D., & Koppelman. 1997. *Standar Perencanaan Tapak*. Jakarta: Erlangga.

Creswell, J. W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Dewi, I.K. 2019. *Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Peri Urban (Studi Kasus: Sidoarjo Peri Urban Surabaya)*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Dirgapraja, dkk. 2019. Pengaruh Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Permukiman Kecamatan Madidir Kota Bitung. Manado: Universitas Samratulangi

Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota untuk Arsitek.* Jakarta : PT. Bumi Aksara

Hariyanto, Asep. 2007. Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang). Bandung: Universitas Islam Bandung

Huang, Y. 2003. A room of one's own: housing consumption and residential crowding in transitional urban China. New York: University of New York

Imam Suprayogo. 2011. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Indriantoro, Nurdan Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit BPFE

Irfiyanti, Z & Manaf, A. 2014. *Karakteristik Hunian Buruh Industri di Kawasan Industri Wijayakusuma*. Semarang: Universitas Diponegoro

Kabupaten Sidoarjo. SK Bupati Kabupaten Sidoarjo nomor 188/452/4041.3.2/205 tanggal 27 April 2015 tentang

lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Sidoarjo. 2015

Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat. 2015. Dokumen Penangan Kawasan permukiman Kumuh

KOTAKU. 2018. Dokumen RPLP Kelurahan Krian

KOTAKU. Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku diakses tanggal 12 September 2019

Mardhani H. 2012. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tepi Sungai Barito Puruk Cahu. Palangkaraya: Universitas Palangka Raya

Mudjia Rahardjo. Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif, http:// mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view, diakses tanggal 7 Mei 2020

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogja: Rake Sarasin.

Muna, F. 2009. *Strategi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Buruh Industri di Kawasan Industri Bergas Kabupaten Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro

Musanna. 2016. *Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kecamatan Sukolilo di Kota Surabaya*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta

Nursid, S. 1988. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Alumni. Bandung.

Oktaviansyah, E. 2012. Penataan Permukiman Kumuh Rawan Bencana Kebakaran di Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarakan. Semaran: Universitas Negeri Semarang

Parthami, Putu W. 2009. *Konstruksi Identitas jender Laki-Laki Pada Pemuda Desa Adat Tenganan Peringsingan Kabupaten Karangasem Bali*. Depok: Universitas Indonesia.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri

Putro J. 2011. Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya. Pontianak: Universitas Tanjungpura

Rahmawati A. 2012. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Kawasan Kaligawe, Semarang). Semarang: Universitas Diponegoro

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sutansi, A. 2012. Pentingnya Transportasi Umum untuk Kepentingan Publik. Bandung: Universitas Katolik Paralahyang

Undang-undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

LAMPIRAN

Lampiran 1 Desain Survey

Sasaran	Indikator	Sumber Data	Instansi yang berperan	Metode Pengumpulan Data	Teknik Analisa	Output
Mengidentifikasi delineasi area pendukung industri dan mengetahui karakteristik kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Krian,	• Fisik • Sarana dan Prasarana • Aksesbilitas • Fasilitas umum • Ekonomi	• Dokumen RP2KPKP Kabupaten Sidoarjo • Dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan	• Bappeda Kabupaten Sidoarjo • Dinas Perumahan,Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata ruang	• Survei Primer (Observasi) • Survei Sekunder (literatur dan instansi)	*Mapping Analysist*, Deskriptif Kuantitatif	Mengetahui delineasi area pendukung industri di kawasan permukiman kumuh dan mengetahui karakteristik pemukiman kumuh

Sasaran	Indikator	Sumber Data	Instansi yang berperan	Metode Pengumpulan Data	Teknik Analisa	Output
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo		(SPPIP Kabupaten Sidoarjo) • Profil kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Krian • Dokumen penyusunan rencana kawasan permukiman kumuh	Kabupaten Sidoarjo			Kelurahan Krian

Sasaran	Indikator	Sumber Data	Instansi yang berperan	Metode Pengumpulan Data	Teknik Analisa	Output
		perkotaan (RKPKP)				
		• Dokumen Rencana Penanganan Lingkungan (RPLP) Kelurahan Krian • Data Baseline Kelurahan Krian	KOTAKU			

Sasaran	Indikator	Sumber Data	Instansi yang berperan	Metode Pengumpulan Data	Teknik Analisa	Output
		• Profil kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Krian • Dokumen penyusunan review rencana kawasan permukiman kumuh perkotaan (RKPKP)				

Sasaran	Indikator	Sumber Data	Instansi yang berperan	Metode Pengumpulan Data	Teknik Analisa	Output
		• Dokumen RP2KPKP Kabupaten Sidoarjo				
		• Kecamatan Krian dalam angka	BPS Kabupaten Sidoarjo			
		• Monografi Kelurahan Krian	Kelurahan Krian			

Sasaran	Indikator	Sumber Data	Instansi yang berperan	Metode Pengumpulan Data	Teknik Analisa	Output
Menganalisis kebijakan terkait arahan tata ruang mengenai permukiman, serta penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Krian, Kecamatan Krian	• Fisik • Non Fisik • Sarana dan Prasarana • Aksesbilitas • Kependudukan • Ekonomi	• RTRW Kabupaten Sidoarjo • Dokumen RP2KPKP Kabupaten Sidoarjo • Dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan	• Bappeda Kabupaten Sidoarjo • Dinas Perumahan,Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata ruang Kabupaten Sidoarjo	Survei Sekunder (Literatur dan Instansi)	*Content Analysis*	Mengetahui arahan dan kebijakan tata ruang terutama mengenai permukiman serta kebijakan mengenai penanganan pemukiman kumuhi di Kelurahan Krian,

Sasaran	Indikator	Sumber Data	Instansi yang berperan	Metode Pengumpulan Data	Teknik Analisa	Output
Kabupaten Sidoarjo		(SPPIP Kabupaten Sidoarjo) • Profil kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Krian • Dokumen penyusunan rencana kawasan permukiman kumuh				Kabupaten Krian

Sasaran	Indikator	Sumber Data	Instansi yang berperan	Metode Pengumpulan Data	Teknik Analisa	Output
		perkotaan (RKPKP) • Rencana Detail Tata Ruang Kota Kelurahan Krian				
		• Dokumen Rencana Penanganan Lingkungan (RPLP) Kelurahan Krian	KOTAKU			

Sasaran	Indikator	Sumber Data	Instansi yang berperan	Metode Pengumpulan Data	Teknik Analisa	Output
		• Data Baseline Kelurahan Krian • Profil kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Krian • Dokumen penyusunan review rencana kawasan				

Sasaran	Indikator	Sumber Data	Instansi yang berperan	Metode Pengumpulan Data	Teknik Analisa	Output
		permukiman kumuh perkotaan (RKPKP) • Dokumen RP2KPKP Kabupaten Sidoarjo				

Sasaran	Indikator	Sumber Data	Instansi yang berperan	Metode Pengumpulan Data	Teknik Analisa	Output
Menentukan strategi penangan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	Berdasarkan hasil analisa sasaran 1 dan 2	-	-	Survei Primer (kuisoner Strategic Formulation)	SWOT	Merumusukan strategi penanganan pemukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 2 Hasil Coding Dokumen Kebijakan

Kode Kebijakan

Kode kebijakan merupakan kode yang menunjukkan dokumen kebijakan yang menjadi obyek analisis. Berikut kode kebijakan yang digunakan dalam analisis.

Kode	Dokumen Kebijakan
D1	RP3KPKP Kabupaten Sidoarjo
D2	RP2KPKP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018
D3	RPLP Kelurahan Krian Tahun 2018

Kode Variabel

Kode variabel menunjukkan variabel yang diteliti dalam suatu unit analisis. Sedangkan, warna menunjukkan kategori dari variabel tersebut. Berikut kode variabel dan kode warna kategori yang digunakan dalam proses analisis.

Variabel	Kode Variabel	Warna
Kondisi bangunan	V1	
Kepadatan bangunan	V2	
Kondisi Jalan lingkungan	V3	
Drainase	V4	
Air bersih dan Air Minum	V5	
Sanitasi	V6	
Persampahan	V7	
Proteksi bencana	V8	

Variabel	Kode Variabel	Warna
Kedekatan dengan kawasan industri	V9	
Kemudahan dalam memperoleh transportasi	V10	
Kesehatan	V11	
Pendidikan	V12	
Perdagangan	V13	
RTH	V14	
Jenis Mata Pencaharian	V15	

CODING LITERATUR TRANSKRIP 1

KODE D1 (RP3KPKP Kabupaten Sidoarjo)

Skrip :

"Penataan dan perbaikan lingkungan kampung". D1.V1.1.

Halaman VI-12

Arahan penanganan kawasan padat dan kumuh Kabupaten Sidoarjo meliputi :

a. Penanganan kawasan padat dan kumuh berkarakteristik pusat kota (kepadatan penduduk tinggi) yang dilakukan melalui :

- Penataan dan perbaikan lingkungan kampung

Skrip :

"Pembangunan perumahan dan permukiman berupa penataan kawasan padat dan kumuh di Kabupaten Sidoarjo diarahkan pada kawasan perumahan kampung, baik yang secara administratif berijin (legal), maupun pada yang tidak berijin (ilegal). Dengan status, dan karakteristik fisik dan sosial yang berbeda, maka penanganan atau penataan pada setiap kawasan tersebut bisa berbeda.". D1.V2.1.

Halaman VI-12

6.5.1. Rencana Penataan Kawasan Padat Dan Kumuh

Pembangunan perumahan dan permukiman berupa penataan kawasan padat dan kumuh di Kabupaten Sidoarjo diarahkan pada kawasan perumahan kampung, baik yang secara administratif berijin (legal), maupun pada yang tidak berijin (ilegal). Dengan status, dan karakteristik fisik dan sosial yang berbeda, maka penanganan atau penataan pada setiap kawasan tersebut bisa berbeda.

Skrip :

"Rencana peningkatan fungsi dan kualitas jaringan jalan yang ada, dimaksudkan untuk menambah kelancaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Rencana peningkatan ini meliputi kegiatan peningkatan daya dukung perkerasan, pelebaran jalan, pengaspalan perkerasan jalan ataupun pelapisan ulang perkerasan jalan.".

D1.V3.1.

Halaman VI-6

2. Rencana peningkatan fungsi dan kualitas jaringan jalan yang ada, dimaksudkan untuk menambah kelancaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Rencana

Laporan Akhir VI-5

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sidoarjo

peningkatan ini meliputi kegiatan peningkatan daya dukung perkerasan, pelebaran jalan, pengaspalan perkerasan jalan ataupun pelapisan ulang perkerasan jalan.

Skrip :

"Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.".

D1.V3.2.

Halaman VI-8

- Pembangunan perumahan secara intensif vertikal dilakukan dengan pembangunan rumah susun baik pada kawasan perumahan baru maupun kawasan padat hunian yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya yang diarahkan pada kawasan Waru dan Sidoarjo.
- Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.
- Pemerataan pertumbuhan permukiman perkotaan (untuk penyebaran pembangunan)

Laporan Akhir VI-8

Skrip :

"Pembangunan permukiman yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana kota". D1.V3.3.

Halaman VI-9

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sidoarjo

- Pembangunan permukiman perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sehingga dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup
- Minimal 20% dari permukiman perkotaan harus disiapkan bencana.
- Intensifikasi pembangunan permukiman perkotaan untuk menambah ketersediaan RTH
- Pembangunan permukiman yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana kota
- Peremajaan permukiman kumuh yang legal dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Skrip :

"Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar". D1.V3.4.

Halaman VI-12

Arahan penanganan kawasan padat dan kumuh Kabupaten Sidoarjo meliputi :

a. Penanganan kawasan padat dan kumuh berkarakteristik pusat kota (kepadatan penduduk tinggi) yang dilakukan melalui :
   - Penataan dan perbaikan lingkungan kampung
   - Peremajaan permukiman kumuh (Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh Yang Berada di atas tanah negara)
   - Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar

Skrip :

"Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan Lingkungan (PLP), dan lain-lain.

Program tersebut antara lain berupa peningkatan (perkerasan) jalan (pavingisasi), pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih), perbaikan bangunan rumah, perbaikan saluran drainase, perbaikan atau penyediaan sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain.".

D1.V3.5.

Halaman VII-8

7.8. PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

7.8.1. Penanganan Prasarana Dan Sarana Permukiman Kumuh

Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan Lingkungan (PLP), dan lain-lain.

Program tersebut antara lain berupa peningkatan (perkerasan) jalan (pavingisasi), pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih), perbaikan bangunan rumah, perbaikan saluran drainase, perbaikan atau penyediaan sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain.

Skrip :

"Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar". D1.V4.1.

Halaman VI-12

Arahan penanganan kawasan padat dan kumuh Kabupaten Sidoarjo meliputi :

a. Penanganan kawasan padat dan kumuh berkarakteristik pusat kota (kepadatan penduduk tinggi) yang dilakukan melalui :
   - Penataan dan perbaikan lingkungan kampung
   - Peremajaan permukiman kumuh (Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh Yang Berada di atas tanah negara)
   - Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar

Skrip :

“Mengoptimalkan sistem pengelolaan pengendalian banjir untuk mengurangi luas genangan dan lamanya genangan”.

D1.V4.2.

Halaman VI-12

standar sebagai air sehat

- Mengoptimalkan sistem pengelolaan pengendalian banjir untuk mengurangi luas genangan dan lamanya genangan

poran Akhir VI-13

Skrip :

“Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan Lingkungan (PLP), dan lain-lain.

Program tersebut antara lain berupa peningkatan (perkerasan) jalan (pavingisasi), pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih), perbaikan bangunan rumah, perbaikan saluran drainase, perbaikan atau penyediaan sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain.”.

D1.V4.2.

Halaman VII-8

7.8. PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

7.8.1. Penanganan Prasarana Dan Sarana Permukiman Kumuh

Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan Lingkungan (PLP), dan lain-lain.

Program tersebut antara lain berupa peningkatan (perkerasan) jalan (pavingisasi), pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih), perbaikan bangunan rumah, perbaikan saluran drainase, perbaikan atau penyediaan sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain.

Skrip :

"Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar". D1.V5.1.

Halaman VI-12

Arahan penanganan kawasan padat dan kumuh Kabupaten Sidoarjo meliputi :

a. Penanganan kawasan padat dan kumuh berkarakteristik pusat kota (kepadatan penduduk tinggi) yang dilakukan melalui :
   - Penataan dan perbaikan lingkungan kampung
   - Peremajaan permukiman kumuh (Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh Yang Berada di atas tanah negara)
   - Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar

Skrip :

"Meningkatkan kualitas dan kecukupan penyediaan air bersih yang layak dan memenuhi standar sebagai air sehat".

D1.V5.2.

Halaman VI-12

Arahan penanganan kawasan padat dan kumuh Kabupaten Sidoarjo meliputi :

a. Penanganan kawasan padat dan kumuh berkarakteristik pusat kota (kepadatan penduduk tinggi) yang dilakukan melalui :
   - Penataan dan perbaikan lingkungan kampung
   - Peremajaan permukiman kumuh (Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh Yang Berada di atas tanah negara)
   - Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar
   - Meningkatkan kualitas dan kecukupan penyediaan air bersih yang layak dan memenuhi standar sebagai air sehat

Skrip :

"Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan Lingkungan (PLP), dan lain-lain.

Program tersebut antara lain berupa peningkatan (perkerasan) jalan (pavingisasi), pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih), perbaikan bangunan rumah, perbaikan saluran drainase, perbaikan atau penyediaan sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain".

D1.V5.3.

Halaman VII-8

7.8. PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

7.8.1. Penanganan Prasarana Dan Sarana Permukiman Kumuh

Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan Lingkungan (PLP), dan lain-lain.

Program tersebut antara lain berupa peningkatan (perkerasan) jalan (pavingisasi), pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih), perbaikan bangunan rumah, perbaikan saluran drainase, perbaikan atau penyediaan sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain.

Skrip :

"Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar". D1.V6.1.

Halaman VI-12

Arahan penanganan kawasan padat dan kumuh Kabupaten Sidoarjo meliputi :

a. Penanganan kawasan padat dan kumuh berkarakteristik pusat kota (kepadatan penduduk tinggi) yang dilakukan melalui :
   - Penataan dan perbaikan lingkungan kampung
   - Peremajaan permukiman kumuh (Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh Yang Berada di atas tanah negara)
   - Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar

Skrip :

"Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan Lingkungan (PLP), dan lain-lain.

Program tersebut antara lain berupa peningkatan (perkerasan) jalan (pavingisasi), pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih), perbaikan bangunan rumah, perbaikan saluran drainase, perbaikan atau penyediaan sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain".

D1.V6.2.

Halaman VII-8

7.8. PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

7.8.1. Penanganan Prasarana Dan Sarana Permukiman Kumuh

Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan Lingkungan (PLP), dan lain-lain.

Program tersebut antara lain berupa peningkatan (perkerasan) jalan (pavingisasi), pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih), perbaikan bangunan rumah, perbaikan saluran drainase, perbaikan atau penyediaan sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain.

Skrip :

"Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar". D1.V7.1.

Halaman VI-12

Arahan penanganan kawasan padat dan kumuh Kabupaten Sidoarjo meliputi :

a. Penanganan kawasan padat dan kumuh berkarakteristik pusat kota (kepadatan penduduk tinggi) yang dilakukan melalui :
   - Penataan dan perbaikan lingkungan kampung
   - Peremajaan permukiman kumuh (Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh Yang Berada di atas tanah negara)
   - Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar

Skrip :

"Peningkatan sistem pengelolaan sampah". D1.V7.2.

Halaman VI-12

Arahan penanganan kawasan padat dan kumuh Kabupaten Sidoarjo meliputi :

a. Penanganan kawasan padat dan kumuh berkarakteristik pusat kota (kepadatan penduduk tinggi) yang dilakukan melalui :
   - Penataan dan perbaikan lingkungan kampung
   - Peremajaan permukiman kumuh (Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh Yang Berada di atas tanah negara)
   - Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar
   - Meningkatkan kualitas dan kecukupan penyediaan air bersih yang layak dan memenuhi standar sebagai air sehat
   - Mengoptimalkan sistem pengelolaan pengendalian banjir untuk mengurangi luas genangan dan lamanya genangan
   - Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau
   - Peningkatan sistem pengelolaan sampah

Skrip :

"Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan Lingkungan (PLP), dan lain-lain.

Program tersebut antara lain berupa peningkatan (perkerasan) jalan (pavingisasi), pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih), perbaikan bangunan rumah, perbaikan saluran drainase, perbaikan atau penyediaan sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain".

D1.V7.3.

Halaman VI-12

7.8. PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

7.8.1. Penanganan Prasarana Dan Sarana Permukiman Kumuh

Pada permukiman kumuh, penanganan prasarana dan sarana dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hunian. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh warga secara swadaya, ataupun oleh pemerintah melalui program-program perbaikan lingkungan, seperti Perbaikan Kampung terpadu (KIP-K), Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Program Perbaikan Lingkungan (PLP), dan lain-lain.

Program tersebut antara lain berupa peningkatan (perkerasan) jalan (pavingisasi), pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK umum, sampah, air bersih), perbaikan bangunan rumah, perbaikan saluran drainase, perbaikan atau penyediaan sumber-sumber air untuk pemadaman kebakaran dan lain-lain.

Skrip :

"Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar". D1.V8.1.

Halaman VI-12

Arahan penanganan kawasan padat dan kumuh Kabupaten Sidoarjo meliputi :

a. Penanganan kawasan padat dan kumuh berkarakteristik pusat kota (kepadatan penduduk tinggi) yang dilakukan melalui :
   - Penataan dan perbaikan lingkungan kampung
   - Peremajaan permukiman kumuh (Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh Yang Berada di atas tanah negara)
   - Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar

Skrip :

"Arahan penanganan terhadap kawasan padat dan kumuh rawan bencana kebakaran mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan-bangunan gedung, dan Petunjuk Pencegahan Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidoarjo. Penanganan tersebut dapat dilakukan melalui upaya pencegahan kebakaran pada lingkup lingkungan, lingkup tapak dan lingkup bangunan". D1.V8.2.

Halaman VI-14

Sedangkan arahan penanganan terhadap kawasan padat dan kumuh rawan bencana kebakaran mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan-bangunan gedung, dan Petunjuk Pencegahan Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidoarjo. Penanganan tersebut dapat dilakukan melalui upaya pencegahan kebakaran pada lingkup lingkungan, lingkup tapak dan lingkup bangunan.

Laporan Akhir VI-14

Skrip :

"Pada lingkungan perumahan perlu disediakan akses berupa gang kebakaran atau jalur jalan kaki untuk memudahkan petugas penangggulangan kebakaran".

D1.V8.3.

Halaman VII-6

1. Upaya pencegahan kebakaran pada lingkup lingkungan
   a. Pada lingkungan perumahan perlu disediakan akses berupa gang kebakaran atau jalur jalan kaki untuk memudahkan petugas penangggulangan kebakaran.

Skrip :

"Penyediaan jalan akses mobil PMK yang dapat berupa jalan lingkungan yang lebar ROW dan perkerasannya dapat diakses dan mampu menahan beban berat mobil PMK. Selain itu lokasi jalan akses ini juga memungkinkan mobil PMK dapat mencapai lokasi kebakaran atau setidaknya pipa pemadam dapat menjangkau titik kebakaran".

D1.V8.4.

Halaman VII-6

b. Penyediaan jalan akses mobil PMK yang dapat berupa jalan lingkungan yang lebar ROW dan perkerasannya dapat diakses dan mampu menahan beban berat mobil PMK. Selain itu lokasi jalan akses ini juga memungkinkan mobil PMK dapat mencapai lokasi kebakaran atau setidaknya pipa pemadam dapat menjangkau titik kebakaran. Berikut ini adalah ketentuan lebar minimum perkerasan jalan tersebut.

Skrip :

"Lingkungan perumahan padat perlu dilengkapi hidran kebakaran umum (dialiri air dengan kapasitas air 1000 liter per menit) atau sumur gali (reservoir kebakaran)".

D1.V8.5.

Halaman VII-6

c. Lingkungan perumahan padat perlu dilengkapi hidran kebakaran umum (dialiri air dengan kapasitas air 1000 liter per menit) atau sumur gali (reservoir kebakaran).

Skrip :

"Arahan pembangunan/ penyediaan lahan untuk RUSUNAWA untuk pekerja atau Mess pada kawasan industri (industry estate).".

D1.V9.1.

Halaman VI-22

- Arahan pembangunan/ penyediaan lahan untuk RUSUNAWA untuk pekerja atau Mess pada kawasan industri (industry estate). Arahan tersebut juga berlaku untuk industri individual dan pusat perdagangan yang memiliki karyawan sangat besar (padat karya), atau industri individual dengan luasan sangat besar.

Skrip :

"Pembangunan permukiman yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana kota".

D1.V10.1.

Halaman VI-9

- Pembangunan permukiman perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sehingga dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup
- Minimal 20% dari permukiman perkotaan harus disiapkan bencana.
- Intensifikasi pembangunan permukiman perkotaan untuk menambah ketersediaan RTH
- Pembangunan permukiman yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana kota
- Peremajaan permukiman kumuh yang legal dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Skrip :

"Pembangunan permukiman yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana kota".

D1.V11.1.

Halaman VI-9

- Pembangunan permukiman perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sehingga dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup
- Minimal 20% dari permukiman perkotaan harus disiapkan bencana.
- Intensifikasi pembangunan permukiman perkotaan untuk menambah ketersediaan RTH
- Pembangunan permukiman yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana kota
- Peremajaan permukiman kumuh yang legal dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Skrip :

"Pembangunan permukiman yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana kota".

D1.V12.1.

Halaman VI-9

- Pembangunan permukiman perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sehingga dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup
- Minimal 20% dari permukiman perkotaan harus disiapkan bencana.
- Intensifikasi pembangunan permukiman perkotaan untuk menambah ketersediaan RTH
- Pembangunan permukiman yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana kota
- Peremajaan permukiman kumuh yang legal dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Skrip :

“Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau untuk kawasan perkotaan ditetapkan dan diupayakan secara bertahap sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah perkotaan, yang terdiri dari ruang Terbuka Hijau publik (20 %) dan Ruang Terbuka Hijau privat (10%). Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan, sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.”.

D1.V14.1.

Halaman VI-4

5. Ruang Terbuka Hijau

Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau untuk kawasan perkotaan ditetapkan dan diupayakan secara bertahap sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah perkotaan, yang terdiri dari ruang Terbuka Hijau publik (20 %) dan Ruang Terbuka Hijau privat (10%). Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan, sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Skrip :

“Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau”.

D1.V14.2.

Halaman VI-12

Arahan penanganan kawasan padat dan kumuh Kabupaten Sidoarjo meliputi :

a. Penanganan kawasan padat dan kumuh berkarakteristik pusat kota (kepadatan penduduk tinggi) yang dilakukan melalui :
   - Penataan dan perbaikan lingkungan kampung
   - Peremajaan permukiman kumuh (Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh Yang Berada di atas tanah negara)
   - Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar
   - Meningkatkan kualitas dan kecukupan penyediaan air bersih yang layak dan memenuhi standar sebagai air sehat
   - Mengoptimalkan sistem pengelolaan pengendalian banjir untuk mengurangi luas genangan dan lamanya genangan
   - Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau
   - Peningkatan sistem pengelolaan sampah
   - Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
   - Pengembangan hunian ke arah vertikal

Skrip :

"Optimalisasi fungsi RTH sebagai fungsi ekologi (penyerapan air)". D1.V14.3.

Halaman VI-4

- Mengoptimalkan sistem pengelolaan pengendalian banjir untuk mengurangi luas genangan dan lamanya genangan
- Perbesaran dimensi saluran
- Penyambungan saluran drainase yang tidak terkoneksi;
- Pembuatan boezem
- Optimalisasi fungsi RTH sebagai fungsi ekologi (penyerapan air)
- Penyediaan ruang terbuka sebagai fungsi lokasi evakuasi bencana

CODING LITERATUR TRANSKRIP 2

KODE D2 (RP2KPKP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018)

Skrip :

"Memperbaiki rumah dan lingkungan permukiman yang layak huni". D2.V1.1.

Halaman 153

Strategi Penanganan	
Pencegahan	**Peningkatan**
Kampanye dan sosialisasi lingkungan sehat dan nyaman	▪ Memperbaiki lingkungan permukiman kumuh dan meningkatkan infrastruktur pendukungnya ▪ Memperbaiki rumah dan lingkungan permukiman yang layak huni

Skrip :

"Penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat". D2.V1.1.

Halaman 153

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/ Perkotaan	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview
1.	Munculnya kantong-kantong kumuh perkotaan akibat perkembangan hunian yang tidak diiringi dengan infrastruktur permukiman yang memadai	Kawasan Krian, Kawasan Waru, Kawasan Sidoarjo, Kawasan Candi, Kawasan Tanggulangin, Kawasan Porong	▪ Perbaikan rumah dan lingkungan permukiman yang layak huni ▪ Penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat

Skrip :

"Peningkatan kondisi dan kualitas jalan utama dan lingkungan.". D2.V3.1.

Halaman 100

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN	
	(DAS) • Penanganan, normalisasi dan pengembangan drainase dengan pendekatan sistem • Peningkatan kondisi dan kualitas jalan utama dan lingkungan

Skrip :

"Penanganan, normalisasi dan pengembangan drainase dengan pendekatan sistem.".

D2.V4.1.

Halaman 100

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN	
	(DAS) • Penanganan, normalisasi dan pengembangan drainase dengan pendekatan sistem

Skrip :

"Pengembangan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum pada daerah terdapat MBR.".

D2.V5.1.

Halaman 99

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN	
• Menyediaan infrastruktur dasar bagi kawasan permukiman (tempat sampah,	• Perbaikan RTLH; • Pengembangan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum pada daerah terdapat MBR.

Skrip :

"Menyediakan air bersih sampai tingkat perdesaan dengan memanfaatkan dan pengolahan sumber air baku yang ada".

D2.V5.2.

Halaman 156

• Menyediakan air bersih sampai tingkat perdesaan dengan memanfaatkan dan pengolahan sumber air baku yang ada

Skrip :

"Peningkatan pelayanan air minum melalui pipanisasi baru". D2.V5.3.

Halaman 156

- Peningkatan pelayanan air Minum melalui pipanisasi baru

Skrip :

"Melindungi terhadap sumber air dan daerah resapan air". D2.V5.4.

Halaman 156

Melindungi terhadap sumber air dan daerah resapan air

Skrip :

"Pembangunan sarana sanitasi yang memadai di masing - masing rumah". D2.V6.1.

Halaman 99

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN	
• Menyediaan infrastruktur dasar bagi kawasan permukiman (tempat sampah, jalan, drainase, air bersih, sanitasi) • Menjaga kualitas	• Perbaikan RTLH; • Pengembangan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum pada daerah terdapat MBR. • Pembangunan sarana sanitasi yang memadai di masing - masing rumah; • Penyediaan

Skrip :

"Penyediaan IPAL/septictank komunal untuk menjaga kualitas air tanah". D2.V6.2.

Halaman 99

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN	
• Menyediaan infrastruktur dasar bagi kawasan permukiman (tempat sampah, jalan, drainase, air bersih, sanitasi) • Menjaga kualitas lingkungan permukiman • Memelihara kualitas air	• Perbaikan RTLH; • Pengembangan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum pada daerah terdapat MBR. • Pembangunan sarana sanitasi yang memadai di masing - masing rumah; • Penyediaan IPAL/septictank komunal untuk menjaga kualitas air tanah

Skrip :

"Penyediaan IPAL/septictank komunal untuk menjaga kualitas air tanah". D2.V6.3.

Halaman 99

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN	
• Menyediaan infrastruktur dasar bagi kawasan permukiman (tempat sampah, jalan, drainase, air bersih, sanitasi) • Menjaga kualitas lingkungan permukiman • Memelihara kualitas air	• Perbaikan RTLH; • Pengembangan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum pada daerah terdapat MBR. • Pembangunan sarana sanitasi yang memadai di masing - masing rumah; • Penyediaan IPAL/septictank komunal untuk menjaga kualitas air tanah

Skrip :

"Penyediaan TPST, Armada angkut sampah, kelembagaan, Pelatihan pengelolaan sampah". D2.V7.1.

Halaman 99

- Penyediaan TPST, Armada angkut sampah, kelembagaan, Pelatihan pengelolaan sampah;

Skrip :

"Membangun TPST 3R dan membentuk KSM pengelola sampah melalui pendampingan peningkatan capacity bulding yang berkelanjutan".

D2.V7.2.

Halaman 155

- Membangun TPST 3R dan membentuk KSM pengelola sampah melalui pendampingan peningkatan capacity bulding yang berkelanjutan

Skrip :

"**Meningkatkan teknologi pengolahan sampah** melalui pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organic dengan prinsip 3R".

D2.V7.3.

Halaman 155

- Meningkatkan teknologi pengolahan sampah melalui pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organic dengan prinsip 3R

Skrip :

"Pengembangan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum pada daerah terdapat MBR".

D2.V8.1.

Halaman 99

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN	
• Menyediaan infrastruktur dasar bagi kawasan permukiman (tempat sampah,	• Perbaikan RTLH; • Pengembangan jaringan perpipaan PDAM dan hidran umum pada daerah terdapat MBR.

Skrip :

"Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan harus menghindari pola enclove".

D2.V10.1.

Halaman 154

- Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan harus menghindari pola enclove

Skrip :

Halaman 154

- Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan harus menghindari pola enclove

"Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan harus menghindari pola enclove".

D2.V11.1.

Skrip :

"Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan harus menghindari pola enclove".

D2.V12.1.

Halaman 154

- Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan harus menghindari pola enclove

Skrip :

"Penyediaan RTH taman tematik di lahan kosong (DAS)".

D2.V14.2.

Halaman 99

- Penyediaan RTH taman tematik di lahan kosong

Skrip :

"Pengembangan jalur hijau dan Penghijauan di lingkungan permukiman".

D2.V14.1.

Halaman 99

- Pengembangan jalur hijau dan Penghijauan di lingkungan permukiman.

CODING LITERATUR TRANSKRIP 3

KODE D3 (RPLP KELURAHAN KRIAN TAHUUN 2018)

Skrip :

"Pembangunan perumahan / permukiman di Kabupaten Sidoarjo diarahkan dalam rangka mewujudkan suatu kondisi lingkungan kawasan perumahan/permukiman yang layak huni, indah, aman, nyaman dan asri dengan memperhatikan kelayakan teknis, lingkungan, sosial dan ekonomis yang dapat meminimalkan timbulnya dampak-dampak negatif"

D3.V1.1.

Halaman II-14

Pembangunan permukiman/perumahan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pembangunan perumahan/permukiman di Kabupaten Sidoarjo diarahkan dalam rangka mewujudkan suatu kondisi lingkungan kawasan perumahan/permukiman yang layak huni, indah, aman, nyaman dan asri dengan memperhatikan kelayakan teknis, lingkungan, sosial dan ekonomis yang dapat meminimalkan timbulnya dampak-dampak negatif;

Skrip :

"Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada **peningkatan kualitas lingkungan**, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan".

D3.V1.2.

Halaman II-15

i. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.

Skrip :

"Kebijakan penanganan bangunan permanen dan semi permanen

• Meningkatkan kualitas bangunan perumahan

• Mengatur secara tegas terhadap izin pendirian rumah

• Meningkatkan luasan RTH publik dan privat.

D3.V1.3.

Halaman II-16

2. Kebijakan penanganan bangunan permanen dan semi permanen

- Meningkatkan kualitas bangunan perumahan
- Mengatur secara tegas terhadap izin pendirian rumah
- Meningkatkan luasan RTH publik dan privat.
- Menjaga dan memantapkan pola pengadaan perumahan dan permukiman

Skrip :

"Pembangunan perumahan secara vertikal dilakukan dengan pembangunan rumah susun baik pada kawasan perumahan baru, maupun kawasan padat hunian yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya.".

D3.V2.1.

Halaman II-15

h. Pembangunan perumahan secara vertikal dilakukan dengan pembangunan rumah susun baik pada kawasan perumahan baru, maupun kawasan padat hunian yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya;

Skrip :

"Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.".

D3.V3.1.

Halaman II-15

i. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.

Skrip :

"Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah".

D1.V3.2.

Halaman IV-3

d. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Skrip :

"• Perbaikan jalan rusak

• Peningkatan perkerasan jalan dengan pavingisasi

• Penyediaan fasilitas pelengkap jalan seperti

D3.V3.3.

Halaman V-10

No.	Aspek	Permasalahan	Konsep Peningkatan	Strategi Peningkatan
		perumahan yang berada pada lahan sempadan sungai, seperti pada kawasan RW 2,3,4,5,6.		
2.	Jalan Lingkungan	▪ Keberadaan jalan lingkungan dengan perkerasan rusak (paving, beton) serta belum diperkeras (tanah/ sirtu). ▪ Jalan lingkungan belum dilengkapi dengan PJU (Penerangan Jalan Umum)	▪ Pemugaran dengan jenis Rehabilitasi	▪ Perbaikan jalan rusak ▪ Peningkatan perkerasan jalan dengan pavingisasi ▪ Penyediaan fasilitas pelengkap jalan seperti PJU

Skrip :

"Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.".

D3.V4.1.

Halaman II-15

i. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.

Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial diarahkan menjadi satu

Skrip :

"Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah".

D3.V4.2.

Halaman IV-3

d. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Skrip :

"Peningkatan dan optimalisasi fungsi saluran pematusan dan lokasi penampungan air yang telah ada yang disertai dengan penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang dapat meningkatkan kinerja saluran pematusan".

D3.V4.3.

Halaman IV-10

1) Peningkatan dan optimalisasi fungsi saluran pematusan dan lokasi penampungan air yang telah ada yang disertai dengan penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang dapat meningkatkan kinerja saluran pematusan;

Skrip :

"Pembangunan saluran pematusan dan lokasi penampungan air baru terutama pada kawasan – kawasan pertumbuhan baru yang diintegrasikan dengan sistem saluran yang telah ada".

D3.V4.4.

Halaman IV-10

2) Pembangunan saluran pematusan dan lokasi penampungan air baru terutama pada kawasan – kawasan pertumbuhan baru yang diintegrasikan dengan sistem saluran yang telah ada;

Skrip :

"Peningkatan dan pembangunan saluran pematusan disertai dengan upaya pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar saluran pematusan, serta upaya untuk pemeliharaan dan menjaga kebersihan saluran".

D3.V4.5.

Halaman IV-10

3) Peningkatan dan pembangunan saluran pematusan disertai dengan upaya pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar saluran pematusan, serta upaya untuk pemeliharaan dan menjaga kebersihan saluran.

Skrip :

"Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan".

D3.V5.1.

Halaman II-15

i. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.

Skrip :

"Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah".

D1.V2.2.

Halaman IV-3

d. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

e. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksanaan pembangunan

Skrip :

“Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan”.

D3.V6.1.

Halaman II-15

i. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.

Skrip :

“Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib

SSWP IV.

d. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

D3.V6.2.

Halaman IV-3

Skrip :

"Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku. Sistem pembuangan air limbah setempat diperuntukkan bagi orang perseorangan/rumah tangga. Sedangkan Sistem pembuangan air limbah terpusat diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat".

D3.V6.3.

Halaman IV-10

- **Sistem Pembuangan Air Limbah**

Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku. Sistem pembuangan air limbah setempat diperuntukkan bagi orang perseorangan/rumah tangga. Sedangkan Sistem pembuangan air limbah terpusat diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Skrip :

"Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan".

D3.V7.1.

Halaman II-15

i. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.

Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial diarahkan menjadi satu

Skrip :

"Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah".

D3.V7.2.

Halaman IV-3

d. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Skrip :

"Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/ persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan penyediaan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) yang tersebar pada wilayah SSWP di sekitar kawasan perumahan sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan".

D3.V7.3.

Halaman IV-9

Skrip :

"Pembangunan LPS dapat dilakukan pada lahan- lahan yang direncanakan untuk fasilitas umum dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang penanganan dan pengelolaan sampah".

D3.V7.4.

Halaman IV-9

- **Sistem Persampahan**

Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan dan penanganan sampah dilakukan sebagai berikut :

1) Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/ persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan penyediaan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) yang tersebar pada wilayah SSWP di sekitar kawasan perumahan sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan;

Skrip :

"Upaya pengelolaan sampah secara mandiri".

D3.V7.5.

Halaman IV-10

3) Upaya Pengelolaan sampah secara mandiri;

Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan dan penanganan sampah dilakukan sebagai berikut :

1) Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/ persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan penyediaan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) yang tersebar pada wilayah SSWP di sekitar kawasan perumahan sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan;
2) Pembangunan LPS dapat dilakukan pada lahan- lahan yang direncanakan untuk fasilitas umum dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang penanganan dan pengelolaan sampah;

Skrip :

“•Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman (persampahan)

D3.V7.6.

Halaman V-14

- Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman (persampahan)
- Meningkatkan rute dan sarana

Skrip :

“Meningkatkan rute dan sarana pengangkutan sampah”.

D3.V7.7.

Halaman V-14-15

- Meningkatkan rute dan sarana

pengangkutan sampah

Skrip :

“Penyediaan beberapa prasarana dan sarana pendukung TPST yang dibutuhkan ialah; alat pengangkut, incinerator (tungku pembakaran), pemilah sampah, conveyor, karyawan/ petugas kebersihan, pagar, dll.

D3.V7.8.

Halaman V-14

- Penyediaan beberapa prasarana dan sarana pendukung TPST yang dibutuhkan ialah; alat pengangkut, incinerator (tungku pembakaran), pemilah sampah, conveyor, karyawan/ petugas kebersihan, pagar, dll.

Skrip :

"Penyedian prasarana dan sarana persampahan untuk masyarakat, baik dalam tingkat RT/ RW, seperti bak sampah, kendaraan pengangkut sampah, serta petugas kebersihan".

D3.V7.9.

Halaman V-14

- Penyedian prasarana dan sarana persampahan untuk masyarakat, baik dalam tingkat RT/ RW, seperti bak sampah, kendaraan pengangkut sampah, serta petugas kebersihan.

Skrip :

"Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R yaitu pengembangan komposter di TPST serta pemisahan sampah organik non organik".

D3.V7.10.

Halaman V-14

- Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R yaitu pengembangan komposter di TPST serta pemisahan sampah organik non organik

Skrip :

"Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan".

D3.V8.1.

Halaman II-15

i. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.

Skrip :

"Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah".

D3.V8.2.

Halaman IV-3

d. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

e. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksanaan pembangunan

Skrip :

"Penambahan sarana dan prasarana proteksi kebakaran di lingkup RW Hydrant/APAR/Mini DAMKAR/Pawang Geni)".

D1.V8.3.

Halaman V-14

- Penambahan sarana dan prasarana proteksi kebakaran di lingkup RW (Hydrant/APAR/Mini DAMKAR/Pawang Geni)

\

Skrip :

"Pembuatan hydran/ sumur untuk proteksi kebakaran".

D1.V8.3.

Halaman V-14

- Pembuatan hydran/ sumur untuk proteksi kebakaran

Skrip :

"Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan".

D3.V10.1.

Halaman II-15

i. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.

Skrip :

"Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah".

D3.V10.2.

Halaman IV-3

SSWP IV.

d. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

e. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Developer (perumahan baru) dalam rencana

Skrip :

"Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan."

D3.V11.1.

Halaman II-15

i. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.

Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial diarahkan menjadi satu

Skrip :

"Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah."

D3.V11.1.

Halaman IV-3

d. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

e. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Developer (perumahan baru), dalam rencana

Skrip :

“Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan”.

D3.V12.1.

Halaman VI-9

i. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.

Skrip :

“Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah”

D3.V12.2.

Halaman IV-3

Kecamatan Krian, Balongbendo, Wonoayu, dan Prambon yang termasuk dalam SSWP IV.

d. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

e. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Developer (perumahan baru), dalam rencana

Skrip :

“Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan”.

D3.V14.1.

Halaman VI-4

i. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.

Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial diarahkan menjadi satu

Skrip :

“Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah”.

D3.V14.2.

Halaman IV-3

d. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

e. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksanaan pembangunan

Skrip :

"•Pengembangan RTH/RTP skala RW dan RT

•Penambahan RTH privat dengan pot dan vertical garden"

D3.V14.3.

Halaman V-14

- Pengembangan RTH/RTP skala RW dan RT

Skrip :

"Penambahan RTH privat dengan pot dan vertical garden"

D3.V14.4.

Halaman V-14

- Penambahan RTH privat dengan pot dan *vertical garden*

BIOGRAFI PENULIS

Penulis dengan nama panjang Cinthya Diana Qonita merupakan anak sulung dari tiga bersaudara yang lahir melalui pasangan Bapak Guguk Purwo Judianto dan Ibu Siti Halimah pada tanggal 3 Desember 1997. Selama masa hidupnya, penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN 3 Sawotratap (2004-2010), SMPN 4 Waru (2010-2013), dan SMAN 15 Surabaya (2013-2016). Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Departement Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain menimba ilmu di bidang akademis, penulis juga mencari ilmu di bidang non akademis dengan bergabung menjadi bagian dari Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Insitut Teknologi Sepuluh Nopember tepatnya di Badan Semi Otonom ITS Education Care periode tahun 2017-2018, selain itu penulis merupakan Badan Perwakilan Angkatan pda periode 2016-2019. Pada masa perkuliahan, penulis juga melakukan Kerja Praktek di PT. Tata Guna Matra pada proyek Sinkronisasi RTRW Kota Surabaya.

Ketertarikan penulis mengenai permukiman membuat penulis memutuskan unttuk megambil topik ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat terbuka untuk kritik; saran serta diskusi lebih lanjut dengan menghubungi email penulis yaitu **cinthya.diana0312@gmail.com**